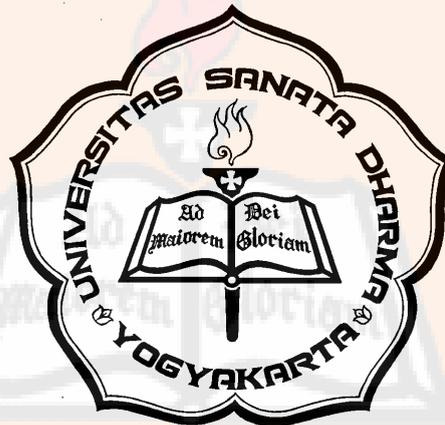


**PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI**

**PERJUANGAN SEMAUN DARI SAREKAT ISLAM  
SURABAYA SAMPAI PARTAI KOMUNIS INDONESIA  
TAHUN 1914-1923**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh :

MELLKY YULIUS

NIM: 021314013

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA**

**2007**

SKRIPSI

PERJUANGAN SEMAUN DARI SAREKAT ISLAM SURABAYA SAMPAI  
PARTAI KOMUNIS INDONESIA TAHUN 1914-1923

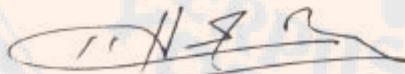
Oleh

Meliky Yulius

NIM: 021314013

Telah disetujui oleh:

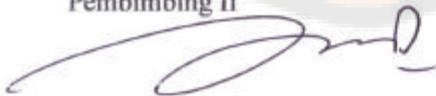
Pembimbing I



Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H

Tanggal, 15 Agustus 2007

Pembimbing II



Drs. Sutardjo Adikusilo J.R., S.Th.

Tanggal, 15 Agustus 2007

SKRIPSI

PERJUANGAN SEMAUN DARI SAREKAT ISLAM SURABAYA SAMPAI  
PARTAI KOMUNIS INDONESIA TAHUN 1914-1923

Dipersiapkan dan ditulis oleh  
Melly Yulius  
NIM: 021314013

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji  
pada tanggal 1 September 2007  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Nama Lengkap

Tanda Tangan

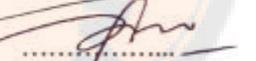
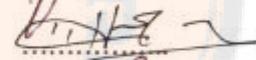
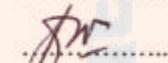
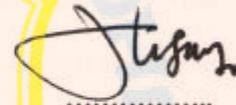
Ketua : Yohanes Harsoyo, S.Pd., M.Si.

Sekretaris : Drs. B. Musidi, M.Pd.

Anggota : Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H.

Anggota : Drs. Sutarjo Adisusilo J.R., S.Th.

Anggota : Drs. A.A. Padi



Yogyakarta, 1 September 2007  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Sanata Dharma

Dekan



  
Drs. Tarsisius Sarkim, M.Ed., Ph.D.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

### MOTTO

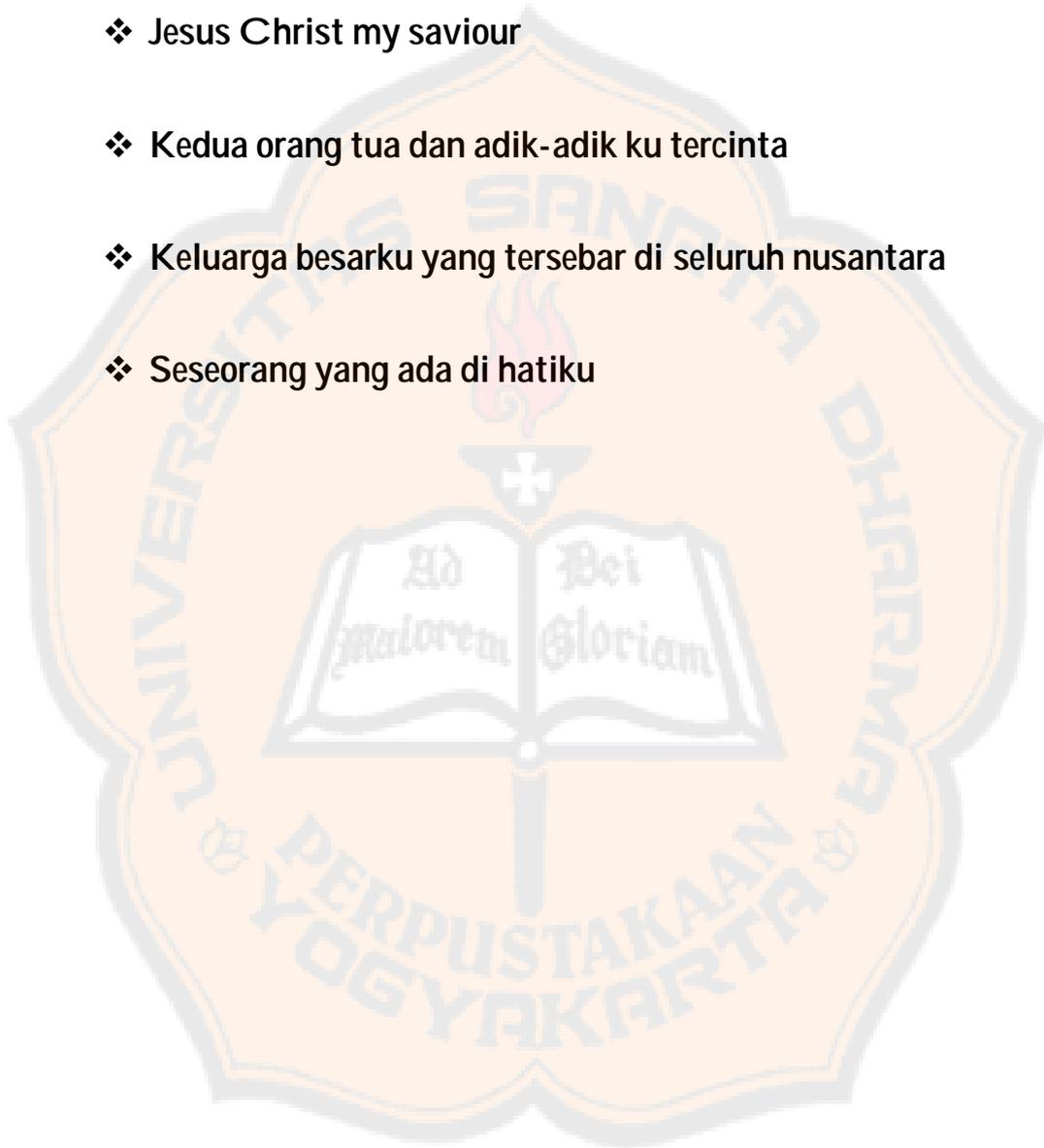
- ➡ Lebih Baik Mencoba Daripada Tidak Mencoba Sama Sekali
- ➡ Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan (Amsal 1:7)
- ➡ Hiburan untuk kesedihan adalah KERJA KERAS
- ➡ Janganlah menahan kebaikan dari pada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. (Amsal 3:27)

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Saya Persembahkan Buat:

- ❖ Jesus Christ my saviour
- ❖ Kedua orang tua dan adik-adik ku tercinta
- ❖ Keluarga besarku yang tersebar di seluruh nusantara
- ❖ Seseorang yang ada di hatiku



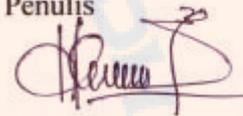
# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 23 Juli 2007

Penulis



Melky Yulius



**ABSTRAK**

**PERJUANGAN SEMAUN DARI SAREKAT ISLAM SURABAYA SAMPAI  
PARTAI KOMUNIS INDONESIA TAHUN 1914-1923**

**Mellky Yulius  
021314013**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis: 1) Latar belakang Sosial, Ekonomi, Politik dan Pendidikan Semaun, 2) Perjuangan Semaun dari Sarekat Islam Surabaya sampai Partai Komunis Indonesia tahun 1914-1923 bidang Politik, Sosial, dan Ekonomi, 3) Pengaruh Semaun dari Sarekat Islam Surabaya sampai Partai Komunis Indonesia tahun 1914-1923.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sejarah yang mencakup : heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan multidimensional yang meliputi: politik, sosial dan ekonomi. Skripsi ini ditulis secara deskriptif analitis.

Dari penelitian ini diketahui bahwa faktor yang menyebabkan Semaun berjuang dari Sarekat Islam sampai Partai Komunis Indonesia adalah faktor pendidikan formal dan lingkungan sekitar yang ditindas oleh politik kolonial Belanda serta sikapnya yang radikal terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda.

Karir politik Semaun dimulai Dari Sarekat Islam Surabaya tahun 1913, Semaun juga bergabung dengan ISDV dan VSTP. Tanggal 6 Mei 1917, Semaun terpilih menjadi ketua SI Semarang. Semaun sangat menolak pembentukan *Volksraad* dan *Indie Weerbaar*. Tahun 1919 Semaun terpilih sebagai ketua PPKB. Sejak dikeluarkan dari CSI, Semaun mulai berkonsentrasi pada PKI, Semaun juga membawa PKI bergabung dengan *comintern* yang bekerjasama dengan negara-negara yang berfaham komunis. Semaun ditangkap tanggal 8 Mei 1923 dan diberangkatkan ke Belanda pada tanggal 18 Agustus 1923 dengan menggunakan kapal “*S.S. Koningin der Nederlanden*”.

PKI terbentuk pada tanggal 23 mei 1920 dengan nama Partai Komunis Hindia dan berubah menjadi Partai Komunis Indonesia. PKI menegaskan dirinya sebagai sebuah partai yang mampu untuk mempersatukan rakyat, baik muslim maupun bukan muslim. Komunis tidak membiarkan adanya perbedaan-perbedaan nasib dalam hal pangkat dan bangsa serta menentang segala bentuk kelas-kelas manusia. PKI sangat gencar dalam mengkampanyekan semboyan “sama rasa sama rata”. Kesadaran nasional tertanam dalam diri Semaun seiring dengan realitas yang ada di Hindia, dimana rakyat kecil selalu menjadi korban kaum penguasa dalam hal ini pihak pemerintah dan kaum kapitalis.

**ABSTRACT**

**THE STRUGGLE OF SEMAUN FROM SAREKAT ISLAM SURABAYA  
TO INDONESIAN COMMUNISM PARTY IN 1914-1923**

**Mellky Yulius  
021314013**

The aims of this mini thesis are to describe and analyze:

1) The social, economic, political and educational background of Semaun, 2) The struggle of Semaun from Sarekat Islam Surabaya to the Indonesian Communism Party in 1914-1923 in politic, social, economic field, 3) The influence of Semaun from Sarekat Islam Surabaya to Indonesian Communism Party in 1914-1923.

The method used in this research was historical method included: heuristics, verification, interpretation and historiography. This research also applied multidimensional approach which included: politic, social and economic aspects and, this research is a descriptive analysis.

From this research it is known that the factor which made Semaun struggle from Sarekat Islam to Indonesian Communism Party is formal educational factor and his environment which oppressed by Dutch colonial politics and also his radical behaviour against policy of the Dutch colonial government.

Semaun is political career began from Sarekat Islam Surabaya in 1913, Semaun also joined with ISDV and VSTP. On 6 May 1917, Semaun elected to be the head of Sarekat Islam Semarang. Semaun was really refused about the forming of Volksraad and Indie Weebaar. In 1919 Semaun was elected as the head of PPKB. After out from CSI, Semaun tried to concentrate at Indonesian Communist Party. Semaun also brought PKI join into comitern who cooperated with Communism countries. Semaun caught on 8 May 1923 and sent to the Netherland on 18 August 1923 by "SS Koningin der Nederlanden" ship.

Indonesian Communism Party (PKI) formed on 23 May 1920 called Hindia Communism Party and changed into Indonesian Communism Party. PKI stated themselves as a party that was able to unite people's either from Moslem or non Moslem. Communism didn't let any kind of differences in fate of platform and nation, also against all of kind human beings. PKI campaigned their motto "egual in distribution and in feeling". National consciousness was deeply embeded in Semaun spirit in reality there were many people become the victim of the authority of the government and capitalists.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunianya, sehingga penulisan skripsi Perjuangan Semaun Dari Sarekat Islam Surabaya Sampai Partai Komunis Indonesia Tahun 1914-1923 ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma, yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penulisan skripsi.
4. Bapak Prof. DR. P.J.Suwarno, SH selaku pembimbing pertama, yang dengan penuh kesabaran dan perhatian membimbing penulis, serta memberi banyak saran, masukan, pikiran.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5. Bapak Drs. Sutardjo Adisusilo, J.R selaku dosen pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran dan perhatian membimbing penulis, serta memberi banyak saran, masukan, pikiran.
6. Bapak Drs. A.K. Wiharyanto, M.M. selaku dosen pembimbing akademik, bapak dan ibu dosen Program Studi Pendidikan Sejarah serta pihak sekretariat Pendidikan Sejarah yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Staf UPT Perpustakaan Universitas Sanata Dharma, yang telah memberikan pelayanan kepada penulis dalam mendapat referensi dan pelayanan *workstation*.
8. Staf Perpustakaan St. Ignasius Kota Baru Yogyakarta, yang telah memberikan pelayanan kepada penulis dalam mendapatkan referensi.
9. Staf Perpustakaan Daerah Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan kepada penulis dalam mendapatkan referensi.
10. Terima kasih untuk kedua orang tua, adik Merry, Natalia Dewi yang memberikan dukungan moral dan materi, Lusila Farida terima kasih atas kasih sayang dan cintanya serta keluarga besarku yang ada di Paoh, Telingan Jaya, Sintang terima kasih juga atas dukungannya.
11. Teman-teman Program Studi Pendidikan Sejarah Angkatan 2002 yaitu Eliana, F. Njoo, Eka jaya, Wahyu Wirawan, Ignatius Bayu S, Suryani, Indriyeti Pratiwi, Elisabeth Indriyani, Peron, Anis, Ruli, Idang, Retno, Agus, Arya, Ambon, Suro, Pantri, Marsel, dan semua sahabat yang memberi dukungan selama penulis menyelesaikan tugas akhir ini.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

12. Teman-teman sepermainan yaitu Jonatan, Ribai, Dewi, Yuni, Githa, Febri, Nanang, wahyu, Nina, Ita, Vina, Desi, Tomas, Nalan, Atik, Deci, dian, Tatik, Helen, Mimi, Ima, dan teman-teman yang lain, terima kasih atas dukungan dan bantuannya.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai upaya penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca sekalian pada umumnya dan bagi Universitas Sanata Dharma pada khususnya.

Yogyakarta, 18 Agustus 2007

Penulis

Mellky Yulius

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan .....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Kajian Teori .....	16
F. Hipotesis .....	36
G. Metodologi Penelitian.....	37
H. Sistematika Penulisan.....	44
<b>BAB II LATAR BELAKANG SOSIAL, EKONOMI, POLITIK, DAN</b>	
<b>PENDIDIKAN SEMAUN .....</b>	<b>46</b>
A. Latar Belakang Bidang Sosial .....	47
B. Latar Belakang Bidang Ekonomi.....	49
C. Latar Belakang Bidang Politik.....	54
D. Latar Belakang Bidang Pendidikan.....	57
<b>BAB III PERJUANGAN SEMAUN DARI SAREKAT ISLAM SURABAYA</b>	
<b>SAMPAI PARTAI KOMUNIS INDONESIA TAHUN 1914-1923 .....</b>	<b>63</b>
A. Dalam Bidang Politik .....	63
B. Dalam Bidang Sosial .....	91
C. Dalam Bidang Ekonomi.....	106
<b>BAB IV PENGARUH SEMAUN DALAM SAREKAT ISLAM SURABAYA</b>	
<b>SAMPAI PARTAI KOMUNIS INDONESIA TAHUN 1914-1923 .....</b>	<b>112</b>
A. Menciptakan PKI Sebagai Partai Modern Kebangsaan.....	112
B. Menanamkan Kesadaran Nasional di Hindia Belanda Tahun 1914-1923...	121
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>126</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>129</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>133</b>
<b>SILABUS .....</b>	<b>134</b>

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I Foto Semaun.....	133



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Politik etis yang dijalankan di Hindia Belanda merupakan salah satu politik balas jasa yang dilakukan oleh Belanda dengan membangun sekolah-sekolah bagi penduduk bumiputera, hal ini dilakukan supaya kaum bumiputera nantinya dapat bekerja bagi pemerintah kolonial Belanda. Akan tetapi yang dapat mengenyam pendidikan ini hanyalah golongan atas dalam stratifikasi masyarakat di Hindia Belanda yaitu para keturunan kraton. Tetapi di satu sisi kehidupan rakyat dalam bidang ekonomi terus saja memperhatikan, hal ini dikarenakan kewajiban dari pemerintah Hindia Belanda untuk menanam komoditi ekspor sangat memberatkan rakyat. Kehidupan rakyat Hindia Belanda ibaratkan *‘Lepas dari gengaman tangan besi jatuh ke gengaman tangan sutra’*, karena kehidupan masyarakat bumiputera dari masa tanam paksa, liberalisasi perkebunan sampai pada politik etis masih tetap mengalami penderitaan dan bahkan semakin memperhatikan.

Melihat kenyataan bahwa keadaan di Hindia Belanda yang memperhatikan maka dalam pidato tahunan kerajaan Belanda bulan September 1901 telah menunjukkan semangat Kristen, ketika Ratu mengatakan: “kewajiban yang luhur dan tanggung jawab moral untuk rakyat di Hindia Belanda.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Robert Van Niel, 1984, *Munculnya Elit Modern Indonesia*, Pustaka Jaya: Jakarta, Hlm. 51.

Politik etis memberikan keuntungan yang besar sebagai ilham bagi Belanda menuju suatu masa depan yang lebih baik bagi penjajahan di Jawa, sekaligus sebagai senjata bagi Belanda dengan suatu dasar moral yang sempurna dan dapat mempertahankannya dari tuntutan luar negeri, sementara itu membuka jalan bagi rakyat Indonesia untuk mengambil bagian dalam menentukan sebuah masa depan yang lebih baik lewat berbagai pendidikan yang dilaksanakan oleh Belanda.<sup>2</sup>

Pada bulan September 1902 A.W.F. Indenburg anggota dari Partai Kristen mulai menjalankan tugasnya sebagai Menteri Usuan Jajahan yang telah kosong karena meninggalnya T.A.J. Van Asch Van Wijk, namun hal yang terberat yang harus dihadapi oleh Indenburg yaitu kegagalan panen dan bahaya kelaparan yang melanda masyarakat di daerah Jawa serta menuntut untuk turun tangan dalam mengatasi masalah ini. Pada tahun 1902 Menteri Indenburg menunjukkan suatu kesadaran yang spontan atas masalah yang sedang dihadapi oleh Hindia Timur walaupun apa yang sedang direncanakan lebih banyak mendatangkan protes dari pada pujian. Penerapan konsep-konsep ini merupakan suatu prosedur yang lambat, hal ini dikarenakan di dalam membangun kondisi yang ada di Hindia Belanda memerlukan dana yang cukup banyak, akan tetapi anggota legislatif secara prinsip tidak setuju terhadap suatu hutang budi dan mereka menyarankan lebih baik meminjam uang tanpa bunga.<sup>3</sup>

Untuk membuktikan bahwa adanya penurunan kesejahteraan rakyat Hindia Belanda khususnya di pulau Jawa, Indenburg memberikan kepercayaan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 15

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 52-53

kepada Van Deventer untuk membentuk sebuah komisi guna mencari berbagai informasi yang terkait dengan keadaan di wilayah Hindia Belanda. Kemudian laporan ini akan dikirimkan ke Negeri Belanda untuk dicarikan solusi yang berkaitan dengan pencairan dana untuk pembangunan di kawasan Hindia Belanda.

Dari pengamatan yang telah dilakukan oleh Van Deventer dan para pengikut-pengikutnya, mereka mengatakan tidak ada perbaikan tanpa tenaga-tenaga pribumi yang mengenyam pendidikan cukup yang nantinya memegang tanggung jawab untuk melakukan perubahan-perubahan di Hindia Belanda.<sup>4</sup>

Pada tahun 1905 adanya desentralisasi kekuasaan yang merupakan wujud dari kehidupan politik sudah mulai diterapkan di Hindia Belanda, hal ini terlihat dengan dibentuknya sebuah majelis yang diberi hak eksekutif untuk mengelola keuangan. Di samping itu kekuasaan pemerintah pusat diperluas kepada badan-badan administratif rendah dan majelis-majelis rakyat setempat, tidak kepada badan-badan birokratis yang telah ada sebelumnya. Dalam perkembangannya majelis ini didominasi serta mendapat pengawasan oleh pihak Belanda, akan tetapi elit-elit bumiputera sudah mendapatkan sedikit banyak pelajaran berharga mengenai otonomi kekuasaan serta konsep-konsep pemikiran Barat.

Gerakan politik etis ini memang memberikan kemajuan di Hindia Belanda dalam bidang pendidikan yang salah satunya dengan didirikannya OSVIA (*Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren*) pada tahun 1900, OSVIA sendiri adalah sebuah lembaga pendidikan yang diperuntukkan guna mendidik Pamong Pribumi. Selain didirikannya lembaga sekolah untuk pamong pribumi, pemerintah

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 54

juga mendirikan Sekolah Dasar Eropa yang diperuntukkan bagi orang Indonesia. Berdirinya sekolah-sekolah model Barat di Hindia Belanda tidak dapat dilepaskan dari peranan orang-orang Belanda yang bersimpati pada keadaan di Hindia Belanda yang juga bertujuan melancarkan proses asosiasi di Indonesia diantaranya Snouck Hurgroje.<sup>5</sup>

Awalnya kedudukan tertinggi dalam sistem kepegawaian masyarakat Hindia Belanda didasarkan oleh garis keturunan misalnya golongan tertinggi dipegang oleh keturunan-keturunan kerajaan, maka dengan diterapkannya politik kolonial yang menjadi patokan adalah berdasarkan tingkat pendidikan dengan kata lain pendidikan menjadi pengganti garis keturunan. Pendirian sekolah bagi penduduk pribumi ternyata telah memberikan sebuah kontribusi tersendiri bagi pergerakan bumiputera, hal ini terlihat dari munculnya berbagai macam surat-surat kabar yang diterbitkan oleh masyarakat bumiputera yang juga dijadikan sebagai media pergerakan. Di samping munculnya surat-surat kabar sebagai media pergerakan, muncul juga organisasi-organisasi pergerakan modern, seperti Boedi Oetomo (BO) pada tahun 1908, Muhammadiyah pada tahun 1912, Sarekat Islam (SI) yang didirikan pada tahun 1912, Indische Partij pada tahun 1917, serta Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1920.<sup>6</sup>

Di satu sisi penerapan politik etis adalah sebuah cara halus untuk mendidik orang bumiputera menjadi priyayi guna dijadikan alat-alat administratur oleh pemerintah kolonial Belanda yang nantinya ditempatkan di desa-desa untuk melakukan pengawasan pada masyarakat. Eksploitasi-eksploitasi atas tanah-tanah

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 71

<sup>6</sup> Zainul Munasichin, 2005, *Berebut Kiri: Pergulatan Marxisme Awal di Indonesia 1912-1926*, LKiS: Yogyakarta, hlm. 6

masyarakat masih saja dilakukan pihak pemerintah kolonial Belanda dengan memanfaatkan priyayi-priyayi bumiputera. Sedangkan priyayi-priyayi bumiputera ini tidak dapat berbuat banyak dalam membela kepentingan rakyat karena mereka juga terus diawasi dan ditekan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Dengan banyaknya kaum bumiputera yang mendapat pendidikan Barat khususnya bagi kaum muslim, mulai menyadari apa yang dilakukan oleh Belanda adalah suatu bentuk penetrasi kebudayaan dan penetrasi Kristen. Untuk mengimbangi gerakan dari Belanda ini perlu dilakukan perubahan-perubahan terhadap pemikiran dan gerakan yang tetap relevan dengan dasar-dasar Islam. Kesadaran dari kaum terpelajar bumiputera terwujud dalam berbagai bentuk organisasi modern tetapi masih berlandaskan paham Islam, hal ini dikarenakan semangat kebersamaan lebih dapat tercapai lewat asas-asas keagamaan sehingga tidak jarang banyaknya anggota yang masuk dalam sebuah organisasi hanya karena pemimpin dianggap sebagai utusan Tuhan, yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki nasib-nasib rakyat. Adapun berbagai macam organisasi yang memegang teguh prinsip keIslaman adalah Muhammadiyah yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan, selain Muhammadiyah organisasi lainnya yaitu Sarekat Islam yang awalnya bergerak hanya dalam bidang sosial keagamaan tetapi dalam perkembangannya lebih bersifat politik.

Sarekat Islam (SI) merupakan organisasi sosial yang didirikan di Solo pada tanggal 11 November 1912 dengan nama Sarekat Dagang Islam, yang diketuai oleh K. H. Samanhoedi. Tujuan didirikannya Sarekat Islam adalah salah

satu reaksi dari penolakan penetrasi kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah Kolonial Belanda yang terkait dengan pengkristenan tanah jajahan, selain itu pendirian Sarekat Islam juga bertujuan sebagai benteng bagi pengusaha batik kaum pribumi dalam bidang perdagangan batik terhadap golongan Cina, dan adanya sikap superioritas orang-orang Cina terhadap orang-orang Indonesia sehubungan dengan berhasilnya revolusi Cina pada tahun 1911, serta adanya tekanan dari golongan bangsawan yang ada di Solo.<sup>7</sup>

Pada tanggal 13 Mei 1912 para anggota Sarekat Islam Solo pergi ke Surabaya guna keperluan organisasi dan mengunjungi H.O.S. Tjokroaminoto seorang tamatan dari OSVIA yang gerak geriknya sangat radikal terhadap Belanda. Setelah bertemu dengan para anggota SI Solo H.O.S Tjokroaminoto menyatakan dirinya bersedia untuk bergabung dengan Sarekat Islam. Setelah bergabung dengan Sarekat Islam Solo tugas pertama yang dilakukan oleh H.O.S. Tjokroaminoto adalah membuat akte hukum Sarekat Islam yang baru di Surabaya atas namanya sendiri beserta sebelas orang saudagar dan pegawai-pegawai Sultan pada tanggal 11 November 1912, dan tanggal inilah yang dijadikan tanggal resmi berdirinya Sarekat Islam.

Perkembangan Sarekat Islam yang terbesar bukanlah di kota-kota besar, melainkan di daerah-daerah pedesaan terutama di daerah Jawa Timur yang pada tahun-tahun awal banyaknya orang-orang desa yang pergi untuk menghadiri rapat umum dan mendaftarkan diri sebagai anggota Sarekat Islam. Hal ini juga didorong oleh kentalnya citra agama dalam gerakan Sarekat Islam sehingga

---

<sup>7</sup> Deliar Noer, 1980, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, LP3ES: Jakarta, Hlm. 116.

banyak orang yang masuk hanya karena alasan mistik. Paham keIslaman bukan hanya terbatas pada kepercayaan masyarakat sebagai sebuah agama saja tetapi juga dijadikan sebuah pedoman hidup sehingga segala sesuatunya dilihat berdasarkan kaca mata Islam dengan kata lain yang menjadi tolok ukurnya adalah Islam. Dan ini juga sebagai pemersatu dalam menyadarkan orang Indonesia sekaligus sebagai ukuran untuk solidaritas nasional.

Menggemanya pengaruh Sarekat Islam di desa-desa menyebabkan banyaknya orang yang mendaftarkan diri yang salah satunya adalah Semaun. Semaun direkrut untuk menjadi pegawai di Sarekat Islam yang bertugas sebagai juru tulis atau sekretaris karena Semaun pernah mengenyam pendidikan model Barat. Berdasarkan laporan harian Sinar Hindia 15 Maret 1919<sup>8</sup> Semaun hanya menamatkan sekolah HIS (*Hollandsche Inlandsche Scholen*) kemudian belajar secara otodidak dan memperoleh diploma A yang disamakan dengan HBS (*Hollandsche Burgerscholen*). Ketika masuk Centraal Sarekat Islam Semaun berumur 13 tahun, dalam umur yang masih belia serta rasa keingintahuan yang besar akan hal-hal baru membawa Semaun bergaul dengan siapa saja yang dapat menambah pengetahuannya yang salah satunya adalah Sneevliet.

Gerakan-gerakan Semaun semakin radikal ketika dirinya dipercayakan untuk menjadi pimpinan Sarekat Islam cabang Semarang, di samping itu Semaun juga masih sangat dekat dengan Sneevliet yang juga pindah ke Semarang dan mendirikan ISDV di Semarang, kedekatan keduanya membuat gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Sarekat Islam Semarang semakin radikal dan makin

---

<sup>8</sup> Soe Hok Gie, 1990, *Di Bawah Lentera Merah: Riwayat Sarekat Islam Semarang 1917-1920*, Frantz Fanon Foundation: Jakarta, Hlm. 50.

bertambahnya orang-orang yang menjadi anggota dari Sarekat Islam Semarang. Gerakan-gerakan Semaun juga tidak bisa dipisahkan dari semangat dan keberhasilan gerakan revolusi yang terjadi di Russia, karena Semaun beranggapan pemerintah kolonial Belanda pasti dapat ditumbangkan. Di samping itu Semaun sangat prihatin akan keadaan rakyat bumiputera khususnya di daerah Semarang, yang sangat menderita akibat kapitalisme Belanda dengan makin banyaknya perkebunan tebu dan pabrik-pabrik gula, sehingga Semaun mengajak kaum-kaum buruh yang menjadi korban dari kapitalisme segera bangkit dan melawan dengan melakukan berbagai gerakan-gerakan massa seperti pemogokan-pemogokan massal.

Melihat organisasi Sarekat Islam diambang perpecahan maka H.O.S. Tjokroaminoto mengeluarkan kebijakan partai, akibat kebijakan partai ini maka munculah dua Sarekat Islam yaitu Sarekat Islam “Putih” yang dipimpin H.O.S. Tjokroaminoto dan sarekat Islam “Merah” yang dipimpin oleh Semaun, Sarekat Islam cabang Semarang mengambil konsep gerakan yang lebih mengarah kesosialis dan pada tahun 1920 Semaun dan kawan-kawan mendeklarasikan Sarekat Islam cabang Semarang bergabung dengan ISDV membentuk Partai Komunis Hindia (PKH) yang berubah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah yang dapat menjelaskan lebih lanjut tentang Perjuangan Semaun dari Sarekat Islam Surabaya Sampai Partai Komunis Indonesia tahun 1914-1923.

Adapun masalah yang akan dikemukakan adalah:

1. Bagaimana latar belakang sosial, ekonomi, politik dan pendidikan Semaun?
2. Apa yang diperjuangkan Semaun dari Sarekat Islam Surabaya sampai Partai Komunis Indonesia tahun 1914-1923 dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi?
3. Apa pengaruh Semaun dari Sarekat Islam Surabaya sampai Partai Komunis Indonesia tahun 1914-1923?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

#### 1. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan permasalahan diatas, tujuan penulisan ini adalah

- a) Untuk mendiskripsikan dan menganalisis latar belakang Sosial, Ekonomi, Politik dan Pendidikan Semaun.
- b) Untuk mendiskripsikan dan menganalisis yang diperjuangkan Semaun dari Sarekat Islam Surabaya sampai Partai Komunis Indonesia tahun 1914-1923 dalam Bidang Politik, Sosial dan Ekonomi.
- c) Untuk mendiskripsikan dan menganalisis Pengaruh Semaun dari Sarekat Islam Surabaya sampai Partai Komunis Indonesia tahun 1914-1923.

#### 2. Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan ini adalah :

- a) Bagi Sanata Dharma

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambahkan koleksi keputakaan dan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa lain dalam melakukan penulisan skripsinya tentang tokoh-tokoh perjuangan Indonesia.

b) Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan Sejarah.

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan wawasan tentang sejarah Indonesia yaitu Perjuangan Semaun dari Sarekat Islam Surabaya sampai Partai Komunis Indonesia tahun 1914-1923.

c) Bagi Penulis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam menerapkan teori yang telah didapatkan di bangku kuliah ke dalam praktek dunia nyata sekaligus menambah pengetahuan yang berkaitan dengan Perjuangan Semaun dari Sarekat Islam Surabaya sampai Partai Komunis Indonesia tahun 1914-1923.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Sumber yang digunakan dalam penulisan ini ada dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari para saksi mata atau pelaku peristiwa itu sendiri yang menyaksikan secara langsung peristiwa itu atau berupa dokumen resmi dan penting pada masa peristiwa itu terjadi. Sumber sekunder merupakan kesaksian dari kesaksian orang lain. Sumber sejarah dapat juga disebut sebagai data sejarah, dan menurut bahannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bahan tertulis dan bahan yang tidak tertulis<sup>9</sup>.

Buku yang digunakan sebagai sumber primer dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

*Hikajat Kadiroen*, karya Semaun, terbitan Yayasan Bentang Budaya: Yogyakarta, 2000. Buku ini membahas tentang kegelisahan dan kemarahan kaum

---

<sup>9</sup> Kuntowijoyo, 1997, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yayasan Bentang Budaya: Yogyakarta, hlm. 94.

muda pergerakan terhadap imperialis Belanda dan buku yang berupa novel politik ini merupakan salah satu ungkapan perlawanan terhadap sistem yang menindas kaum bumiputera, selain itu banyak gagasan yang disampaikan secara blak-blakan yang tidak sesuai dengan rezim estetika literer selayaknya sebuah karya sastra yang bermutu namun itulah ungkapan kekesalan terhadap apa yang terjadi pada masa pemerintahan Kolonial Belanda. Dalam buku ini Semaun lebih menitik beratkan pada keadaan masyarakat bumiputera yang selalu ditindas dan sangat sukarnya mencari seorang pemimpin yang peka akan kondisi sosial kaum bumiputera di awal-awal abad ke-20.

*Penuntun Kaum Buruh*, karya Semaun, terbitan Jendela: Yogyakarta, 2000. Buku ini membahas tentang konsep pemikiran Semaun yang terkait dengan pentingnya membangun serikat-serikat buruh atau *vakbond* di berbagai pabrik dan pusat-pusat industri yang juga dijadikan benteng untuk mempertahankan apa yang menjadi hak-hak dari kaum buruh, Semaun juga menjelaskan pentingnya serikat buruh pada masa sekarang, Semaun menganggap kaum borjuis adalah kaum penjajah yang sekaligus sebagai pemilik modal. Semaun menjelaskan bagaimana tata cara mengelola keuangan partai, buku administrasi, pengawasan partai, cara-cara propaganda dan pembiayaan bagi para pengurus dan kartu anggota serikat buruh serta apa yang dilakukan harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Selain sumber primer, digunakan juga sumber sekunder yang dapat mendukung penulisan skripsi ini. Menurut Nugroho Notosusanto, sumber sekunder adalah sumber yang diperoleh oleh pengarang dari orang lain atau

sumber lain<sup>10</sup>. Sumber sekunder yang dipakai dalam penulisan skripsi ini meliputi:

*Berbareng Bergerak: Sepenggal Riwayat dan Pemikiran Semaon*, karya Soewarsono, terbitan LKiS: Yogyakarta, 2000. Buku ini membahas tentang pemikiran-pemikiran Semaun yang merupakan salah satu tokoh pendiri PKH (Partai Komunis Hindia) yang akhirnya berubah menjadi Partai Komunis Indonesia ditahun 1920. Buku ini juga membahas tentang perjuangan Semaun sebagai pemimpin Sarekat Islam Semarang dalam menyerukan agar kaum pemilik modal dan pemilik pabrik gula memperhatikan kehidupan kaum buruh, seruan Semaun ini dilakukan lewat berbagi pemogokan-pemogokan dan diplomasi kepada pabrik-pabrik gula. Semaun juga menolak jika dikatakan bahwa dirinya adalah asuhan dari Sneevliet yang selalu melakukan apa yang dikatakan Sneevliet, tetapi dalam perjuangannya tidak dapat dipungkiri bahwa Semaun juga mendapat pengaruh dari Sneevliet walaupun dalam porsi yang sedikit, di bagian terakhir buku ini Semaun menyerukan konsep Sosialis Revolusionerlah yang sangat cocok dalam perjuangan kaum buruh.

*Di Bawah Lentera Merah: Riwayat Sarekat Islam Semarang 1917-1920*, karya Soe Hok Gie terbitan Frantz Fanon Foundation: Jakarta, 1990. Buku ini membahas tentang proses revolusioner dari Sarekat Islam Semarang yang ditentukan oleh keadaan masyarakat Indonesia secara umum dan masyarakat Semarang secara khusus pada akhir Perang Dunia I, dimana kehidupan rakyat bumiputera yang menderita akibat liberalisasi perkebunan, menyebarnya wabah

---

<sup>10</sup> Nugroho Notosusanto, 1971, *Norma-norma Dasar Pemikiran dan Penelitian*, Dephankam: Jakarta, hlm. 19.

pes yang menyebabkan banyaknya penduduk bumiputera di Semarang meninggal dunia. Selain itu terjadinya perselisihan paham yang berkaitan dengan pembentukan *Volkraad* dan *Indie Weerbaar* yang menurut Semaun masyarakat bumiputera hanya dijadikan umpan peluru oleh Belanda, di samping itu buku ini juga membahas aksi-aksi Sarekat Islam Semarang sejak kongres nasional Centraal Sarekat Islam ke II sampai kongres ke III, sebagai kelanjutan pada bab IV buku ini membahas perubahan Sarekat Islam Semarang dari Sarekat Islam menjadi Partai Komunis Indonesia sesudah kongres ke III, pembentukan Partai Komunis Indonesia ini tidak terlepas dari kebijakan partai dalam mengembalikan identitas partai yang syarat dengan asas agama Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadist.

*The Rise of Indonesian Communism*, karya Ruth T McVey, terbitan Ithaca: Cornell University Press, 1965. Buku ini secara garis besar membahas gerakan komunis di Hindia pada periode 1914 sampai 1926, buku ini juga membahas secara runtun bagaimana proses masuknya ajaran komunis ke Hindia yang dibawa para tokoh sosialis demokrat Belanda yang juga berfaham Marxis. Di samping itu buku ini juga membahas pertarungan ideologi serta perpecahan yang dialami oleh Sarekat Islam sebagai akibat perbedaan paham tentang kapitalisme dan sosialisme yang pada akhirnya melahirkan dua kubu dalam Sarekat Islam yaitu Sarekat Islam Putih yang dipimpin oleh H.O.S. Tjokroaminoto dan Sarekat Islam Merah dipimpin oleh Semaun dan Darsono yang mengakibatkan Sarekat Islam Merah terdpek dari keanggotaan Centraal Sarekat Islam, dan melahirkan Partai Komunis Indonesia di Hindia tahun 1920.

*An Age in Motion: Popular Radicalism in Java 1912-1926*, karya Takashi Shiraishi, Terjemahan Hilmar Farid, *Jaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, terbitan Pustaka Utama Grafiti: Jakarta, 1997. Buku ini membahas tentang keadaan masyarakat di kawasan Surakarta dan Yogyakarta yang dijadikan tempat penanaman modal serta pembagian daerah antara Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Buku ini lebih menitikberatkan pada pertumbuhan gerakan-gerakan Modern Islam seperti Sarekat Islam yang menjadi awal gerakan kaum bumiputera dalam bidang sosial keagamaan serta memaparkan tokoh-tokohnya seperti Tjokroaminoto, Marco, Semaun, periode 1912-1917, dan menjelaskan perkembangan ke arah pergerakan dan pemogokan dari periode 1918-1920, pada bagian terakhir buku ini membahas pergerakan yang menuju pada pemberontakan Komunis yang gagal pada akhir tahun 1926 dan awal 1927.

*Berebut Kiri: Pergulatan Marxisme Awal di Indonesia 1912-1926*, karya Zainul Munasichin, terbitan LKiS: Yogyakarta, 2005. Buku ini membahas tentang perkembangan pemikiran Jawa sebelum munculnya pengaruh komunis, pada bagian pertama buku ini lebih memfokuskan pada pemikiran para tokoh pergerakan Boedi Oetomo dan Sarekat Islam sebagai representasi wacana Jawa dan Islam, buku ini juga membahas bagaimana masuknya pemikiran sosialis dan marxisme ke Hindia lewat para tokoh-tokoh sosialis demokrat Belanda antara lain Sneevliet, Bergsma, dan Douwes Dekker serta bagaimana respon dari tokoh-tokoh pergerakan bumiputera mengenai paham ini yang dianggap sebagai senjata dalam menghancurkan pengaruh kapitalisme yang membawa kesengsaraan bagi kaum

bumiputera, buku ini lebih menitik beratkan pada apresiasi pemikiran Jawa terhadap pengaruh komunis yang disebarkan kaum demokrat Belanda lewat tokoh-tokoh bumiputera seperti Semaun, di dalam buku dibahas mengenai dua kubu yaitu kaum yang menolak menerapkan paham Marxisme karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang dipelopori oleh H.O.S. Tjokroaminoto, H. Agus Salim, Fachroeddin.

*Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, karya Deliar Noer dan diterbitkan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) tahun 1973. Buku ini membahas tentang asal usul dan pertumbuhan gerakan modern Islam yang ditinjau dari segi pendidikan dan sosial dengan lebih memfokuskan pada perkembangan Islam di Minangkabau, masyarakat Arab yang ada di Indonesia, persyarikatan ulama, latar belakang muncul dan berkembangnya organisasi Muhammadiyah, latar belakang munculnya Persatuan Islam sebagai sarana untuk memajukan Islam dan sebagai bentuk kesadaran dari masyarakat di Bandung bahwa dibidang-bidang agama Islam mereka jauh ketinggalan dari daerah lain. Pada bagian kedua buku ini menjelaskan asal-usul dan pertumbuhan gerakan modern Islam ditinjau dari segi politik yang lebih memfokuskan pada pertumbuhan Sarekat Islam dari tahun 1911 sampai 1942 dan tumbuhnya partai-partai Islam yang lain. Dan dibagian selanjutnya membahas tentang reaksi Belanda terhadap gerakan pembaharuan yang bersifat modern serta langkah-langkah yang diambil untuk mengawasi gerakan tersebut.

*Munculnya Elit Modern Indonesia*, karya Robert Van Niel, terjemahan Deliar Noer, terbitan Pustaka Jaya: Jakarta tahun 1984. Buku ini membahas tentang keadaan masyarakat di Hindia Timur di tahun 1900, yang terdapat berbagai yaitu bangsa Eropa yang menguasai sistem pemerintahan dalam hal ini yaitu Belanda, selain terdapat bangsa Eropa ada juga orang Cina dan Arab yang lebih memfokuskan gerakannya dalam bidang perdagangan, pada bagian kedua buku ini membahas tentang penerapan politik etis yang dilakukan oleh Belanda yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya perubahan sosial, dan pembaharuan-pembaharuan di kawasan Hindia. Pada bagian ketiga buku ini membahas perkembangan yang radikal di Hindia Belanda pada periode 1914-1920 yang berkaitan dengan PD I, pertumbuhan Sarekat Islam dan organisasi-organisasi yang lainnya serta sikap yang diambil oleh pemerintah menghadapi kondisi politik di Hindia waktu itu.

#### **E. Kajian Teori**

Di dalam merekonstruksi peristiwa masa lampau khususnya mengenai Perjuangan Semaun dari Sarekat Islam Surabaya sampai Partai Komunis Indonesia tahun 1914-1923 ada beberapa konsep sebagai dasar landasan teori untuk penulisan, yaitu:

##### **1. Perjuangan**

Perjuangan berasal dari kata juang yang berarti laga atau memperebutkan sesuatu dengan mengadu tenaga atau usaha-usaha yang dilakukan untuk

memecahkan masalah-masalah demi tujuan yang akan dicapai.<sup>11</sup> Tetapi perjuangan yang dilakukan oleh Semaun bukanlah perjuangan yang dilakukan dengan mengadu tenaga secara fisik, tetapi perjuangan yang dilakukan oleh Semaun berkaitan dengan pemikiran yang diaplikasikan dalam karir Semaun yang berawal dari Centraal Sarekat Islam tahun 1914 sampai pada Partai Komunis Indonesia 1923.

Dalam perjalanan karir Semaun periode 1917-1920 sangat berpengaruh bagi sejarah Indonesia pada awal abad ke-20, hal ini juga didukung dengan diangkatnya Semaun sebagai pemimpin Sarekat Islam cabang Semarang pada 6 Mei 1917 menggantikan Moehammad Joesoef, pada saat Semaun menjabat sebagai Ketua Sarekat Islam cabang Semarang Ia berumur 18 tahun, berkat kerja keras yang dilakukan dalam keanggotaan CSI maka Ia dipercayakan oleh H.O.S. Tjokroaminoto untuk menjadi pemimpin Sarekat Islam cabang Semarang. Pergantian pemimpin Sarekat Islam Semarang menandakan adanya perubahan status sosial yang awalnya dipimpin oleh mereka dari kalangan kaum menengah dan pegawai negeri tetapi sejak dipimpin Semaun, para pendukung Sarekat Islam berasal dari kaum buruh dan tani, dan dari Sarekat Islam Semarang inilah yang menjadi cikal bakal dari gerakan kaum Marxis di Indonesia.<sup>12</sup>

Perjuangan Semaun dari Sarekat Islam Surabaya sampai Partai Komunis Indonesia tahun 1914-1923 meliputi beberapa bidang, yaitu:

---

<sup>11</sup> W.J.S Berwadarmenta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, Hlm. 414

<sup>12</sup> Soe Hok Gie, *op. cit.*, hlm. 5-6.

### a) Bidang Politik

Langkah awal keterlibatan Semaun dalam bidang politik dapat dilihat dengan keikutsertaan Semaun dalam organisasi Sarekat Islam Surabaya, yang salah satu tujuannya meluruskan pemahaman Islam dan sebagai media gerakan politik bumiputera melawan kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang dinilai diskriminatif.<sup>13</sup> Setelah ikut serta dalam CSI Semaun dipercayakan untuk memimpin Sarekat Islam cabang Semarang yang gerakannya selalu radikal dalam menentang politik kolonial Belanda, selain menjadi pimpinan Sarekat Islam Semarang, Semaun juga menjadi anggota dari ISDV dan menjadi propagandis VSTP (*Vereeniging Voor Spoor-en Tramweg Personeel*). Pada Desember 1919 Semaun terpilih menjadi ketua PPKB (Persatuan Pergerakan Kaoem Boeroeh). Semaun merasa tidak puas terhadap ideologi pergerakan CSI yang dianggap tidak mewakili kaum buruh, maka secara terang-terangan Semaun memproklamkan ideologi pergerakan Sarekat Islam Semarang adalah berhaluan sosialis demokrat. Ideologi ini dianggap dapat menjadi pedoman bagi perubahan kehidupan buruh yang pada akhirnya menjadikan masyarakat Indonesia yang tanpa kelas, Semaun juga menolak memasukan unsur agama dalam gerakan SI Semarang. Atas inisiatif para anggota ISDV dan anggota SI Semarang maka pada 23 Mei 1920 lahirlah Partai Komunis Hindia yang berubah menjadi Partai Komunis Indonesia.<sup>14</sup>

Lewat organisasi-organisasi politik ini Semaun selalu menyerukan dengan berbagai tulisan-tulisan di surat kabar serta diplomasi-diplomasi yang dilakukan atas nama Sarekat Islam agar pemilik modal memperhatikan kehidupan kaum

---

<sup>13</sup> Zainul Munasichin, *op. cit.*, hlm. 63

<sup>14</sup> Soe Hok Gie, *op. cit.*, hlm. 43.

buruh, serta mengkritik kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang lebih mementingkan para pemilik modal dari pada kehidupan rakyat bumiputera. Disamping itu perjuangan politik Semaun menolak adanya *Voklsraad* dan *Indie Weerbaar* yang dianggap tameng buatan Belanda. Secara garis besar perjuangan politik yang dilakukan Semaun adalah menentang Imperialisme dan Kolonialisme.<sup>15</sup>

#### **b) Bidang Sosial**

Perjuangan Semaun dalam bidang sosial dapat dilihat dari pergerakan yang dilakukan selalu mengarah pada perbaikan kehidupan kaum buruh, dengan kata lain buruh sebagai ujung tombak pergerakan. Atas desakan Semaun dan kawan-kawannya sebagai utusan dari Sarekat Islam Semarang, pada kongres CSI september 1918 di Surabaya salah satu hasil kongres yaitu SI menegaskan diri sebagai organisasi pergerakan pertama di Hindia, yang dengan eksplisit membela kepentingan buruh. Hasil keputusan ini ditindaklanjuti dengan langkah pembentukan organisasi buruh secara massif di seluruh wilayah Hindia Belanda.<sup>16</sup> Semaun juga menyerukan agar setiap organisasi pergerakan bumiputera memasukan agenda perjuangan buruh.

#### **c) Bidang Ekonomi**

Salah satu bentuk perjuangan yang dilakukan oleh Semaun dalam bidang ekonomi yaitu mulai belajar dari apa yang dilakukan oleh para kapitalis dengan pengorganisasian diri dimana para kapitalis menempuh jalan kompromi antar sesama kapitalis. Semaun juga menerangkan jika perjuangan masyarakat

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm 82

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

bumiputera ingin berhasil maka kata kuncinya haruslah bersatu, yaitu lewat tiga pilihan wadah perkumpulan bumiputera yang dapat dimasuki, pertama organisasi perdagangan (koperasi), kedua organisasi buruh (*Vakbond*) dan yang ketiga organisasi politik (partai).<sup>17</sup> Tetapi Semaun lebih menyarankan agar rakyat bumiputera masuk dalam perkumpulan buruh karena resikonya sangat kecil. Semaun juga selalu menyerukan agar kaum pemilik modal (uang) memperhatikan kehidupan rakyat bumiputera yang dijadikan buruh pabrik dan industri, sehingga rakyat bumiputera tidak hanya diperas tenaganya saja tetapi mendapat perhatian dan memperoleh penghidupan yang layak. Secara garis besar perjuangan Semaun dalam bidang ekonomi menentang dan melawan adanya Kapitalisme yang dianggap bertindak semena-mena terhadap rakyat bumiputera.

## 2. Semaun

Semaun dilahirkan pada tahun 1899 di Tjurah Malang, Mojokerto, sebuah kota kecil yang terletak di sebelah barat Surabaya. Semaun berasal dari keluarga buruh kereta api, tetapi karena dibesarkan pada jaman politik etis maka Semaun dapat mengenyam pendidikan dasar model Barat. Di sekolah-sekolah ini para siswa mendapat pendidikan kebudayaan dan sejarah Barat, yang dengan sendirinya mulai menyadarkan mereka tentang makna kebebasan, kemerdekaan dan hak-hak asasi manusia.<sup>18</sup> Semaun masuk dalam Centraal Sarekat Islam tahun 1914 dan menjabat sebagai juru tulis. Dalam periode 1914-1917 karir Semaun di CSI tidak begitu terlihat, tetapi pada periode 1917-1920 nama Semaun mulai diperhitungkan dalam dunia politik dan keorganisasian di Hindia Belanda. Hal ini

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

dikarenakan gerakan-gerakan yang dilakukan Semaun bersifat radikal dan terang-terangan dalam menentang pemerintah kolonial Belanda dan kaum pemilik modal, yang dianggap sebagai biang kerok kemelaratan kehidupan kaum buruh bumiputera.

Selain menjadi pemimpin Sarekat Islam cabang Semarang Semaun juga menjadi propagandis VSTP yaitu organisasi yang menampung para buruh kereta api, selain menjadi anggota dalam berbagai organisasi Semaun juga menjadi ketua dari organisasi PPKB yaitu organisasi yang menjadi wadah central kaum buruh, dan secara *de jure* (sesuai dengan ketentuan yang berlaku), Semaun adalah penguasa tertinggi dalam organisasi buruh Hindia. Semaun juga berwenang untuk memutuskan kapan buruh Hindia harus bergerak atau menahan diri menghadapi represi para pengusaha pabrik.<sup>19</sup> Organisasi ini juga berfungsi sebagai wadah bagi kaum buruh dalam menyampaikan aspirasinya. Pada tahun 1920 Semaun bersama teman-temannya yang tergabung dalam Sarekat Islam Semarang memproklamkan berdirinya Partai Komunis Hindia (PKH) yang berubah nama menjadi PKI.

### **3. Sarekat Islam**

#### **a. Pengertian Sarekat Islam**

Sarekat dapat diartikan sebagai persekutuan atau perhimpunan, yang terorganisir dengan baik dimana terdapat kepengurusan yang jelas, dan dapat dipertanggung jawabkan legalitasnya di muka umum. Sedangkan Islam adalah agama *Tauhid* yaitu rukun iman atau arkanul Islam yang merupakan asas seluruh

---

<sup>19</sup> Zainul Munasichin, *op. cit.*, Hlm.103.

ajaran Islam (Yakin akan Tuhan Yang Maha Esa, Malaikat-malaikatnya, Kitab Suci, Rasul Allah, Yaumul Akhir, dan Qadar baik dan buruk berasal dari Allah), yang ditegakkan oleh nabi Muhammad Saw, selama dua puluh tiga tahun di Mekah dan Madinah dari 571-632. Islam disebut juga sebagai agama *fitrah* yaitu agama Islam yang dirancang oleh Allah sesuai dengan *fitrah* atau sifat asli manusia<sup>20</sup>. Islam diharapkan dapat menjadi wadah yang menyatukan umat Islam, karena mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam.

Sarekat Islam pertama kali didirikan di Bogor dengan nama Sarekat Dagang Islam, tetapi tidak berjalan seperti yang diharapkan, dan untuk menghidupkan lagi maka didirikan kembali di Bogor dua tahun kemudian yang diprakarsai oleh Raden Mas Tirtoadisoerjo yang tujuan utamanya untuk mematahkan monopoli perdagangan Cina dalam industri batik. Sarekat Dagang Islam yang ketiga, lahir di Solo yang diketuai oleh Haji Samanhoedi dan diakui oleh pemerintah Belanda tahun 1912, tujuannya untuk memajukan kehidupan ekonomi rakyat di bawah asas-asas Islam.<sup>21</sup>

Berdasarkan akte yang dibuat oleh H.O.S. Tjokroaminoto tujuan dari Sarekat Islam adalah:

- 1) Memajukan semangat perdagangan di kalangan penduduk bumiputera
- 2) Membantu anggota-anggota yang dalam kesulitan yang bukan karena kesalahan sendiri.

---

<sup>20</sup> Harun Nasution, 1992, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Djambatan: Jakarta, hlm. 443.

<sup>21</sup> A.K. Pringgodigdo, 1973, *Ensiklopedia Umum*, Jajasan Kanisius, Jakarta, hlm. 1166.

- 3) Memajukan perkembangan spiritual dan minat di bidang materi di kalangan orang Indonesia, dan dengan berbuat demikian akan meningkatkan standar hidup mereka.
- 4) Menentang salah paham dengan Islam dan memajukan kehidupan beragama di kalangan bangsa Indonesia sesuai dengan hukum-hukum dan kebiasaan agama tersebut.<sup>22</sup>

Selain memiliki tujuan dasar Sarekat Islam juga mempunyai tiga prinsip yang menjadi landasan dan pedoman dalam perjuangannya, yaitu: asas agama Islam sebagai dasar perjuangan organisasi, asas kerakyatan sebagai dasar penghimpun organisasi, dan asas ekonomi. Asas agama Islam ditujukan sebagai wadah penghimpun dan pemersatu umat Islam serta menjadi kekuatan dalam usaha dalam mengusir penjajah Belanda.<sup>23</sup>

#### **b. Perkembangan Sarekat Islam**

Perkebambangan berasal dari kata kembang yang berarti menjadi besar, luas dan banyak.<sup>24</sup> Perkembangan yang dimaksud disini adalah perkembangan Sarekat Islam yang mulai mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan baik ekonomi, politik dan sosial.

Perkembangan Sarekat Islam ditunjukkan dalam beberapa unsur, yaitu: peningkatan jumlah anggota, rumusan Anggaran Dasar atau program kerja, perluasan persebaran Sarekat Islam di berbagai daerah, dan koordinasi struktur organisasi. Pertumbuhan dan perkembangan Sarekat Islam dapat dibagi dalam

<sup>22</sup> Robert Van Niel, *op. cit.*, Hlm. 128.

<sup>23</sup> M.A. Gani, 1984, *Cita Dasar dan Pola Perjuangan Syarikat Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm 14.

<sup>24</sup> W.J.S Poerwadarminta, *op. cit.*, hlm 474.

empat periode yaitu: Sarekat Islam periode pertama tahun 1912-1916, Sarekat Islam periode kedua tahun 1916-1921, Sarekat Islam periode ketiga tahun 1921-1927, dan Sarekat Islam periode keempat tahun 1927-1934.

### **1) Sarekat Islam periode pertama tahun 1912-1916**

Sarekat Islam tahun 1912-1916 mengalami banyak perkembangan. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan Anggaran Dasar Sarekat Islam yang tertuang dalam Anggaran Dasar 11 November 1912, luasnya persebaran wilayah Sarekat Islam diberbagai daerah, peningkatan jumlah anggota Sarekat Islam, dan keterlibatan anggota Sarekat Islam dalam kongres-kongres yang diselenggarakan oleh Sarekat Islam.

Dalam bidang sosial dan ekonomi, Sarekat Islam terlibat dalam Perserikatan-Perserikatan kerja yang memperjuangkan kesejahteraan rakyat dengan Islam sebagai dasarnya. Selain itu, Sarekat Islam juga mendirikan toko-toko koperasi yang bertujuan memenuhi kebutuhan anggota Sarekat Islam.

### **2) Sarekat Islam periode kedua tahun 1916-1921**

Periode kedua tahun 1916-1921, Perkembangan Sarekat Islam ditunjukkan dengan penyelenggaraan kongres-kongres yang bersifat nasional dan melibatkan anggota. Selain itu dikeluarkannya Anggaran Dasar Centraal Sarekat Islam tahun 1916, dan program-program kerja yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial.

Dalam periode ini, muncul pertentangan dengan pihak Sarekat Islam cabang Semarang yang akhirnya mendirikan Partai Komunis yang diwakili oleh Semaun. Hal ini mengakibatkan penurunan jumlah anggota Sarekat Islam karena

adanya perpecahan Sarekat Islam menjadi dua yaitu, Sarekat Islam “Putih” dan Sarekat Islam “Merah”. Selain itu, dalam bidang politik perkembangan Sarekat Islam terlihat dalam keterlibatan wakil-wakil Sarekat Islam dalam Dewan Rakyat (*Volksraad*), keterlibatan anggota-anggota Centraal Sarekat Islam dalam Dewan Rakyat juga mendapat tentangan dari Sarekat Islam Semarang yang menganggap Dewan Rakyat hanyalah tameng Belanda dari dunia luar pasca Perang Dunia I. Dalam bidang sosial dan ekonomi, perkembangan Sarekat Islam ditunjukkan dengan keterlibatan Sarekat Islam dalam Gerakan “Djawa Dwipa” yang menuntut adanya persamaan hak dan martabat dalam hukum dan pemerintahan.

### 3) Sarekat Islam periode ketiga tahun 1921-1927

Periode ketiga tahun 1921-1927, Perkembangan Sarekat Islam ditunjukkan dengan perubahan Anggaran Dasar yang lebih menekankan pada pencapaian kemerdekaan berdasarkan Islam. Dalam periode ini, Sarekat Islam mengalami penurunan dalam jumlah anggota dan persebaran Sarekat Islam di daerah. Selain itu, kemunduran Sarekat Islam disebabkan juga oleh ketidakmauan Sarekat Islam untuk bergabung dalam Dewan Rakyat (*Volksraad*).

Dalam bidang sosial dan ekonomi, perkembangan Sarekat Islam ditunjukkan dengan penyelenggaraan kongres *Al Islam* dan penyelenggaraan pendidikan yang bernuansa Islami. Dan pengajuan “mosi dari rakyat untuk rakyat” merupakan suatu langkah yang bijaksana dalam usaha mencapai kesejahteraan bagi semua rakyat.

#### 4) Sarekat Islam periode keempat tahun 1927-1934.

Periode keempat tahun 1927-1934, Perkembangan Sarekat Islam dalam bidang politik, ditunjukkan dengan dirumuskannya tiga prinsip Sarekat Islam. Tiga prinsip Sarekat Islam adalah asas agama Islam, asas kerakyatan dan asas sosial ekonomi. Selain itu, Sarekat Islam juga menetapkan pelaksanaan politik hijrah (menjauhkan diri dari urusan pemerintah). Pada tahun 1930 nama Sarekat Islam berubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia. Dalam Partai Sarekat Islam Indonesia, struktur organisasi mengalami perkembangan, yaitu dengan pembagian kekuasaan antara *Majelis Tahkim* dan *Lajnah Tanfidziyah*.

Dalam bidang sosial ekonomi, Sarekat Islam mengembangkan organisasi dengan memperjuangkan adanya kebebasan beragama. Selain itu, Sarekat Islam mengeluarkan “Tafsir Program Asas Partai Sarekat Islam Indonesia” sebagai pokok-pokok ketentuan dalam perjuangan mencapai kemerdekaan.<sup>25</sup>

#### 4. Partai Komunis Indonesia

##### a) Partai Politik.

Partai dapat diartikan pihak; golongan orang (perkumpulan) yang seasas, sehaluan, setujuan, dan sebagainya (dalam ketatanegaraan).<sup>26</sup>

Sedangkan partai politik secara umum diartikan sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan

---

<sup>25</sup> Lebih jelas lihat Deliar Noer, *op. cit.*, hlm. 115-160.

<sup>26</sup> W.J.S Poerwadarminta, *op. cit.*, hlm. 712.

politik dan merebut kedudukan politik yang dilakukan dengan cara konstitusional guna melaksanakan atau menerapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.<sup>27</sup>

Menurut Carl J. Friedrich: partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiiil maupun materiil.<sup>28</sup> Sehingga orientasi politiknya lebih mementingkan eksistensi partai yang menjadi wadah para aktivis-aktivis politik ketimbang memperhatikan kepentingan-kepentingan pihak lain.

Menurut R.H. Soltau partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang – dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih – bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.<sup>29</sup>

Partai politik dianggap sebagai alat yang sangat ampuh bagi umat manusia dalam mencapai tujuan-tujuan yang bersifat politik, partai politik dianggap sebagai senjata yang ampuh, tak heran dalam perkembangannya partai politik sering mengalami pasang surut pada kurun waktu dan tempat tertentu hal ini tergantung dari kebudayaan yang dianut oleh suatu masyarakat.<sup>30</sup> Lahirnya partai politik sering juga dikaitkan dengan paham kebebasan atau liberalisme, yang

---

<sup>27</sup> Miriam Budiardjo, 2001, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hlm 160-161.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 161.

<sup>29</sup> *Log. cit.*.

<sup>30</sup> M. Rusli Karim, 1983, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut*, CV. Rajawali; Jakarta, Hlm. 1-2.

menjamin setiap orang dalam mengekspresikan pemahamannya lewat berbagai bentuk organisasi politik.

Tradisi berpartai di Indonesia diajarkan oleh kaum penjajah sendiri. Benih partai ini dibawa oleh kaum penjajah dari bumi Eropa. Partai politik juga menjadi salah satu institusi yang paling besar sumbangannya dalam menumbuhkan kesadaran bagi bangsa Indonesia untuk melawan kaum penjajah, lewat partai politik ini kekuatan rakyat dihimpun oleh para kaum terpelajar dan menjadi ujung tombak dalam mengusir penjajah.<sup>31</sup>

Kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan sebuah bentuk partisipasi politik, menurut kamus besar bahasa Indonesia partisipasi politik diartikan sebagai hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan.<sup>32</sup> Menurut Miriam Budiardjo partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.<sup>33</sup>

Menurut Herbert McClosky partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>32</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-2*, Balai Pustaka; Jakarta, hlm. 732.

<sup>33</sup> Miriam Budiardjo, 1981, *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*, Gramedia; Jakarta, hlm. 1.

proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.<sup>34</sup>

Di negara-negara demokrasi pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik ialah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya dengan berpartisipasi dalam pemberian suara atau kegiatan lain terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan itu kebutuhan dan kepentingan mereka akan tersalur, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan-tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan-keputusan yang mengikat, serta untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan pada periode berikutnya.<sup>35</sup>

**b) Komunisme.**

**1) Pengertian Komunisme.**

Berbicara tentang komunisme tidak dapat dipisahkan dari apa yang menjadi pokok ajaran Karl Marx, ajaran Karl Marx ini disistematisir oleh para pengikutnya yang lebih menekankan pada 3 bidang yaitu: filsafat, ilmu sejarah dan perkembangan masyarakat, serta ilmu ekonomi.

Berkaitan dengan filsafat ajaran Karl Marx dikenal sebagai "*Wijsgeering Materialisme*" atau "Filosofi Materialisme" yaitu pandangan yang menomorsatukan "benda" di atas "jiwa" atau "*spirit*". Dengan kata lain keadaan yang nyata lebih diutamakan dari pada kesadaran manusia dan cita-cita manusia. Dengan filsafat inilah Marxisme tidak mengakui adanya Tuhan, hal ini tentunya

---

<sup>34</sup> *Log. cit.*.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm 2-3.

terlepas dari suasana lingkungan waktu itu di Eropa dimana Marx berpendapat bahwa agama telah digunakan untuk membius masyarakat agar menerima saja kehendak Tuhan. Marx juga mengatakan “Agama” dianggap sebagai candu bagi masyarakat.

Ilmu sejarah atau Historis Materialisme adalah suatu pandangan bahwa sejarah perkembangan masyarakat adalah sejarah perjuangan kelas, sampai pada suatu saat kelas proletarlah yang akan merebut dan menguasai negara, untuk sampai ke tahap ini harus dibentuk pemerintahan “Diktatur Proletariat” dan untuk mewujudkan pemerintahan ini ditempuh dengan jalan kekerasan. Kaum borjuis dan kaum modal harus dibersihkan dimana mereka juga tidak diberikan hak suara dalam negara. Demokrasi hanya untuk kaum proletar, sehingga disebut “Demokrasi Rakyat”. Pada saat inilah diharapkan akan terbentuk masyarakat tanpa kelas.

Mengenai ilmu ekonomi Marx mengatakan bahwa buruh juga merupakan komoditi biasa yang dapat diperjual-belikan di antara para pemilik modal. Bedanya, komoditi buruh dapat menghasilkan sesuatu yang mempunyai harga lebih dari dirinya sendiri. Teori ini dikenal sebagai “*Labour Value Theory*” atau “teori nilai lebih”. Hubungan pemilik modal dan buruh dapat bersifat eksploitasi dimana yang kaya akan semakin kaya namun sebaliknya yang miskin akan semakin menjadi miskin, untuk menghadapi permasalahan ini harus dilakukan

perjuangan kelas yang terus menerus, untuk membangun sistem sosialisme yang menjadi tahap awal dari sistem komunisme.<sup>36</sup>

Berdasarkan hukum dialektik, perkembangan suatu masyarakat telah melalui beberapa tahap yang akhirnya menjadi sebuah sistem masyarakat yang menganut paham kapitalis. Gerakan dialektik yang terjadi dalam masyarakat dimulai pada saat komune primitif berkembang dari suatu masyarakat yang tidak mengenal milik pribadi dan tidak mengenal kelas, menjadi masyarakat yang mulai mengenal milik pribadi serta pembagian kerja, dan karena itu juga mulai mengenal pembagian dalam kelas-kelas sosial.<sup>37</sup>

Gerakan dialektis yang terjadi dalam masyarakat dikarenakan adanya pertentangan antara dua kelas utama dalam masyarakat yaitu kelas budak (buruh) dan kelas pemilik budak (pemilik modal). Secara dialektis masyarakat budak berubah menjadi masyarakat feodal yang pada gilirannya akan terdorong oleh pertentangan antara kelas pemilik tanah dan kelas penggarap tanah, yang pada akhirnya dimenangkan oleh kaum pemilik tanah atau kaum borjuasi dan berubah menjadi masyarakat kapitalis. Menurut teori sebagai sebuah gerakan terakhir yang terjadi antara kaum kapitalis dan kaum proletar akan menghasilkan sebuah masyarakat komunis.<sup>38</sup>

Menurut Marx perkembangan yang terjadi dalam masyarakat ini tidak dapat terelakkan, karena sudah merupakan hukum sosial. Dalam usaha mencapai masyarakat komunis, kaum proletar akan memainkan peranan penting, dimana

---

<sup>36</sup> Lembaga Studi Ilmu -ilmu Kemasyarakatan (LSIK), 1983, *Rangkaian Peristiwa Pemberontakan Komunis di Indonesia, 1926-1948-1965*, Jakarta (tanpa penerbit), hlm. 2-4.

<sup>37</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, *op. cit.*, hlm. 81.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

mereka akan merebut kekuasaan dari tangan kapitalis, serta mengambil alih segala alat produksi dan melalui tahap transisi yang dinamakan *diktatur proletariat* akhirnya akan tercapailah masyarakat komunis. Mengenai diktatur proletariat Marx mengatakan:

“Antara masyarakat kapitalis dan masyarakat komunis terdapat suatu masa peralihan dalam mana terjadi transpormasi secara revolusioner dari masyarakat kapitalis menjadi masyarakat komunis. Ini sesuai dengan adanya masa peralihan politik dalam mana negara merupakan tak lain tak bukan diktatur revolusioner dari kaum proletar”<sup>39</sup>

Lenin yang mengadopsi pemikiran Marx sedikit banyak telah melakukan beberapa perubahan yang terkait dengan pemikiran atau gagasan Mark, menurut Lenin ada beberapa gagasan yang perlu ditegaskan terkait dengan masalah komunis, pertama melihat pentingnya peranan kaum tani dalam menyelenggarakan revolusi sedangkan menurut Marx hanya menekankan peranan kaum buruh, kedua melihat peranan suatu partai politik yang militan yang terdiri dari ‘*professional revolutionaries*’ untuk memimpin kaum proletar dan cara-cara merebut kekuasaan sedangkan terkait dengan masalah ini Marx berpendapat bahwa kaum proletar akan bangkit sendiri, ketiga Lenin melihat imperialisme sebagai gejala yang memperpanjang hidup kapitalisme sedangkan Marx berpendapat bahwa kapitalisme pada puncak perkembangannya akan menemui ajalnya dan diganti dengan komunisme.<sup>40</sup>

Komunisme tidak hanya merupakan sistem politik, tetapi juga mencerminkan suatu gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu, yaitu:

---

<sup>39</sup> *Log. cit.*

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 84.

- a) Gagasan monisme (sebagai lawan dari pluralisme). Gagasan ini menolak adanya golongan-golongan di dalam masyarakat sebab dianggap bahwa setiap golongan yang berlainan aliran pikirannya merupakan perpecahan. Akibat dari gagasan ini ialah bahwa persatuan mau dipaksakan dan oposisi ditindas.
- b) Kekerasan dipandang sebagai alat yang sah yang harus dipakai untuk mencapai komunisme. Paksaan ini dipakai dalam dua tahap: pertama terhadap musuh, kedua terhadap pengikutnya sendiri yang dianggap masih kurang insaf. Tetapi pada masa sekarang paksaan fisik sebagian besar telah diganti dengan indoktrinasi secara luas, yang terutama ditujukan kepada angkatan muda.
- c) Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme; karena itu semua alat kenegaraan seperti polisi, tentara, kejaksaan, dipakai untuk diabdikan kepada tercapainya komunisme (sering disebut sistem mobilisasi sebagai lawan dari sistem perdamaian). Ini mengakibatkan suatu campur tangan negara yang sangat luas dan mendalam di bidang politik, sosial dan budaya. Di bidang hukum hal ini berarti bahwa hukum tidak dipandang sebagai “a good in itself” tetapi dianggap sebagai alat revolusi untuk mencapai masyarakat komunis.<sup>41</sup>

Mekanisme yang digunakan untuk menyelenggarakan atau menjalankan asas-asas di atas diperlukan beberapa hal yaitu:

- a) Sistem satu partai; diktatur proletar sebenarnya merupakan diktatur Partai Komunis. Untuk mengarahkan semua tenaga dan semua potensi ke arah terbentuknya komunisme, Partai Komunis merupakan organisasi yang pokok. Walaupun dalam Undang-Undang Dasar pasal 126, Partai Komunis hanya disebut

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 88.

sebagai “pelopor dari kaum buruh dalam perjuangannya untuk membangun masyarakat komunis dan pimpinan inti dari organisasi-organisasi buruh baik yang bersifat umum maupun yang bersifat kenegaraan. Tetapi dalam prakteknya Partai Komunis tidak hanya memimpin masa yang tergabung di dalam tubuhnya, tetapi juga memimpin lembaga-lembaga kenegaraan seperti kabinet dan Soviet tertinggi, terutama presidiumnya, baik mengenai personalianya maupun dalam melaksanakan policynya. Sekalipun badan-badan perwakilan mempunyai banyak anggota yang secara formil tidak terikat pada partai, tetapi bimbingan dan pengendalian diselenggarakan melalui anggota-anggota Partai Komunis di dalam lembaga itu sendiri.

b) Soviet tertinggi secara formil memegang semua kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif, hal ini didukung paham Marxisme-Leninisme menolak adanya *trias politica*. Tetapi dalam kenyataan badan ini tidak dapat menyelenggarakan kekuasaan itu karena setiap tahun hanya bersidang beberapa hari. Keputusan diambil dengan “aklamasi” sehingga anggota Soviet tertinggi memberikan kesan hanya “yes-men” belaka. Wewenang membuat keputusan yang sebenarnya berada di tangan pemimpin Partai Komunis yang merangkap menjadi anggota kabinet dan presidium Soviet Tertinggi. Soviet Tertinggi merupakan forum untuk menyebarkan dan mempopulerkan kebijaksanaan pemerintah, dan memberikan kesan kepada rakyat bahwa ia berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan tujuannya bukan untuk mengontrol pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya.

c) Pemilihan umum dewasa ini bersifat rahasia tetapi tidak ada kemerdekaan politik dan pencalonan didasarkan atas sistem calon tunggal untuk setiap kursi, calon ditetapkan oleh Partai Komunis. Pemilihan umum tidak merupakan sarana untuk memilih pemimpin baru seperti di negara demokratis, tetapi merupakan alat propaganda untuk menunjukkan begitu besarnya dukungan yang diberikan oleh rakyat terhadap pemerintah.<sup>42</sup>

## 2) Kritik Terhadap Komunisme.

Kecaman terhadap komunis datang baik dari kalangan anti komunis maupun dari dunia komunis sendiri. Kritik yang datang dari dunia anti komunis ditujukan kepada unsur pemaksaan dan kekerasan, kepada pembatasan atas kebebasan-kebebasan politik, seperti menyatakan pendapat, dan kepada diabaikannya martabat perorangan untuk “kepentingan umum” yang pada hakekatnya dirumuskan oleh suatu elite yang kecil.<sup>43</sup>

Sedangkan dari komunis sendiri terjadi kritikan yang dilakukan oleh beberapa tokoh Uni Soviet diantaranya yaitu: Andrei Synyavsky seorang tokoh yang bergerak dalam bidang kesusastraan dan ilmiah, selain itu ada Yuli Daniel yang dihukum kerja paksa karena menerbitkan di luar negeri karangan-karangan yang dianggap anti Soviet.

Komunis sendiri melemparkan kritik yang tajam terhadap demokrasi Barat, baik berdasarkan ajaran Marx dan Lenin, maupun berdasarkan keadaan-keadaan yang terdapat di negeri Barat itu. Marx mengatakan negara adalah alat dalam tangan kelas yang berkuasa, jadi menurut komunisme masyarakat yang

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 88-89.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

kapitalis ialah negara demokratis yang dijadikan alat oleh kaum kapitalis itu sendiri. Di dalam majalah-majalah komunis seringkali terdapat tulisan yang mencoba menunjukkan bahwa pemerintahan di negara-negara demokrasi Barat hanyalah sebagai pelaksana dari perintah-perintah yang diberikan oleh tuan-tuan besar kapitalis.<sup>44</sup>

Partai Komunis Indonesia berdiri pada tahun 23 Mei 1920 dengan nama Partai Komunis Hindia kemudian berubah nama menjadi Partai Komunis di Indonesia dan berubah lagi menjadi Partai Komunis Indonesia. Yang menjadi ketua dari Partai Komunis Indonesia adalah Semaun. Di bawah pimpinan Semaun Partai Komunis Indonesia pada awal-awal berdirinya banyak melakukan berbagai aksi-aksi baik itu aksi-aksi pemogokan massal maupun aksi-aksi demonstrasi.

#### **F. Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang harus diuji kebenarannya. Hipotesis inilah yang akan dibuktikan dalam penelitian. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah :

1. Jika latar belakang sosial, ekonomi, politik dan pendidikan Semaun berasal dari kaum priyayi yang memegang kekuasaan maka ia akan mampu memperjuangkan kepentingan rakyat terutama orang kecil dan kaum buruh.
2. Jika Semaun terlibat dalam Sarekat Islam sampai Partai Komunis Indonesia, serta ikut dalam gerakan-gerakan sosial maka Semaun memperjuangkan kepentingan rakyat terutama kaum buruh dan rakyat kecil.

---

<sup>44</sup> J. Hulsebos, 1955, *Komunisme: Pengaduan, Djanji, atau Antjaman*, terjemahan S.K. Bonar, PT. Pembangunan; Djakarta, hlm. 99-100.

3. Jika Semaun berhasil dalam perjuangannya dari Sarekat Islam sampai Partai Komunis Indonesia yang dituangkan lewat berbagai ide dan gagasannya maka Semaun mampu menanamkan nilai-nilai positif bagi kehidupan rakyat Hindia Belanda.

### **G. Metodologi Penelitian**

Dalam rangka penulisan “Perjuangan Semaun dari Sarekat Islam Surabaya sampai Partai Komunis Indonesia tahun 1914-1923” penulis menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Melalui metode ini maka akan dihasilkan penulisan sejarah yang objektif, lengkap dan menarik minat pembaca. Metode ini merupakan sebuah metode yang sangat bermanfaat bagi seorang sejarawan untuk merekonstruksi masa lampau secara imajinatif berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh melalui historiografi (penulisan sejarah).

Adapun tahap-tahap yang digunakan dalam penelitian sejarah, yaitu:

#### **1. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian sejarah langkah awal dalam metodologinya adalah melakukan pengumpulan data atau heuristik. Heuristik adalah proses pengumpulan data yang relevan sesuai dengan keperluan subyek yang ditulis. Sumber data dalam penulisan ini diperoleh dari buku-buku yang ada di perpustakaan daerah Yogyakarta yang dikarang oleh Semaun berjudul *Penuntun Kaum Buruh* terbitan Jendela, Yogyakarta tahun 2000, dan buku-buku dari perpustakaan Kolese St. Ignatius Kota Baru, Yogyakarta, seperti yang ditulis oleh

Soewarsono berjudul *Berbareng Bergerak: Sepenggal Riwayat dan Pemikiran Semaun* terbitan LKiS, Yogyakarta tahun 2000, buku yang dikarang oleh Semaun berjudul *Hikajat Kadiroen* terbitan Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta tahun 2000, buku yang dikarang oleh Pramoedya Ananta Toer yang berjudul *Rumah Kaca*, buku yang ditulis oleh Bambang Sulistyono berjudul *Pemogokan Buruh: Sebuah Kajian Sejarah* terbitan Tiara Wacana Yogyakarta tahun 1995, selain itu penulis juga memperoleh buku di perpustakaan Sanata Dharma seperti buku yang ditulis oleh Sok Hok Gie berjudul *Di Bawah Lentera Merah: Riwayat Sarekat Islam Semarang 1917-1920* terbitan Frantz Fanon Foundation, Jakarta tahun 1990, dll. Penulis juga mencari sumber yang dapat mendukung penulisan skripsi ini dari internet yaitu *wikipedia* yang berkaitan biografi tokoh Semaun, perjuangan dan pengaruh yang diberikan Semaun dari periode 1914 sampai 1923.

## 2. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan sebuah metode yang perlu dilakukan oleh seorang penuli yang bertujuan memperoleh data yang dapat dipercaya dan disusun secara sistematis. Metode analisis data ini mencakup dua hal yaitu verifikasi dan interpretasi, yaitu:

### a. Verifikasi (Kritik Sumber)

Tahap selanjutnya yaitu verivikasi atau kritik sumber. verivikasi merupakan langkah yang harus dilakukan untuk menghindari adanya kepalsuan suatu sumber atau untuk mengetahui apakah data yang ada dapat dipertanggungjawabkan keasliannya atau tidak.<sup>45</sup> Hasil dari kritik sumber adalah

---

<sup>45</sup> Kuntowijoyo, *op. cit.*, hlm. 99.

fakta-fakta yang merupakan unsur untuk rekonstruksi sejarah. Kritik sumber ada dua macam yaitu kritik ekstern untuk mengetahui *otentisitas* atau keaslian sumber dan kritik intern untuk mengetahui *kredibilitas* atau kebiasaan sumber untuk dipercayai.

Kritik sumber atau verifikasi merupakan sebuah uji keabsahan sumber. Verifikasi ada dua macam, yaitu kritik *ekstern* dan kritik *intern*.<sup>46</sup>

### 1). Kritik *Ekstern*

Kritik *ekstern* digunakan untuk mengetahui *otentisitas* atau keaslian sumber. Kritik ini dilakukan dengan cara meneliti jenis bahan, gaya penulisan, bahasanya, ungkapannya, tintanya, kalimat yang digunakan, dan jenis huruf yang digunakan serta semua penampilan luar sumber untuk mengetahui *otentisitasnya*.

Dalam penelitian ini kritik ekstern tidak perlu dilakukan sebab *otentisitas* sumber yang digunakan tidak perlu diragukan karena sumber yang digunakan berupa buku pustaka asli yang merupakan hasil karya asli dari para pelaku sejarah atau saksi sejarah maupun bukan saksi atau pelaku sejarah. Kritik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kritik intern sebab *kredibilitas* sumber masih bisa diragukan.

### 2). Kritik *Intern*

Kritik *intern* digunakan untuk mengetahui *kredibilitas* atau kebiasaan sumber untuk dipercayai. Kritik ini dilakukan dengan cara membandingkan berbagai sumber yang ada, sehingga dapat diperoleh fakta yang merupakan unsur untuk rekonstruksi sebuah peristiwa. Dalam penulisan skripsi ini penulis

---

<sup>46</sup> *Log. cit.*

melakukan kritik sumber yaitu dengan membandingkan sumber-sumber yang ada. Di sini penulis melakukan kritik sumber yang berkaitan dengan sejarah berdirinya Sarekat Islam, yaitu dengan membandingkan antara buku *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, yang ditulis oleh Deliar Noer, terbitan LP3ES: Jakarta, dengan buku yang berjudul *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia* yang ditulis oleh A.K. Pringgodigdo, terbitan Dian Rakyat.

Untuk melihat kapan berdirinya Sarekat Islam penulis lebih memilih buku *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, yang ditulis oleh Deliar Noer karena buku ini mengatakan Sarekat Islam berdiri di Solo pada tanggal 11 November 1912, penetapan tanggal ini sebagai awal berdirinya Sarekat Islam karena didukung oleh wawancara penulis dengan Haji Samanhoedhi sendiri, wawancara penulis dengan Abdoel Moeis, wawancara penulis dengan Syaik Awad Sjahbal yaitu teman Haji Samanhoedhi yang sering mengikuti rapat Sarekat Islam. Selain itu untuk memperkuat data ini Deliar Noer juga menggunakan artikel-artikel yang ditulis oleh H.O.S. Tjokroaminoto, dalam *Neratja* tanggal 16 Maret 1921, *Fajar Asia* tanggal 28 Januari 1929, dan tulisan Sabirin yaitu seorang anggota pimpinan pusat Sarekat Islam dalam tahun 1930-an dengan buku yang berjudul *Tarich Al-marhum H.O.S. Tjokroaminoto-Pergerakan, Pahala dan Jasanya*, terbitan Sumber Ilmu, Bandung tahun 1935. Selain itu pendapat Deliar Noer ini diperkuat dengan brosur resmi yang dikeluarkan oleh PSII setelah Indonesia merdeka dengan judul *PSII dari Tahun ke Tahun*, terbitan Departemen Penerangan dan Propaganda PSII.

## **b. Interpretasi**

Inteprestasi adalah langkah yang dilakukan penulis dalam menfsirkan fakta-fakta yang telah diuji dan menganalisis sumber untuk menghasilkan suatu rangkaian peristiwa yang teruji kebenarannya dan sebuah rangkaian peristiwa sejarah yang bermakna. Tujuan dari interpretasi adalah untuk mengurangi unsur subyektivitas yang ada dalam penulisan sejarah.

## **3. Pendekatan**

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan oleh penulis untuk mengaji permasalahan yang berkaitan dengan Perjuangan Semaun dari Sarekat Islam Surabaya sampai Partai Komunis Indonesia tahun 1914-1923 adalah pendekatan multidimensional, yaitu sebuah pendekatan yang dalam memaparkan dan menganalisa berbagai peristiwa menggunakan konsep-konsep dari berbagai ilmu sosial yang relevan dengan pokok-pokok kajiannya<sup>47</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan politik, sosial dan ekonomi. Pendekatan politik digunakan untuk melihat perjuangan Semaun dari Sarekat Islam Surabaya sampai Partai Komunis Indonesia tahun 1914-1923 karena Sarekat Islam mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam memperkuat pondasi Islam di Indonesia pada awal abad ke-20 dan munculnya Partai Komunis Indonesia sebagai sebuah reaksi dalam menentang politik pemerintah kolonial Belanda yang dianggap menindas rakyat Hindia Belanda terlebih para kaum buruh, tetapi karena gerakannya bersifat revolusioner

---

<sup>47</sup> Sartono Kartodirdjo, 1993, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 122.

maka Partai Komunis Indonesia dituduh sebagai gerakan yang mengganggu stabilitas negara dan mengancam perkembangan Islam di Indonesia.

Pendekatan sosial digunakan untuk melihat bagaimana tumbuhnya benih kesadaran rakyat terhadap penjajahan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda di bawah kepemimpinan Semaun sebagai pimpinan Sarekat Islam cabang Semarang yang pada akhirnya berbeda paham dengan CSI. Pendekatan sosial ini digunakan juga untuk melihat kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Semaun dalam mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan merajalelanya kaum-kaum pemilik modal yang tidak lagi memperhatikan kaum buruh sebagai tenaga kerja. Disamping itu yang menggugah para anggota Sarekat Islam Semarang di bawah pimpinan Semaun melihat semakin lebarnya kesenjangan yang terjadi diantara kaum buruh dan kaum pemilik modal (kaum kapitalis) yang tentunya kelas teratas diduduki oleh kaum pemilik modal dan kaum teratas ini dengan semena-mena dalam memperlakukan kaum buruh yang dianggap hanya sebagai budak, dan salah satu keinginan dari Sarekat Islam Semarang adalah menciptakan masyarakat yang tanpa kelas sosial yaitu dengan mendirikan Partai Komunis Indonesia yang menganut slogan “sama rata sama rasa”.

Pendekatan ekonomi digunakan untuk melihat pergerakan Sarekat Islam dalam bidang ekonomi, dalam membantu para anggota Sarekat Islam untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan memajukan kepentingan rakyat pribumi dalam bidang pertanian, perdagangan dan kerajinan. Meskipun dalam perkembangannya organisasi Sarekat Islam kemudian bercorak politik tetapi masih dapat dirasakan

unsur ekonomi yang menjadi unsur penting dalam menyatukan para anggota. Karena CSI dalam ideologi perjuangannya tidak sesuai dengan keadaan yang dialami oleh masyarakat bumiputera maka Semaun memilih jalur sendiri dengan mengubah gerakan Sarekat Islam cabang Semarang ke arah lebih radikal dan akhirnya membentuk Partai Komunis Indonesia yang dijadikan wadah untuk memperjuangkan kaum buruh bumiputera.

#### **4. Penulisan (Historiografi)**

Penulisan (Historiografi) merupakan tahap terakhir dari penelitian sejarah. Historiografi adalah penulisan dari rekonstruksi masa lampau berdasarkan data yang diperoleh lewat berbagai proses. Dalam penulisan sejarah aspek kronologis suatu peristiwa sangat penting, sehingga dengan mudah memberi suatu pengertian dasar kapan peristiwa itu terjadi. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyajikan gaya penulisan deskriptif analitis. Penulisan sejarah deskriptif analitis adalah gaya penulisan sejarah di mana dalam pemecahan masalahnya dengan menggambarkan keadaan obyek pemikiran pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya dan bertujuan untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Penulis menggunakan penulisan sejarah deskriptif analitis dikarenakan dalam mengkaji Perjuangan Semaun dari Sarekat Islam Surabaya sampai Partai Komunis Indonesia tahun 1914-1923 perlulah dilihat Bagaimana Latar Belakang Sosial, Ekonomi, Politik dan Pendidikan Semaun, apa yang Diperjuangkan Semaun dari Sarekat Islam Surabaya sampai Partai Komunis Indonesia tahun 1914-1923 Bidang Politik, Sosial dan Ekonomi, apa Pengaruh Semaun dari Sarekat Islam Surabaya sampai

Partai Komunis Indonesia tahun 1914-1923, yang dari sana kemudian disusun secara berdasarkan fakta-fakta yang ada.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini bertujuan untuk merekonstruksi Perjuangan Semaun Dari Sarekat Islam Surabaya Sampai Partai Komunis Indonesia tahun 1914-1923. gambaran secara umum tentang topik yang dipilih dan gambaran tersebut dibagi dalam lima bab.

Bab I Pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, landasan teori, hipotesis, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II Mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang kehidupan Semaun, dengan sub bab:

- A. Latar belakang bidang sosial.
- B. Latar belakang bidang ekonomi.
- C. Latar belakang bidang politik.
- D. Latar belakang bidang pendidikan.

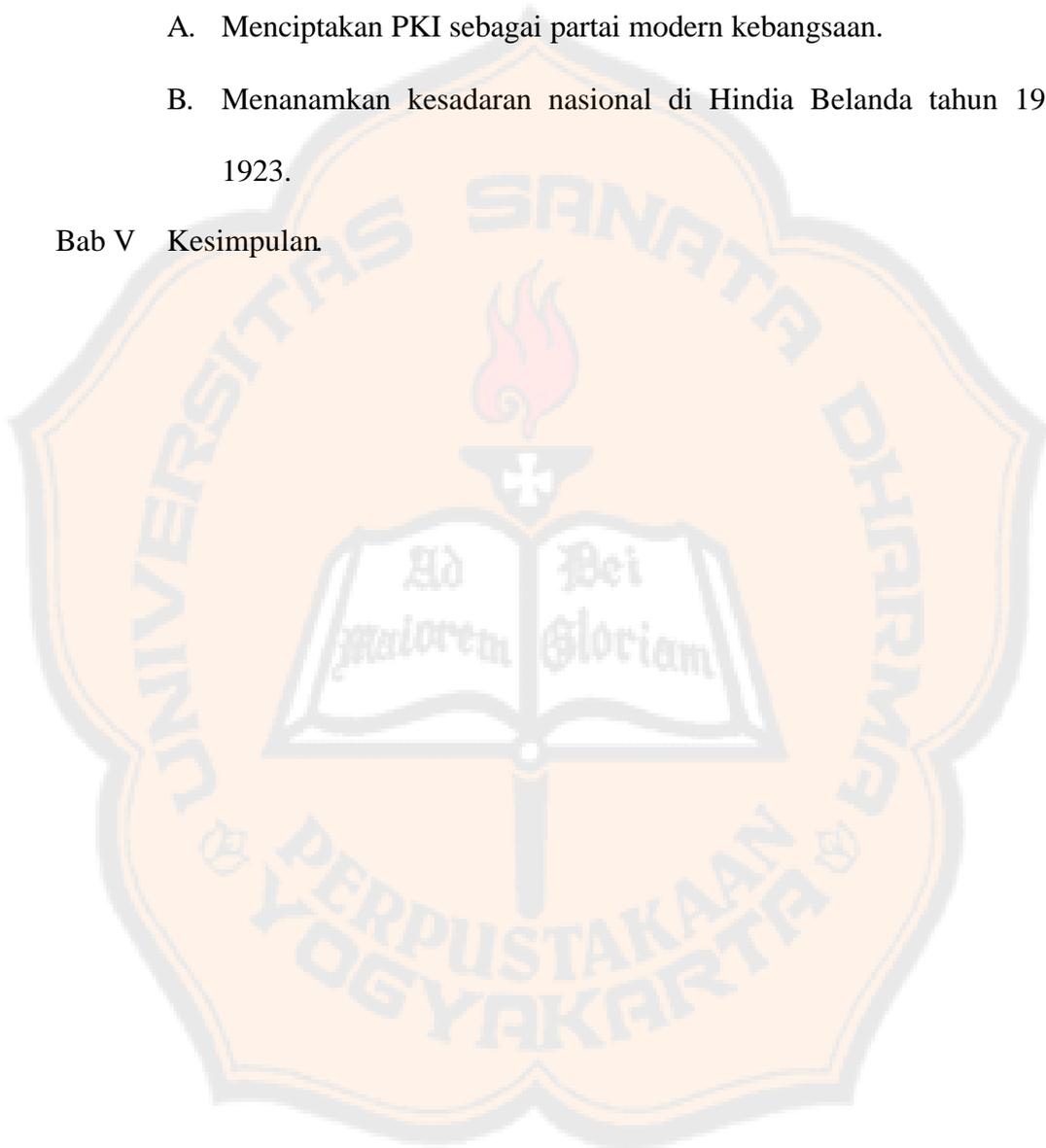
Bab III Mendiskripsikan dan menganalisis perjuangan Semaun dari Sarekat Islam Surabaya sampai Partai Komunis Indonesia tahun 1914-1923, dengan sub bab:

- A. Bidang Politik.
- B. Bidang Sosial.
- C. Bidang Ekonomi.

Bab IV Mendiskripsikan dan menganalisis pengaruh Semaun dalam Sarekat Islam sampai Partai Komunis Indonesia tahun 1914-1923, dengan sub bab:

- A. Menciptakan PKI sebagai partai modern kebangsaan.
- B. Menanamkan kesadaran nasional di Hindia Belanda tahun 1914-1923.

Bab V Kesimpulan.



## BAB II

### LATAR BELAKANG SOSIAL, EKONOMI, POLITIK DAN PENDIDIKAN SEMAUN

#### A. Latar Belakang Bidang Sosial

Sejak awal abad ke-16 di Jawa telah tumbuh tiga akar kekuatan yang menjadi pengukir sejarah Indonesia pada abad 19-20an. Kelompok pertama adalah kaum priyayi (aristokrasi) dan merupakan kelompok yang memegang kekuasaan, sebagai kaum bangsawan pekerjaan mereka berpusat pada kantor-kantor dan berakar pada kebudayaan Jawa-Hindu. Seiring dengan tumbuh dan berkembang pesatnya agama Islam maka muncullah golongan kedua yang dipegang oleh kaum santri, kelompok kedua ini berakar pada masyarakat di sekitar pesantren, dan sebagai Islam mereka merupakan unsur yang “ortodoks”. Sedangkan kelompok ketiga diduduki oleh masyarakat pedesaan Jawa yang mendukung nilai-nilai kebudayaan zaman pra Hindu yang lebih dikenal dengan kaum abangan.<sup>48</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya sering terjadi pertentangan antara kaum santri yang merupakan sumber kekuatan, yang digunakan untuk melawan kaum priyayi yang bersekutu dengan Belanda yang dianggap sebagai kaum kafir di kalangan masyarakat Islam yang ortodoks, keinginan masyarakat Islam untuk mengusir Belanda dari kawasan Hindia Belanda dapat dilihat dari beberapa perlawanan seperti perang Diponegoro, yang sangat menentang campur tangan

---

<sup>48</sup> Soe Hok Gie, *op. cit.*, hlm. 47.

pihak Belanda dalam keraton Yogyakarta serta peliknya permasalahan sosial ekonomi yang menimpa rakyat di daerah Yogyakarta dan sekitarnya.<sup>49</sup>

Setelah kedatangan Belanda ke kawasan Indonesia memberikan perubahan sosial yang cukup mencolok, dan menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Perubahan sosial terjadi karena nilai-nilai tradisional yang telah mengakar di bumi Hindia Belanda, tiba-tiba dikonfrontasikan dengan nilai-nilai modern, sehingga mulai muncul kelas-kelas sosial dalam masyarakat dan melahirkan kesenjangan sosial antara orang-orang Eropa dengan penduduk bumiputera yang semakin lama semakin meningkat. Keadaan semacam ini menyebabkan timbulnya gerakan-gerakan protes dan pembontakan, sebagai akibat dari rasa ketidakpuasan kaum pergerakan terhadap apa yang terjadi pada masyarakat desa di Hindia Belanda.

Penggunaan bahasa juga sangat ditentukan berdasarkan status sosial yang dimiliki, bahasa tertinggi di Hindia Belanda adalah bahasa Belanda. Disusul oleh bahasa Melayu, dan terakhir bahasa Jawa. Semua informasi penting yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah Hindia Belanda ditulis dalam bahasa Belanda, dan yang menggunakan bahasa pribumi (Jawa) sangat kecil proporsinya. Bahkan laporan pajak dan informasi soal pergerakan kaum bumiputera yang disampaikan residen kepada pejabat di atasnya juga ditulis dalam bahasa Belanda.<sup>50</sup>

Dominannya pengaruh Belanda berakibat juga pada kedudukan kepala-kepala daerah dalam negara tradisional, kedudukan kepala-kepala daerah berangsur-angsur berkurang dan berada di bawah pengawasan pejabat-pejabat

---

<sup>49</sup> Peter Carey, 2004, *Asal Usul Perang Jawa, Pemberontakan Sepoy dan Lukisan Raden Saleh*, LKiS, Yogyakarta, hlm. 45

<sup>50</sup> Zainul Munasichin, *op. cit.*, hlm. 44.

Belanda, sehingga sektor-sektor yang berkaitan dengan produksi pertanian, tanah maupun tenaga kerja diatur menurut sistem kolonial.<sup>51</sup> Diskriminasi yang dilakukan orang Belanda terhadap masyarakat bumiputera sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari, dan terlihat perbedaan serta pemisahan seperti di kereta api, di gedung bioskop, atau di gedung pertemuan bahkan dalam lingkungan pemukiman.

Semaun dilahirkan di Tjurah Malang, Mojokerto, sebuah kota kecil yang terletak di sebelah barat Surabaya Jawa Timur pada tahun 1899.<sup>52</sup> Semaun bukan berasal dari kaum priyayi yang memiliki status sosial yang patut diperhitungkan dalam sistem kemasyarakatan di Hindia Belanda pada waktu itu. Semaun adalah putra dari Prawiroatmodjo, seorang buruh di jawatan kereta api di Surabaya.<sup>53</sup> Kehidupan kaum buruh kereta api seringkali mendapat perlakuan yang semena-mena dari pihak Belanda. Status sosial yang dimiliki Semaun berbeda dari kebanyakan tokoh pergerakan bumiputera abad ke-20an yang berasal dari kaum priyayi, sehingga seluk beluk keluarganya tidak banyak diketahui oleh banyak orang. Melihat keadaan keluarga dan kesenjangan sosial yang terjadi dalam sistem kemasyarakatan Indonesia, maka menggugah Semaun dan para tokoh-tokoh pergerakan bumiputera untuk tampil dalam kancah perpolitikan yang tujuannya adalah ingin memperjuangkan kehidupan masyarakat bumiputera yang semakin hari semakin tertindas akibat kapitalisme Belanda.

---

<sup>51</sup> Marwati Djoened P dan Nugroho Notosusanto, 1984, *Sejarah Nasional Indonesia IV*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 148.

<sup>52</sup> Soe Hok Gie, *op. cit.*, hlm. 52. Lihat juga Soewarsono, 2000, *Berbareng Bergerak Sepenggal Riwayat dan Pemikiran Semaon*, LKiS, Yogyakarta.

<sup>53</sup> Sejauh ini penulis belum menjumpai tulisan-tulisan atau buku-buku yang memberikan keterangan mengenai istri dari Prawiroatmodjo, sehingga dalam skripsi ini tidak dibahas.

## B. Latar Belakang Bidang Ekonomi.

Keadaan sosial ekonomi Indonesia pada masa kolonial lebih banyak dikuasai oleh satu pihak saja dalam hal ini pihak penyewa perkebunan yang kebanyakan terdiri dari orang Eropa. Kehidupan ekonomi lebih banyak memberikan keuntungan bagi satu kelas kecil yaitu bangsa Belanda, sedangkan bangsa Indonesia yang merupakan kelompok mayoritas dari sistem masyarakat Hindia Belanda, hidupnya sangat menderita karena masih hidup dalam kemiskinan.<sup>54</sup>

Sebelum diberlakukannya politik etis, kehidupan rakyat Indonesia secara umum mengalami kemerosotan dalam berbagai bidang. Hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang melakukan eksploitasi sumber daya alam yang berupa rempah-rempah dalam hal ini kopi, teh, kina dan juga sumber daya manusia yang dijadikan alat untuk mengambil sumber daya alam. Sumber daya alam yang eksploitasi digunakan oleh Belanda untuk membayar hutang-hutang negeri Belanda pasca perang Diponegoro, yang berlangsung dari tahun 1825-1830 dan juga perang Padri yang berlangsung dari tahun 1821-1827.

Revolusi agraria yang dijalankan di Hindia Belanda lebih menitikberatkan pada sektor perkebunan, di samping itu revolusi agraria juga memberikan perubahan bagi para petani bumiputera yang diperkenalkan dengan sistem sewa menyewa tanah yang dinilai atau diukur berdasarkan uang. Sebelumnya sistem

---

<sup>54</sup>Bambang Sulistyono, 1995, *Pemogokan Buruh Sebuah Kajian Sejarah*, Tiara Wacana, Yogyakarta, hlm. 9.

yang dianut oleh para petani yang berkaitan dengan sewa menyewa tanah adalah sistem bagi hasil.<sup>55</sup>

Paham liberal memisahkan dengan tegas antara bidang ekonomi dengan bidang politik. Adanya campur tangan politis atas ekonomi tidak dapat dibenarkan. Bidang ekonomi merupakan sebuah bidang yang menjadi wewenang perseorangan atau tugas dari individu, sedangkan politik merupakan wewenang pemerintah. Kaum liberal mengkritik atas kebijakan pemerintah dalam melakukan eksploitasi ekonomi menggunakan cara sistem tanam paksa yang berlaku sejak 1830. Sistem tanam paksa yang diberlakukan oleh pemerintah bukan menjadikan individu sebagai pelaksana ekonomi secara bebas melainkan sebagai pelaksana apa yang ditentukan oleh pihak pemerintah.<sup>56</sup>

Seiring dengan diberlakukan politik liberal maka pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melindungi perekonomian rakyat dengan mengeluarkan undang-undang agraria. Tujuan dari undang-undang ini yaitu melarang bangsa asing untuk membeli tanah milik penduduk, penduduk juga diberikan sertifikat sebagai bukti jaminan perlindungan hukum atas hak kepemilikan tanah yang telah digarapnya. Undang-undang agraria secara prinsip sangat mempertahankan pola tradisi lama yaitu: masyarakat komunal dengan tingkat perekonomian subsistensi. Dalam masyarakat komunal kekuasaan kepala desa sangat besar atas warga desanya, sehingga kekuasaan kepala desa ini sering dimanfaatkan para pemilik perkebunan, dari menegoisasi tanah sewaan, pengumpulan tenaga kerja, pengawasan para pekerja sampai pada keamanan

---

<sup>55</sup> Zainul Munasichin, *op. cit.*, hlm. 2

<sup>56</sup> Bambang Sulisty, *op. cit.*, hlm. 12.

perkebunan dan pembangunan saluran irigasi, jembatan dan jalan-jalan, dapat dilaksanakan dengan melakukan kerja wajib oleh penduduk desa berdasarkan perintah dari kepala desa.

Revolusi agraria juga dimanfaatkan oleh sebagian besar elit politik Belanda yang ada di Hindia Belanda dan bekerja sama dengan para pemilik modal atau pemilik perkebunan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari sumber daya alam di kawasan Hindia Belanda. Untuk mensukseskan revolusi agraria ini pemerintah Hindia Belanda mengerahkan para bupati dan lurah untuk mengorganisasi para petani lokal agar bersedia menyewakan tanahnya secara kolektif kepada pengusaha perkebunan asing.<sup>57</sup> Kebijakan yang dilakukan pemerintah Belanda ini ternyata memberikan perubahan yang signifikan bagi para petani bumiputera, dimana pekerjaan mereka berubah dari petani yang mengolah lahan pertanian sendiri beralih menjadi buruh pabrik-pabrik gula. Dengan menjadi buruh-buruh pabrik ternyata berbeda jauh dari apa yang mereka harapkan, sebelumnya para petani berharap dengan bekerja di pabrik dapat memberikan perubahan yang lebih baik, tetapi apa yang diharapkan tidak menjadi kenyataan dan sebaliknya dalam masyarakat mulai lahir kelas-kelas sosial yang sangat mencolok yaitu antara pemilik modal dan kaum buruh.

Sistem sewa menyewa tanah juga mulai memperkenalkan masyarakat bumiputera dengan uang dalam jumlah yang cukup besar jika dibandingkan dengan pendapatan yang mereka peroleh selama ini. Di samping itu jika selama

---

<sup>57</sup> Zainul Munasichin, *op. cit.*, hlm. 2.

masa penggarapan sawah hasil kerja yang diperoleh berupa hasil produksi sawah, namun sekarang hasil kerja mereka dinilai dalam bentuk lain yaitu berupa uang.

Sistem sewa menyewa tanah lama-kelamaan melahirkan sebuah bentuk kapitalisme yang lebih dikenal dengan kapitalisasi perkebunan. Tanah milik petani yang telah disewakan kepada pihak pemilik modal sudah sepenuhnya di bawah tangan para pemilik modal, semetara itu hasil sewa tanah dan upah kerja semakin lama tidak lagi dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Para petani juga mulai menyadari jumlah yang dibayar oleh para pemilik pabrik lebih kecil dari pada yang dapat diperoleh petani jika ia menanam padi atau tanaman pangan lainnya pada waktu yang sama.<sup>58</sup>

Para petani, selain dibebani tugas untuk mengolah tanah guna menanam tanaman ekspor, juga diharuskan menyumbangkan tenaganya untuk kerja secara paksa pada penguasa kolonial. Daerah-daerah produksi juga banyak dikuasai oleh Belanda sehingga semakin menyulitkan kaum bumiputera untuk memperoleh kesempatan dalam mengolah tanah pertanian yang merupakan sumber penghasilan bagi para petani bumiputera.<sup>59</sup>

Setelah tanah-tanah atau sawah milik desa dan penduduk bumiputera disewa kaum kapitalis asing maka selanjutnya dijadikan perkebunan-perkebunan. Untuk menggarap dan mengolah perkebunan tersebut ialah menggunakan tenaga kaum bumiputera yang diupah dengan sangat tidak seimbang dengan apa yang mereka kerjakan, selain itu para pekerja tidak jarang sering mendapat pemaksaan

---

<sup>58</sup> Takashi Shiraishi, *op. cit.*, hlm. 21

<sup>59</sup> Marwati Djoened P dan Nugroho Notokusanto, *op. cit.*, hlm. 52.

dan pemerasan dari kaum pemilik perkebunan, hal ini terus terjadi sampai tahun 1900-an.<sup>60</sup>

Secara umum perlakuan yang tidak adil terhadap para pekerja bumiputera masih sering terjadi, demikian pula di daerah sekitar tempat tinggal Semaun. Semaun melihat sendiri betapa menderitanya kaum bumiputera yang bekerja sebagai buruh perkebunan milik para kaum kapitalis yang diperlakukan secara tidak adil. Di daerah Surabaya dan sekitarnya masih banyak terdapat tanah milik swasta asing, para tuan tanah memiliki kekuasaan seperti seorang raja kecil, yang dapat mengangkat dan memberhentikan lurah-lurah di daerah serta melakukan kerja rodi dengan memaksa penduduk sebagai tenaga kerja.

Tanah-tanah penduduk yang sebelumnya berupa sawah berubah menjadi perkebunan-perkebunan, terutama perkebunan tebu. Keadaan semacam ini memicu kenaikan harga beras sebagai akibat kurangnya daerah pertanian yang menghasilkan beras bagi kebutuhan pangan, maka menambah sengsaranya kehidupan masyarakat kecil yang kebanyakan bekerja sebagai buruh perkebunan dengan gaji yang sangat kecil jika dibanding dengan kebutuhan yang harus mereka penuhi.<sup>61</sup>

Semaun berasal dari keluarga yang orang tuanya bekerja sebagai buruh dan kehidupannya pas-pasan secara ekonomi, namun Semaun memperoleh keberuntungan karena dapat mengenyam pendidikan seperti tokoh-tokoh pergerakan yang kebanyakan berasal dari keturunan priyayi. Pendidikan yang

---

<sup>60</sup> Bambang Sulistyono, *op. cit.*, hlm. 25.

<sup>61</sup> M. C. Ricklefs, 2005, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Serambi, Jakarta, hlm. 265.

dilaksanakan pemerintah Kolonial Belanda dari segi biaya sangat mahal untuk keluarga yang bekerja sebagai buruh seperti Semaun.

### C. Latar Belakang Bidang Politik

Kebijakan politik kolonial Belanda selalu berorientasi pada tujuan ekonomi, kebijakan ini sangat terlihat sejak VOC masih memegang kuasa di kawasan Hindia Belanda, dengan memperlak para bupati dan raja-raja sebagai alat dalam memperlancar usaha dagangnya. Kebijakan dari VOC ini digantikan oleh kebijakan pemerintah kolonial Inggris yang dipelopori oleh Raffles yang sering disebut dengan sistem sewa tanah, tetapi orientasi dari kebijakan pemerintah kolonial Inggris tidak terlepas dari tujuan ekonomi yaitu mendapatkan keuntungan dari Hindia Belanda. Kekuasaan Inggris di Hindia Belanda hanya berlangsung selama 5 tahun, tetapi dalam kurun waktu yang singkat tersebut, Raffles telah meletakkan dasar-dasar kebijaksanaan ekonomi yang sangat mempengaruhi sifat dan arah kebijaksanaan pemerintah kolonial Belanda yang mengambil alih kembali kekuasaan dari tangan pemerintah kolonial Inggris pada tahun 1816.<sup>62</sup>

Selain menyelenggarakan suatu sistem pemerintahan modern, sistem sewa tanah juga menekankan pelaksanaan pemungutan sewa yang selama zaman VOC dilakukan dengan menggunakan sistem “pajak”, sistem pajak yang dijalankan yaitu dengan mengharuskan masyarakat bumiputera membayar dengan beras. Pajak ini dikenakan secara kolektif untuk seluruh desa yang berada di bawah pengawasan

---

<sup>62</sup> Marwati Djoened P dan Nugroho Notokusanto, *op. cit.*, hlm. 89.

para kepala desa, kepala desa ini diberi kebebasan dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Sedangkan pada jaman sewa tanah, pajak tidak lagi dikenakan kepada desa secara keseluruhan melainkan dikenakan kepada perseorangan dengan jumlah berbeda yang disesuaikan dengan jumlah penghasilan. Sistem sewa tanah juga menekankan pada pengenalan tanaman-tanaman perdagangan ekspor, namun dalam perkembangan selanjutnya sistem ini mengalami kegagalan, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pengalaman para petani dalam memasarkan tanaman ekspor kepada pihak Eropa.<sup>63</sup>

Sistem sewa tanah hanya berlangsung sampai tahun 1830-an, dan untuk menggantikan sistem sewa tanah ini, pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa merupakan sebuah sistem yang mengharuskan masyarakat Jawa membayar pajak dalam bentuk barang, yaitu hasil dari pertanian mereka, dan bukan berupa uang seperti yang mereka lakukan pada masa sistem sewa tanah.<sup>64</sup> Sistem sewa tanah juga tidak berlangsung lama, sistem sewa tanah kemudian digantikan oleh sistem liberal atau yang lebih dikenal dengan liberalisasi perkebunan yang mulai berjalan pada tahun 1860-an.

Sejak pertengahan abad ke-19 pengawasan dan penguasaan atas pulau Jawa berada di tangan parlemen Belanda. Sedangkan pengawasan secara praktis atas masalah-masalah kolonial berada di tangan Menteri Urusan Jajahan yang juga menjadi anggota kabinet, Menteri Urusan Jajahan bertanggung jawab kepada parlemen Belanda (Dewan Perwakilan Rakyat Belanda). Menteri Jajahan

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 94.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

bertanggung jawab untuk menjalankan politik umum kolonial dari pemerintah sesuai dengan tuntutan-tuntutan kolonial dari partainya dan partai-partai lain yang termasuk dalam kabinet. Dalam menjalankan tugas Menteri Jajahan mempunyai kantor urusan jajahan di Den Haag, dalam kantor ini banyak terdapat orang-orang yang sudah berpengalaman dengan jajahan.<sup>65</sup>

Sejak tahun 1860 pihak Belanda telah melakukan politik liberal atau liberalisasi perkebunan, sistem ini membuka selebar-lebarnya kesempatan kepada perusahaan-perusahaan swasta asing untuk menanamkan modalnya di pulau Jawa. Pada tahun 1870 politik liberal mulai berjalan dengan baik, tetapi kebijakan ini memberikan dampak yang cukup besar bagi pemasukan kas pemerintah Belanda, dimana kekayaan pulau Jawa tidak lagi mengalir kekas pemerintah, tetapi sebaliknya menguntungkan kelas menengah Belanda yang dewasa itu ikut menguasai arus politik di negeri Belanda.<sup>66</sup>

Kebijakan politik liberal memberikan dampak bagi pertumbuhan penduduk dan perkembangan sektor ekonomi yang banyak dipegang oleh orang-orang Eropa yang datang ke Hindia Belanda, mereka kebanyakan berasal dari golongan menengah yang telah mengenyam pendidikan dan membawa serta kebudayaan Barat. Orang-orang Eropa mulai membentuk suatu dunia Barat di daerah perkotaan serta mulai mencetuskan ide-ide tentang urusan-urusan dalam kelompok mereka di Jawa dan mengkritik kebijaksanaan kolonial di negara induk.

---

<sup>65</sup> Robert Van Niel, *op. cit.*, hlm. 15.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

Masyarakat Eropa yang baru ini berkeinginan untuk mengurus segala persoalan sendiri tanpa adanya pengawasan dari negara induk.<sup>67</sup>

Semaun hidup dalam sistem politik liberal pemerintah kolonial Belanda yang memberikan kebebasan kepada pihak swasta untuk menyewa tanah yang nantinya digunakan untuk lahan perkebunan. Dalam perkembangan selanjutnya kebijakan pemerintah kolonial Belanda dalam menerapkan politik liberalisasi perkebunan ini lebih banyak mengorbankan kesejahteraan penduduk bumiputera, yang sebelumnya lebih banyak bekerja dalam bidang pertanian. Semaun memulai karier politiknya ketika ia memutuskan untuk bergabung dengan Sarekat Islam Surabaya, dan dari sini Semaun mulai belajar dan bergaul dengan orang-orang yang mengerti sedikit banyak mengenai politik.

#### **D. Latar Belakang Bidang Pendidikan**

Pada awal abad XX telah terjadi perkembangan baru dalam kebijakan politik kolonial Belanda di kawasan Hindia Belanda. Zaman baru ini selanjutnya dikenal dengan politik etis, ada tiga prinsip yang merupakan dasar dari kebijakan politik etis ini, yaitu pendidikan, perpindahan penduduk dan irigasi. Ketiga prinsip ini diharapkan mampu untuk mengangkat kesejahteraan penduduk bumiputera yang selama ini hidup dalam keterpurukan disegala sendi-sendi kehidupan. Tujuan politik etis ini juga bersifat rangkap, yaitu meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi dan berangsur-angsur menumbuhkan otonomi serta desentralisasi politik di Hindia Belanda. Pemerintah menyadari kedua tujuan ini

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

tak terpisahkan, dan bahwa tujuan yang pertama hanya bisa diwujudkan apabila pemerintah kolonial benar-benar mampu bertanggung jawab terhadap penduduk bumiputera.<sup>68</sup>

Dengan diberlakukannya politik etis, ternyata mulai memberikan perubahan bagi masyarakat Hindia Belanda yang menempati kelas teratas dari status sosial masyarakat Indonesia seperti keturunan keraton dan kaum priyayi. Politik etis memberikan kesempatan kepada kaum priyayi untuk mengenyam pendidikan. Sistem pendidikan yang dilaksanakan, terbagi atas pendidikan khusus untuk kaum pribumi dan pendidikan khusus untuk mereka yang masih memiliki status sebagai bangsa Eropa. Sementara itu masyarakat Hindia Belanda yang bukan golongan kraton atau keturunan priyayi, kehidupannya tidak mengalami perubahan yang sangat berarti, hal ini terlihat masih banyaknya masyarakat pedesaan yang hidup dalam kemiskinan dan buta huruf. Hal ini menunjukkan kegagalan dari politik etis untuk menerobos masuk ke kalangan masyarakat kecil Hindia Belanda.

Perluasan pendidikan model Barat adalah tanda resmi dari Politik Etis, yang salah satu dari programnya yaitu melaksanakan pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah. Pendidikan yang diselenggarakan tidak hanya memproduksi jenis tenaga kerja yang diperlukan oleh negara dan kegiatan bisnis swasta, tetapi juga menuntut ke arah modernitas serta persatuan Timur dan Barat

---

<sup>68</sup> Akira Nagazumi, 1989, *The Dawn of Indonesian Nationalism: The Early Years of The Budi Utomo 1908-1918*. terj Grafiti dan KITLV, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia Budi Utomo 1908-1918*, Grafiti, Jakarta, hlm. 28.

yang dengan kata lain tujuannya adalah mem-Belandakan kawasan Hindia Belanda.<sup>69</sup>

Diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terlihat pada pelaksanaan pendidikan yaitu pendirian sekolah, khususnya sekolah dasar, dimana untuk pribumi pada tingkat rakyat biasa terdapat “sekolah kelas dua” yang lama pendidikannya 2 sampai 5 tahun dengan pengantar bahasa daerah. Bagi anak-anak pribumi dari para pemuka rakyat, pegawai atau orang kaya terdapat “sekolah kelas satu” yang lama pendidikan 7 tahun, dengan pengantar bahasa Belanda sekolah ini lebih dikenal dengan HIS yang didirikan pada tahun 1914. sedangkan bagi anak-anak Belanda terdapat “sekolah rendah Eropa” dengan nama ELS (*Europeeche Lagere School*). Dalam perkembangan selanjutnya untuk memenuhi keperluan tenaga pengajar maka didirikan sekolah lanjutan bernama MULO (SM) dan AMS (SMA/SMU) yang lama pendidikannya 3 tahun, sedangkan untuk HBS lama pendidikan 5 tahun yang diperuntukkan bagi siswa-siswa terpilih.<sup>70</sup>

Pada tahun 1910, lulusan sekolah angka satu dan angka dua yang berasal dari masyarakat bumiputera berjumlah 232.629 siswa, sehingga jumlah warga bumiputera yang mampu berbahasa melayu diperkirakan hampir sama dengan lulusan tersebut. Sedangkan jumlah siswa bumiputera yang mampu meneruskan sekolah menengah, seperti STOVIA (*School tot Opleiding van Inlandsche Artsen*), OSVIA (*Opleiding School voor Indlandsche*) dan yang lainnya berjumlah 1.470

---

<sup>69</sup> Takashi Shiraishi, 1997 *An Age in Motion: Popular Radicalism in Java 1912-1926*, Terjemahan Hilmar Farid, *Jaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, Pustaka Utama Grafiti: Jakarta, hlm. 37. lihat juga Ricklefs, *op. Cit.*, hlm. 329-330.

<sup>70</sup> Tuk Setyohadi, 2002, *Sejarah Perjalanan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa*, Rajawali Corporation, Jakarta, hlm. 9.

orang. Ini berarti, meningkat lima kali lipat dibandingkan jumlah siswa pada tahun 1900 yang hanya berjumlah 376.<sup>71</sup>

Meningkatnya minat kaum bumiputera pada pendidikan model Barat antara lain disebabkan oleh peningkatan ekspor Belanda yang mencapai dua kali lipat. Hal ini mengharuskan mereka untuk menambah tenaga kerja baru yang profesional tanpa harus mengeluarkan banyak biaya dari pada mendatangkan tenaga-tenaga yang profesional dari Belanda. Pemerintah Hindia Belanda berpikiran akan lebih efisien apabila mengoptimalkan tenaga lokal (kaum bumiputera) untuk mengisi posisi kerja tersebut.<sup>72</sup>

Semaun adalah salah seorang kaum bumiputera yang hidup dijamin maraknya politik etis di perbincangkan, pada umur tujuh tahun, Semaun mengikuti pendidikan di sekolah *Tweede Klas* yang setaraf dengan Sekolah Dasar sekarang. Selain mengikuti pendidikan *Tweede Klas*, Semaun juga mengikuti pendidikan tambahan yang diselenggarakan oleh *Eerste Klas Inlandsche School* yang kemudian dikenal dengan HIS (*Holland Inlandsche School*). Karena kecerdasan dan keuletan Semaun, maka saat Semaun duduk di kelas VI pada tahun 1912 diperbolehkan mengikuti ujian untuk menjadi pegawai Pamong Praja Rendah dan berhasil memperoleh sertifikat.

Sesudah menyelesaikan sekolah dasar dan setelah mendapatkan sertifikat "*Klein Abtenaar*", ia tidak dapat melanjutkan kejenjang pengajaran yang lebih tinggi. Ia kemudian bekerja di *Staatsspoor* (SS) Surabaya sebagai seorang juru tulis (*klerk*) kecil. Semaun diterima di jawatan tersebut setelah dinyatakan berhasil

---

<sup>71</sup> Takashi Shiraishi, *op. cit.*, hlm. 37.

<sup>72</sup> Zainul Munasichin, *op. cit.*, hlm. 45-46.

menempuh ujian “pengetahoean oemoem” (*Algemeene Outwikkeling*) dan ujian “*Stationscommies*”. Itu terjadi pada tahun 1912 saat ia berumur 13 tahun.<sup>73</sup>

Meski sudah bekerja, Semaun masih giat untuk belajar secara otodidak dan didukung juga sifat dan sikapnya yang mudah bergaul memberikan nilai tambah Semaun dalam menambah pengetahuannya lewat orang-orang yang ada di sekelilingnya, hingga pada akhirnya membawa Semaun pada pertemuannya dengan Sneevliet. Dengan belajar secara otodidak maka Semaun berhasil memperoleh gelar Diploma A, dan kemudian disamakan dengan HBS (*Hollands Burgerscholen*) atau sekolah tinggi bagi warga negara yang setara dengan sekolah menengah Belanda.<sup>74</sup>

Dengan latar belakang yang bukan berasal dari anak seorang “kadiroen” (anak seorang lurah), Semaun menceritakan kehidupan keluarganya, pendidikannya dan pada akhirnya menjadi asisten Wedono kemudian menjabat sebagai pejabat patih, atau dapat dikatakan lebih menyerupai “Propagandist Tjitro”

“Kebetoelan di sebelah Bok-Sariman ada seorang toekang batoe jang hidoepnja ada sedikit tjoekop dan menjekolahkan anaknja jang djoega berumur 6 tahoen di sekolahan kelas 2. Itoe anak ialah jang bernama Tjitro dan jang di waktoe besarnja sudah mendjadi propagandist PK sebagaimana tertjerita dalam bab IV ini boekoe.

.....  
 Di waktoe beroemoer 10 tahoen soedah tamat beladjar di sekolahnja kalas 2 itoe.

.....  
 Karena Tjitro dapat baroe tahoe, bahwa di sekolahan HIS di kota G itoe saben sore ada diajarkan bahasa Belanda dan lain-lain boeat menoen-toet

---

<sup>73</sup> Soewarsono, 2000, *Berbareng Bergerak: Sepenggal Riwayat dan Pemikiran Semaoen*, LKiS: Yogyakarta, hlm. 40.

<sup>74</sup> Soe Hok Gie, *op. cit.*, hlm. 50.

oejian Kleinambtenaars-examen, maka...bikin poatoesan meneroeskan beladjar di sitoe.....”<sup>75</sup>

Usaha untuk menambah pengetahuan dan pendidikan terus dilakukan oleh Semaun dengan belajar sendiri, karena sejak duduk di bangku sekolah sudah gemar membaca buku. Terutama buku-buku yang berkaitan dengan masalah-masalah kemanusiaan. Setelah bekerja ternyata tidak memberikan kepuasan kepada Semaun, melihat keadaan masyarakat bumiputera yang kehidupannya tertindas lebih menggugah hati Semaun untuk keluar dari pekerjaannya dan mulai melibatkan diri dalam pergerakan yang selalu memperjuangkan taraf hidup kaum bumiputera yang berada dalam kekuasaan kapitalisme Belanda.

---

<sup>75</sup> Semaon, 2000, *Hikajat Kadiroen*, Yayasan Bentang Budaya: Yogyakarta, hlm. 162,163, 164, 167, 168.

**BAB III**

**PERJUANGAN SEMAUN DARI SAREKAT ISLAM SURABAYA SAMPAI  
PARTAI KOMUNIS INDONESIA TAHUN 1914-1923**

**A. Dalam Bidang Politik**

Politik etis memberikan perubahan yang sangat mendasar bagi masyarakat Hindia Belanda yang menempati strata sosial tertinggi dalam sistem kemasyarakatan, terutama masyarakat dari golongan priyayi. Penerapan politik etis merupakan salah satu bentuk respon dari pemerintah di negeri Belanda terhadap apa yang dipermasalahkan oleh kaum dari partai sosial demokrat berkenaan dengan merosotnya kemakmuran rakyat Indonesia. Politik etis ini telah diterima secara luas di segala kalangan oleh karena di dalam mengusahakan pembangunan tanah jajahan dilakukan dengan modal yang berasal dari pihak swasta dan juga dicari jalan untuk mensejahterakan rakyat serta menuju otonomi.<sup>76</sup>

Dengan banyaknya kaum bumiputera yang mengenyam pendidikan memberikan dampak bagi perkembangan politik di Hindia Belanda pada awal-awal abad ke-20. Hal ini terlihat dengan munculnya berbagai organisasi pergerakan yang diantaranya yaitu Boedi Oetomo (BO), Sarekat Prijaji (SP), dan Sarekat Dagang Islam (SDI) yang menjadi cikal bakal lahirnya Sarekat Islam (SI).

Sarekat Islam pada awal berdirinya bernama Sarekat Dagang Islam (SDI), lahirnya SDI ini salah satunya merupakan bentuk respon ketidakpuasan dari

---

<sup>76</sup> Robert Van Niel, *op. cit.*, Hlm. 21

kalangan menengah terhadap organisasi Boedi Oetomo (BO) yang hanya diperuntukan bagi kalangan orang-orang terpelajar. Organisasi Boedi Oetomo (BO) sendiri lebih beruntung jika dibandingkan dengan organisasi yang didirikan oleh Raden Mas Adhi Soerjo yaitu Sarekat Prijaji (SP) pada tahun 1906 yang merupakan sebuah organisasi sosial ekonomi. Sarekat Prijaji merupakan organisasi modern milik kaum pribumi pertama yang menggunakan mingguan *Medan Prijaji* sebagai organnya. Pendirian Sarekat Prijaji (SP) tidak terlepas dari pengaruh berdirinya organisasi Tiong Hoa Hwee Koan oleh kalangan penduduk Tionghoa pada tahun 1900 dan [D]Jamiat ul-Khair oleh kalangan penduduk Arab pada bulan Juli 1905.<sup>77</sup>

Berbeda dengan SP dan BO, SDI yang didirikan pada tanggal 5 April 1909.<sup>78</sup> Menggunakan landasan yang kemudian dinamai “Kaum Mardika”, terjemahan dari Belanda “*Vrije Burgers*”, yaitu mereka yang mendapatkan penghidupannya bukan dari pengabdian pada Gubernur. Anggota dari SDI ini berasal dari golongan menengah yang terdiri dari para pedagang, petani, pekerja, tukang dan peladang. Sedangkan yang dijadikan sebagai unsur pengikat diantara anggotanya adalah Islam.<sup>79</sup> Mengenai Sarekat Islam yang terbuka untuk siapa saja, Marco menjelaskan:

....musik yang berbunyi di tempat *Vergadering* itu semakin membikin gembira hati orang-orang Islam yang ada di situ. Bangsawan kraton Solo, saudagar, priyayi Gouvernement dan orang-orang Particulir....

Lantaran pengaruh Sarekat Islam, itu waktu tidak ada perbedaan manusia; semua mengaku saudara, baik orang yang berderajat tinggi, maupun orang yang berderajat rendah.<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup> Soewarsono, *op, cit.*, hlm. 12

<sup>78</sup> Menurut A.P.E. Korver, SDI didirikan oleh Tirtoadisoerjo pada tahun 1910 di Bogor.

<sup>79</sup> Pramodya Ananta Toer, 2003, *Sang Pemula*, Lentera Dipantara, Jakarta, hlm. 150.

<sup>80</sup> Marco Kartodikromo, 2000, *Student Hijo*, Aksara Indonesia, Yogyakarta, hlm. 159-160.

Pendirian SDI sendiri tidak terlepas dari adanya sebuah perkumpulan yang bernama *Kong Sing*. Dalam bulan-bulan peralihan pada tahun 1911-1912 anggota-anggota organisasi ini sering terlibat perkelahian di jalan, perkelahian ini dikarenakan adanya keinginan emansipasi dari orang Cina terhadap orang Jawa yang sama-sama tergabung dalam perkumpulan tersebut. Disamping itu perkelahian ini juga merupakan dampak secara tidak langsung atas pemogokan-pemogokan yang sering terjadi di Surabaya pada bulan Februari 1912 sehingga mengakibatkan para pengusaha batik yang ada di Surakarta mengalami kerugian.<sup>81</sup> *Kong Sing* sendiri secara formal adalah sebuah perkumpulan tolong menolong untuk pemakaman, tetapi sebenarnya perkumpulan ini merupakan sisa dari jaringan ladang opium yang sangat kuat dibangun atas model Serikat rahasia Cina. Tolong menolong yang dilakukan tidak hanya terbatas pada pemakaman tetapi juga lebih bersifat umum yaitu tolong menolong dalam perdagangan, perkelahian, dan pembalasan dendam. Sedangkan anggota-anggotanya terdiri dari pedagang-pedagang kecil yang kebanyakan berasal dari Macao, Cina.<sup>82</sup>

Semenjak Haji Samanhoedi tergabung dalam *Kong Sing*, anggota yang berasal dari orang Jawa mulai bertambah banyak bahkan sampai dua kali lipat, dari anggota yang berasal dari orang Tionghoa. Revolusi Tiongkok merupakan awal perpecahan dari *Kong Sing*, dimana orang Tionghoa mulai bersikap arogan dan mulai memperlakukan anggota yang berasal dari orang Jawa secara kasar dan tidak layak. Hal inilah yang memicu Haji Samanhoedi untuk memutuskan keluar dari *Kong Sing* dan mendirikan *Rekso Roemokso*.

---

<sup>81</sup> A.P.E. Korver, 1985, *Sarekat Islam: Gerakan Ratu Adil*, Grafiti Pers, Jakarta, hlm. 15.

<sup>82</sup> Takashi Shiraishi, 1997, *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, Grafiti, Jakarta, hlm. 52-53.

Rekso Roemokso yang dipimpin oleh Haji Samanhoedi pada awal berdirinya hanyalah sebuah organisasi di daerah industri batik Lawean.<sup>83</sup> Pendirian Rekso Roemokso bertujuan melindungi diri dari pencurian batik yang tengah dijemur, dengan kata lain organisasi ini adalah Organisasi Ronda.<sup>84</sup>

Peristiwa perkelahian yang terjadi antara anggota Kong Sing dengan para anggota Rekso Roemokso semakin meningkat dan mulai menarik perhatian pihak pemerintah kolonial Belanda yang berujung pada pemeriksaan Rekso Roemokso apakah telah memakai status perkumpulan ataukah belum.<sup>85</sup> Melihat tindakan tegas yang akan diambil pemerintah kolonial Belanda maka Haji Samanhoedi meminta bantuan Tirtoadisoejo untuk mendirikan SDI cabang Solo, hal ini juga dilakukan untuk menyelamatkan para anggota yang tergabung dalam Rekso Roemokso.

Sarekat Dagang Islam Solo merupakan cabang dari Sarekat Dagang Islam Bogor, yang diberikan kepercayaan untuk menjadi pemimpinnya adalah Haji Samanhoedi. Nama Sarekat Dagang Islam tidak lama, kata “Dagang” dihilangkan, kemudian menjadi Sarekat Islam sebagaimana yang direncanakan oleh R.M. Tirto Adisuryo. Sedangkan peraturan dasarnya disusun pada tanggal 11 Nopember 1911 dan setahun kemudian dibuat lagi peraturannya berdasarkan notaris pada tanggal 10 November 1912.<sup>86</sup>

Seperti halnya organisasi-organisasi pergerakan, SI Solo pada awal berdirinya memiliki media yang digunakan untuk tetap menjalin kerjasama antar

---

<sup>83</sup> Lawean adalah kemantren (onder distrik) dalam distrik kota Surakarta yang terletak di bagian paling Barat, penduduknya kebanyakan kaum saudagar.

<sup>84</sup> Soewarsono, *op. cit.*, hlm. 13.

<sup>85</sup> Pramodya Ananta Toer, *Sang Pemula, op. cit.*, hlm. 53.

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 169-170.

para anggotanya yaitu sarotomo, sarotomo sendiri berarti busur sakti yang dimiliki oleh Arjuna dalam kisah pewayangan. Untuk menerbitkan Sarotomo yang menggunakan bahasa Jawa, SI Solo harus bekerjasama dengan firma H Buning di Yogyakarta karena SI Solo sendiri tidak memiliki mesin percetakan. Yang menjabat sebagai redaktur utama Sarotomo adalah Tirtoadhisoejo, tetapi karena jarak yang sangat jauh dari Surakarta sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan kontak harian maka ditunjuklah Martodharsono sebagai redaktur pembantu.<sup>87</sup>

Organisasi modern dan surat kabar merupakan alat yang tidak terpisahkan pada masa pergerakan, organisasi modern berfungsi untuk mengorganisasi atau mengumpulkan massa sedangkan surat kabar berfungsi untuk mengorganisasi pengetahuan dan mengakses informasi seluas-luasnya bagi bumiputera, mulai dari persoalan politik dalam negeri maupun luar negeri. Dengan kedua alat ini para tokoh-tokoh pergerakan melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda.<sup>88</sup>

Konflik-konflik yang masih sering terjadi antara orang Jawa dengan orang Cina berdampak pula pada persaingan untuk memperbanyak masa pendukungnya. SI Solo lebih memilih untuk melakukan pendekatan kepada pengusaha-pengusaha yang ada di Surabaya, maka pada bulan Mei 1912 empat wakil dari SI Solo melakukan propaganda demi memperkuat SI Solo dengan membuka cabang di Surabaya.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Takashi Shiraishi, *op. cit.*, hlm. 60.

<sup>88</sup> Zainul Munasichin, *op. cit.*, hlm. 6.

<sup>89</sup> A.P.E. Korver, *op. cit.*, hlm. 21.

Orang pertama yang dikunjungi oleh para perwakilan SI Solo adalah Hasan Ali Soerati, seorang keturunan keluarga saudagar Islam kaya yang berasal dari India. Hasan Ali Soerati sendiri adalah ketua dari perkumpulan Taman Maninkem, selain bertemu dengan Hasan Ali Soerati, empat orang utusan SI Solo juga berkenalan dengan Tjokroaminoto yang hadir sebagai ketua perkumpulan Panti Harsoyo. Sehari kemudian Tjokroaminoto menyatakan diri berminat untuk bergabung dengan SI Solo dan pada hari itu juga Tjokroaminoto bersama dengan Hasan Ali Soerati dilantik menjadi anggota baru SI.<sup>90</sup>

Untuk menjalankan keanggotaan SI di Surabaya, maka Tjokroaminoto dipercayakan menjadi pemimpin SI cabang Surabaya, pada perkembangan selanjutnya SI cabang Surabaya akan menjadi Centraal Sarekat Islam (CSI). Sebagai pemimpin SI cabang Surabaya yang baru maka Tjokroaminoto diberikan kepercayaan untuk membuat sebuah dasar dari SI yang baru, hal pertama yang dilakukan oleh Tjokroaminoto adalah melakukan survei ke Solo untuk melihat pondasi dari SI yang sudah ada sebelumnya. Setelah melakukan survei Tjokroaminoto bersama para saudagar dan pegawai Sultan membuat akte hukum SI di Surabaya atas nama Tjokroaminoto sendiri. Dan pada tanggal 10 November 1912 SI secara resmi terbentuk.

Setelah secara resmi terbentuknya SI maka pada tanggal 26 Januari 1913 kongres SI yang pertama dilaksanakan di taman kota Surabaya. Pada awal berdirinya, SI merupakan organisasi yang sangat fenomenal karena basis massanya adalah semua kalangan masyarakat tanpa mempersoalkan status

---

<sup>90</sup> Takashi Shiraishi, *op. cit.*, hlm. 53.

sosialnya, sehingga para pemimpinnya disambut massa secara besar-besaran di stasiun, Haji Samanhoedi sebagai petinggi dari perkumpulan ini disambut oleh korps musik dan massa yang berjumlah kira-kira lima ribu orang.<sup>91</sup>

Antusiasnya masyarakat dalam mengikuti rapat umum merupakan bentuk respon positif masyarakat terhadap kemajuan SI. Setelah berhasil menyelenggarakan kongres yang pertama maka pada tanggal 23 Maret 1913 SI mengadakan kongres umum yang kedua yang dilaksanakan di taman susuhunan Surakarta, inti dari pertemuan ini yaitu membentuk Centraal Sarekat Islam Comite dan memilih Haji Samanhoedi sebagai ketua serta Tjokroaminoto sebagai wakil ketua.<sup>92</sup>

Mengenai kongres SI kedua yang dilaksanakan di Solo Marco menjelaskan:

Pukul sembilan malam *Vergadering* dibuka, dan membicarakan betapa itu perkumpulan yang bikin gentarnya tanah Hindia bisa jadi baik....

Ini *Vergadering* sampai pukul dua belas malam baru ditutup.

Pukul tujuh pagi hari minggu, beribu-ribu orang sudah sama masuk di Sriwedari. *Commissaris* politie dan sekalian pegawainya sudah bersiap menjaga itu tempat yang di tempati kongres SI....

....sepanjang jalan di kota Solo penuh dengan orang yang akan datang di Sriwedari buat melihat itu *Vergadering*.<sup>93</sup>

Setelah berhasil menyelenggarakan dua kali kongres umum maka perkembangan jumlah anggota SI semakin pesat dan tidak terbandung, perluasan SI yang besar ini mempengaruhi baik posisi pemerintah terhadap SI maupun asas dan struktur kepemimpinan SI. Perluasan SI ini menjadi persoalan politik

---

<sup>91</sup> A.P.E. Korver, *op. cit.*, hlm. 22.

<sup>92</sup> *Log. cit.*

<sup>93</sup> Marco Kartodikromo, *op. cit.*, hlm. 160-161.

pemerintah Hindia yang sangat serius.<sup>94</sup> Hal ini juga dikarenakan perluasan SI sering disertai dengan berbagai macam keributan yang lebih sering menimpa para pemilik perkebunan sehingga para pemilik perkebunan harus menjaga areal perkebunannya secara ketat bahkan sampai melibatkan para militer dalam pengamanannya.<sup>95</sup>

Dengan semakin banyaknya afdeling dari SI yang muncul maka anggota-anggotanya juga semakin meningkat, hal semacam ini menuntut SI untuk menambah pegawai yang bertugas untuk mengkoordinir antar sesama afdeling SI. Untuk mempermudah mengkoordinir antar afdeling SI maka dibentuklah komite-komite, komite pusat berada di Surakarta yang mengepalai tiga komite, untuk departemen Jawa Timur yang di bawah pimpinan SI Surabaya, Jawa Tengah yang dipimpin oleh SI Surakarta dan Jawa Barat di bawah pimpinan SI Batavia.<sup>96</sup>

Dalam rapat SI pada tanggal 20 April 1914 di Yogyakarta terdapat dua keputusan penting dimana Surakarta akan menjadi pusat dari CSI dan Haji Samanhoedi jadi *eerevoorzitter* (ketua kehormatan) pengurus pusat. Berhubungan dengan hasil keputusan tersebut muncul isu yang datangnya dari D.A. Rinkes yang hadir sebagai utusan pemerintah kolonial yang juga sebagai penasehat untuk urusan bumiputera dan Mas Marco yang memimpin majalah *Doenia Bergerak*. Rinkes menggambarkan sosok Haji Samanhoedi sebagai orang yang tidak maju, pedagang biasa dengan suasana Laweyan, tidak punya tata krama dan hanya mampu memilih orang-orang yang tidak berpengalaman untuk menjadi wakil SI Surakarta. Sedangkan Tjokroaminoto digambarkan sebagai priyayi, yang mampu

---

<sup>94</sup> Pramodya Ananta Toer, *Sang Pemula, op. cit.*, hlm. 67.

<sup>95</sup> A.P.E. Korver, *op. cit.*, hlm. 23.

<sup>96</sup> Takashi Shiraishi, *op. cit.*, hlm. 70.

melihat ke depan, sangat maju dan modern, seorang yang pandai berpidato dan juga ahli politik. Sedangkan Mas Marco sangat menyayangkan pergantian itu, karena dengan adanya pergantian itu maka adanya perpindahan dari tangan wong cilik ke priyayi.<sup>97</sup>

Karena gerakan SI semakin pesat maka mulai menarik perhatian pihak pemerintah kolonial Belanda. Jenderal Idenburg mengerahkan seluruh aparat untuk mengawasi dan mengumpulkan informasi tentang SI sambil tetap membiarkan keputusan mengenai SI selalu mengambang, namun keadaan semakin mendesak yang mulai menuntut pihak pemerintah untuk mengambil keputusan yang pasti tentang status SI. Bagi pemerintah Hindia Belanda pada dasarnya ada empat pilihan keputusan yang tersedia: pertama, tetap membiarkan keputusannya mengambang; kedua, membubarkan SI; ketiga, mengakui anggaran dasar SI yang diajukan Tjokroaminoto dan memberikan status hukum kepada SI sebagai perkumpulan; dan keempat memberikan pengakuan hukum kepada SI-SI lokal.

Pada tanggal 30 Juni 1913 pemerintah Hindia Belanda akhirnya mengambil keputusan mengenai status hukum bagi SI, keputusan itu menolak permintaan SI akan pengakuan hukum anggaran dasarnya dan menolak juga pemberian status hukum sebagai perkumpulan. Sebagai gantinya pemerintah menunjukkan sikapnya kepada pimpinan pusat SI bahwa mereka memberikan pengakuan hukum bagi SI-SI yang didirikan di tingkat lokal yang membatasi

---

<sup>97</sup> Kuntowijoyo, 2004, *Raja, Priyayi, dan Kawula: Surakarta 1900-1915*, Ombak, Yogyakarta, hlm. 104-105.

wilayah kegiatannya pada daerah tertentu. Pemerintah juga tidak menolak jika dibentuk badan sentral untuk kerjasama dan koordinasi antara SI-SI lokal.<sup>98</sup>

Penolakan pemberian izin oleh pemerintah kolonial Belanda kepada SI sebagai badan hukum seperti yang diajukan oleh Tjokroaminoto, tidak terlepas dari saran yang diajukan oleh van Wijk, seorang mantan Residen Solo. Van Wijk menyampaikan nasehatnya kepada pemerintah Hindia Belanda melalui Direktur kehakiman lewat suratnya tertanggal 5 Desember 1912 no 142/5, yang berisi larangan untuk memberi kedudukan sebagai badan hukum untuk SI yang dianggapnya masih sangat muda. Nasehat van Wijk ini juga didukung oleh *Raad van Indie* yang menjabat sebagai Dewan Hindia.<sup>99</sup>

Yang menjadi permasalahan siapakah orang yang dapat diajak oleh Dr. Rinkes yang menjabat sebagai penasihat urusan bumiputera sekaligus orang yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk membimbing SI di jalan yang diinginkan oleh pemerintah. Setelah melihat kemampuan tiap-tiap individu dari petinggi SI maka yang dapat diajak untuk bekerjasama dalam mengubah *afdeling* menjadi SI lokal adalah Tjokroaminoto, sedangkan Haji Samanhoedi sendiri dianggap tidak memiliki kemampuan berbicara di depan umum.

Seperti halnya dengan Haji Samanhoedi, semua pemimpin SI Surakarta dari masa Rekso Roemekso disingkirkan dari pimpinan pusat kecuali R.H. Abdoelfatah, mantan bendahara *hoofdbestuur*. Jabatan yang seharusnya menjadi hak dari SI Surakarta diberikan kepada wakil-wakil SI lokal dari Madura, Malang, Serang, Bondowoso dan Wonosobo yang merupakan orang-orang pilihan

---

<sup>98</sup> Takashi Shiraishi, *op. cit.*, hlm. 93-94.

<sup>99</sup> Pitut Soeharto & Zainoel Ihsan, 1981, *Cahaya di Kegelapan*, Jayasakti, Jakarta, hlm.274.

Tjokroaminoto dari kalangan anak buahnya.<sup>100</sup> Sejak akhir Desember 1913, perubahan afdeling SI menjadi SI lokal berjalan mulus di bawah pimpinan Tjokroaminoto dan Dr. Rinke.

Hasil kongres yang dihadiri oleh delapan puluh perkumpulan setempat, yang memberikan kemenangan definitive bagi Tjokroaminoto atas Haji Samanhoedi, Tjokroaminoto terpilih sebagai ketua umum CSI sedangkan Goenawan terpilih sebagai wakil ketua, Achmad sebagai sekretaris/bendahara dan K.H. Dahlan menjabat sebagai penasehat. Dengan diangkatnya Haji Samanhoedi sebagai ketua kehormatan secara tidak langsung menutup langkah bagi Haji Samanhoedi untuk aktif dalam pimpinan umum CSI. Setelah diangkatnya Haji Samanhoedi sebagai ketua kehormatan, ia tidak pernah lagi menghadiri kongres selanjutnya, dan perselisihan antara pengikut Tjokroaminoto dan para pengikut Haji Samanhoedi berlanjut hingga kepers, dimana terjadinya saling menyerang antara majalah *Doenia Bergerak* yang dipimpin oleh Marco dan *Oetoesan Hindia*.<sup>101</sup>

Ketegangan yang terjadi antara SI Surakarta dengan SI Surabaya berlanjut sampai dengan saling menyerang dan saling menjatuhkan lewat media pers, ketegangan ini memuncak sampai dengan dipenjarakan Marco karena *Persdelicten* yang dianggap menghina pihak pemerintah. Hal terpenting yang menyebabkan Marco terkena tuduhan *Persdelicten* yaitu ketidaksediaannya Marco mengungkapkan identitas para penulis kepada pemerintah. Sedangkan pihak

---

<sup>100</sup> *Ibid.*, hlm. 99.

<sup>101</sup> A.P.E. Korver, *op. cit.*, hlm. 35.

CSI sendiri bersukur dengan dihukumnya Marco, dalam *Oetoesan Hindia* ditulis “Sjoekoer kepada Allah”.<sup>102</sup>

Melihat masalah yang dihadapi oleh Marco maka Sneevliet sebagai pemimpin ISDV bersimpati sekaligus menarik simpati dari kalangan kaum pergerakan bumiputera. Sneevliet yang bernama asli Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet dilahirkan di Rotterdam pada tanggal 13 Mei 1883. Sneevliet, adalah seorang Belanda yang datang ke Indonesia dalam tahun 1913, pada mulanya bekerja sebagai pemimpin redaksi *Soerabajaasch Handelsband*, surat kabar di Surabaya yang menjadi media sindikat pabrik gula selama dua bulan dan kemudian menjadi Sekretaris Kamar Dagang Semarang.<sup>103</sup>

Bersama dengan Adolf Baars, Sneevliet mendirikan ISDV (*Indische Sociaal Democratische Vereeniging*) pada bulan Mei 1914 di Semarang dengan media pers *Het Vrije Woord* yang terbit pertama kali pada tanggal 10 Oktober 1915, pada awal berdirinya ISDV telah memproklamirkan dirinya sebagai organisasi yang berhaluan Marxis. Sneevliet sangat yakin bahwa Marxisme akan tumbuh dengan cepat di Indonesia.<sup>104</sup> Ditahun-tahun pertama ISDV lebih banyak meyibukkan diri dengan berbagai kegiatan diskusi teoritis daripada melakukan gerakan-gerakan yang menentang kebijakan pemerintah kolonial Belanda, dan setelah PD I selesai barulah ISDV mulai membuka diri terhadap dunia pergerakan di Hindia Belanda.<sup>105</sup>

---

<sup>102</sup> Takashi Shiraishi, *op. cit.*, hlm. 115.

<sup>103</sup> Deliar Noer, *op. cit.*, hlm. 136.

<sup>104</sup> Zainul Munasichin, *op. cit.*, hlm. 71.

<sup>105</sup> *Ibid.*, hlm. 72

ISDV pada perkembangan selanjutnya yang berada di bawah pimpinan Sneevliet dengan program aksi yang keras akhirnya dapat menguasai Serikat Kerja Trem dan Kereta Api (VSTP) di Semarang. Sneevliet menyadari ISDV tidak dapat berkembang secara revolusioner tanpa adanya orang bumiputera untuk diindoktrinasi, tokoh pergerakan yang diindoktrinasi oleh Sneevliet adalah Semaun, Semaun mempunyai fikiran yang terang dan membuktikan dirinya sebagai murid yang mempunyai kemampuan dan kesanggupan.

Selain bekerja di ISDV, Sneevliet juga menjadi editor *De Volharding*, surat kabar berbahasa Belanda di Semarang. *De Volharding* merupakan organ dari VSTP. *Vereeniging voor Spoor en Tramweg Personeel* (VSTP) adalah oerorganisasi yang didirikan di Semarang pada tahun 1908 oleh dua orang tokoh sosialis Belanda C.J. Hulshoff dan H.W. Dekker. VSTP merupakan perkumpulan yang diperuntukan bagi para pegawai Eropa dalam *NederlandschIndische Spoorweg* (NIS) dan *Staatsspoor* (SS). Atas saran dari Sneevliet akhirnya VSTP juga menerima anggota bumiputera dengan alasan bahwa pada saat itu jumlah pegawai bumiputera yang terpelajar dan mempunyai kemampuan dalam bidang berorganisasi cukup banyak. Selama satu tahun sejak kedatangannya di Semarang, Sneevliet berhasil mengarahkan VSTP untuk bergerak secara radikal guna memperbaiki nasib-nasib para pegawai bumiputera yang tidak cakap dan miskin.<sup>106</sup>

Semaun memulai karir politiknya ketika ia menjadi anggota SI Surabaya, Semaun menjadi anggota SI cabang Surabaya pada tahun 1913, tepatnya ketika ia

---

<sup>106</sup> Dewi Yulianti 2000, *Semaoen Pers Bumiputera dan Radikalisasi Sarekat Islam Semarang*, Bendera, Semarang, hlm. 7.

berusia 14 tahun. Keterlibatan dalam pergerakan nasional bagi Semaun adalah untuk mewujudkan cita-cita perjuangan yang tidak membedakan antar golongan dalam masyarakat, yang lebih penting adalah bagaimana menentang dan melawan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat bumiputera secara tegas dan berani. Karena ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat diakibatkan oleh kejamnya politik kolonial Belanda dan para kaum kapitalis, maka Semaun menentang dengan sangat keras dan revolusioner.

Pada tahun 1914 Semaun diangkat menjadi sekretaris SI Surabaya, Semaun diberikan kepercayaan untuk menjabat sebagai sekretaris, hal ini dikarenakan kegiatannya di organisasi yang menonjol yaitu ketika Semaun mengumpulkan para petani di daerah tanah perkebunan swasta untuk melakukan pemogokan. Pemogokan yang dilakukan menuntut keadilan yang berkaitan dengan pembagian hasil panen, yaitu setengah dari hasil panen diberikan kepada petani penggarap. Pemogokan yang dipimpin oleh Semaun ternyata membuahkan hasil, sejak pemogokan ini nama Semaun semakin terkenal dikalangan anggota SI.<sup>107</sup>

Pertemuan Semaun dengan Sneevliet di Surabaya mengantarkannya menjadi seorang propagandis bumiputera yang pertama bergabung dengan VSTP sekaligus ISDV. Tidak lama kemudian Semaun dipercayakan untuk menjadi sekretaris ISDV dan memegang kepemimpinan VSTP cabang Surabaya. Tampilnya Semaun dalam perkumpulan ISDV dan VSTP seringkali menarik perhatian para petinggi ISDV dan VSTP. Berdasarkan pengamatan yang

---

<sup>107</sup> Moehkardi, *Umur 14 Tahun alm. Dr. Semaun Sudah Anggota Sarekat Indonesia*, Intisari, Oktober 1971, hlm. 34.

dilakukan pada pertemuan VSTP di Semarang, Jaques Pangemanan menggambarkan sosok Semaun:

Seorang bocah berperawakan pendek, bercelana panjang dan berkemeja pendek, semua serba putih, dengan gesitnya menghadirkan air teh. Setelah meletakkan gelas-gelas, ia berdiri tegak dan dalam Belanda yang lancar mengucapkan selamat datang kepada sang ayah dan sukses di atas podium untuk Siti Soendari. Setelah itu ia membungkuk seperti seorang penggawal Kerajaan di istana-istana Eropa dan memperkenalkan dirinya: “Namaku Semaoen”.<sup>108</sup>

Dan pada kesempatan lain, terkait dengan kerusuhan pada garis bujur Semarang-Sala-Yogyakarta berkenaan dengan janji pemerintah untuk membentuk konsep pemerintahan sendiri, Jaques Pangemanan menggambarkan Semaun:

“Seorang bocah berumur enam belas tahun, bertubuh pendek, yang beberapa tahun yang lalu masih melayani tamu-tamu VSTP Semarang, dengan kelebihanannya karena telah membacai beberapa buku berbahasa Belanda, dan berkat pandai bicara, telah memperlihatkan diri sebagai calon agitator yang tangguh. Bocah itu bernama Semaoen”.<sup>109</sup>

Kedekatan Semaun dengan tokoh-tokoh ISDV, terlebih ketika ikut berbicara dalam pertemuan VSTP, Marco menjelaskan sebagai berikut:

Dalem tahoen 1915, saya tahu saeodara *Semaoen* pada soeatoe malem bitjara di vergadering dari perhipoenan V.S.T.P. di Logegeboue Semarang. Paginja dia datang di roemah saeodara *Moh. Joesoef* (Presiden S.I) di Semarang, jaitu pondokan saja boeat pertama perkara persdelict; di roemah saeodara itoe saja moelai kenal jang pertama kali dengan saeodara *Semaoen*. Dalem tahoen 1916, dia djadi Redactur-Propagandist V.S.T.P bekerdja bersama-sama dengan saeodara-saeodara *Sneevliet* dan *Dekker*, dan tidak antara lama dia djoega djadi propagandist S.I Semarang.<sup>110</sup>

Pada bulan Juli 1916, Semaun diangkat menjadi propagandis VSTP yang digaji bulanan, berkenaan dengan itu Semaun juga pindah ke Semarang, kota

---

<sup>108</sup> Pramoedya Ananta Toer, 2002, *Rumah Kaca Cet IV*, Hasta Mitra, Jakarta, hlm. 320.

<sup>109</sup> *Ibid.*, hlm. 452-453.

<sup>110</sup> Zainul Munasichin, *op.cit.*, hlm. 74.

tempat kedudukan para pengurus VSTP. Sejak pindah ke Semarang Semaun memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya di SS Surabaya. Di Semarang Semaun juga membantu sebagai salah seorang redaktur organ VSTP berbahasa Melayu, *Si Tetap*.<sup>111</sup>

Kepindahan Semaun ke Semarang juga diikuti dengan terpilihnya Semaun sebagai ketua SI Semarang, terpilihnya Semaun diawali dengan permohonannya, sebagai propagandis, agar pengurus SI Semarang mengadakan suatu debat terbuka guna membicarakan bagaimana posisi SI Semarang terhadap penahanan preventif Marco terkait dengan tulisannya “sama rata sama rasa” dan terhadap masalah *Commitee voor de Drukpersvrijheid*. Debat terbuka yang berlangsung secara notabene antara Semaun dengan Moh. Joesoef, ketua SI Semarang. Debat terbuka ini dilangsungkan tanggal 14 Maret 1917 di hadapan para eksekutif dan sejumlah anggota. Akhir dari debat ini, selain memutuskan bahwa SI Semarang akan kut terlibat dalam komite tersebut, salah satu faktor penting untuk keberhasilan Semaun terpilih menjadi ketua SI Semarang dalam rapat pemilihan pengurus pada tanggal 6 Mei 1917.<sup>112</sup>

Sejak terpilihnya Semaun menjadi pemimpin baru SI cabang Semarang maka diumumkan juga pengurus-pengurus baru SI Semarang, antara lain:

Ketua	:Semaun
Wakil ketua	:Noorsalam
Sekretaris	:Kadarisman
Komisaris	:Soepardi, Aloe, Jahja Aldjoefri, H. Boesro, Amathadi, Mertodidjojo, Kasrin.

<sup>111</sup> Soewarsono, *op. cit.*, hlm. 42.

<sup>112</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

Dengan adanya pergantian pengurus ini mencerminkan adanya perubahan di dalam kepengurusan SI Semarang. Sejak di bawah kepemimpinan Semaun, para pengurus SI berasal dari kalangan buruh dan tani. Sebelumnya kepengurusan SI Semarang berada di bawah kepemimpinan mereka yang berasal dari kaum menengah dan pegawai negeri, sejak kepemimpinan Semaun tak sedikit dari kaum menengah dan pegawai negeri ini yang keluar dari SI Semarang karena kurang setuju dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh SI Semarang.<sup>113</sup>

Banyaknya keputusan-keputusan yang sifatnya revolusioner, sering menimbulkan tuduhan-tuduhan bahwa ada orang lain di balik pemikiran dan sikap Semaun yang tak lain adalah Sneevliet, seperti yang dikatakan oleh Sosrokardono, salah satu pimpinan CSI Surabaya, mengungkapkan dalam *Sinar Djawa* pada bulan September 1917:

...S.I Semarang masih koeat melengkat pada Sneevliet, karena djiwanja SI Semarang ialah Semaoen, sedang toelang ponggong Semaoen adalah Sneevliet.

Boekankah kita tahoe penghidoean Semaoen ialah dari perkoempoelan V.S.T.P, sedang djiwanja V.S.T.P. ialah Sneevliet poela.<sup>114</sup>

Menanggapi hal ini, Semaun dengan sangat tegas menyatakan hal itu tidak benar. Semaun mengirimkan surat bantahan di surat kabar yang sama lima hari setelah tuduhan Sosrokardono keluar. Isi surat bantahan tersebut Semaun menegaskan:

- 1e. Saja djiwanja S.I Semarang, TIDA BETOEL!
  - 2e. Toelang ponggong saja ialah Sneevliet, TIDA BETOEL!
  - 3e. Djiwanja V.S.T.P. ialah Sneevliet, TIDA BETOEL!<sup>115</sup>
- Yang betul menurut Semaun adalah:

---

<sup>113</sup> Soe Hok Gie, *op. cit.*, hlm, 5

<sup>114</sup> Zainul Munaschin, *op.cit.*, hlm. 76-77.

<sup>115</sup> *Ibid.*; hlm. 77.

1e. S.I Semarang djiwanja perhimpoeannja sendiri, tida tergantoeng dari Semaen sendiri. Boektinja, saja verlof ada gantinja dan kalaoe saja tida djadi voorzitter djuga soedah ada gantinja.

2e. Sneevliet boekan toelang ponggong saja, sebab semoa manoesia punja fikiran sendiri-sendiri. Begitoepon saja. Perkara S.I Sela manja tida ada perhoeboengan ataoe pengaroeh dari Sneevliet.

3e. Djiwanja VSTP jalah perhimpoeannja sendiri.

Boektinja: Sneevliet ada ataoe tida ada, VSTP troes tetap hidoep sadja.<sup>116</sup>

Perombakan di dalam tubuh SI Semarang tidak hanya dilakukan terhadap para anggotanya, Semaun juga mulai mengambil alih pengelolaan redaksional *Sinar Djawa*, yang sebelumnya telah dibeli oleh SI Semarang dari *Firma Hoang Thaij and Co* pada masa kepemimpinan Mohammad Joesoef, kemudian semaun menjadikannya sebagai organ resmi SI cabang Semarang. Semaun menempatkan dirinya sebagai redaktur untuk soal-soal politik, dan memperkuatnya dengan memasukkan Mas Marco, setelah selesai menjalani hukuman penjara. Selain itu Semaun juga mengangkat Darsono sebagai anggota redaksi, yang dijumpainya pada saat berlangsungnya pengadilan Sneevliet. Pada tanggal 1 Mei 1918 Semaun juga mengubah nama *Sinar Djawa* menjadi *Sinar Hindia*, selain itu Semaun juga memperluas basis SI Semarang dengan membentuk kelompok-kelompok atas dasar latar belakang sosial ekonomi.<sup>117</sup> *Sinar Hindia* yang sebelumnya bersikap lunak dalam menyampaikan tulisannya, namun di bawah asuhan Semaun *Sinar Hindia* menjadi semakin radikal.

Menjelang kongres nasional CSI II yang dilaksanakan pada 20 sampai 27 Oktober 1917 Semaun mengusulkan sepuluh usul resmi agar dibicarakan dalam kongres. Walaupun ada sepuluh usul yang disampaikan namun inti dari usulan

---

<sup>116</sup> *Log. cit.*.

<sup>117</sup> Soewarsono, *op. cit.*, hlm. 46.

tersebut ada dua yaitu mungkin bagi setiap SI lokal untuk menyuruh *Centraal Bestuur* meminta pada pemerintah melakukan sesuatu yang merupakan gagasan dan kepentingan SI-SI lokal dengan kata lain pengurus CSI adalah orang-orang “suruhan “ SI-SI lokal yang telah menyerahkan sebagian pendapatan finansialnya. Yang kedua membatalkan mosi CSI mengenai IW (*Indie Weerbaar*) dan MB (Milisi Bumiputera) yang disampaikan Abdoel Moeis ke hadapan ratu.<sup>118</sup>

PD I yang terjadi di Eropa sangat berdampak pada keadaan di Hindia Belanda, terutama dalam hubungan politik pemerintahannya, kekhawatiran Belanda terhadap ancaman Jepang semakin besar ketika Jepang berhasil menaklukkan Cina dan koloni-koloni Jerman di kawasan laut Pasifik. Semetara itu masa jabatan Gubernur Jenderal Idenburg berakhir pada Desember 1914, namun melihat situasi politik dunia yang belum pasti dan dikhawatirkan sewaktu-waktu dapat mengancam pertahanan Hindia Belanda maka pemerintah Belanda memintanya agar tetap di Hindia Belanda untuk sementara waktu.

Pada bulan Maret 1916, Gubernur Jenderal yang baru J.P. Graaf van Limburg Stirum tiba di Hindia Belanda. Perang semakin mempersulit komunikasi langsung antara negeri jajahan dengan negara induk dan keadaan semacam ini memaksa pemerintah Hindia untuk menjalankan pemerintahan secara lebih mandiri. Gubernur Jenderal Limburg lebih fokus untuk membentuk *Volksraad* (Dewan Rakyat). Kebijakan ini tidak terlepas dari usul Dewan Hindia Belanda tahun 1892 untuk mendirikan sebuah badan kolonial yang akan duduk di dalamnya terdiri dari para anggota Dewan Hindia dan para kepala departemen

---

<sup>118</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

yang terdiri dari beberapa orang swasta yang ditunjuk oleh pemerintah.<sup>119</sup> Langkah awal yang dilakukan oleh Limburg Stirum yaitu mendesak pemerintah Belanda untuk mengesahkan pembentukan *Volksraad*. Pada bulan Desember 1916 pembentukan *Volksraad* disetujui oleh Parlemen Belanda.

*Volksraad* bertugas sebagai sebuah badan penasehat tanpa kekuasaan Legislatif, interpelasi, maupun penyelidikan Parlementer.<sup>120</sup> Dibentuknya *Volksraad* merupakan salah satu wujud dari pemerintah untuk mengikut sertakan rakyat ke dalam soal-soal pemerintahan, dimana wakil-wakil dari kalangan bumiputera dapat menyatakan pendapat-pendapatnya tentang soal-soal pemerintahan. Dari 39 anggotanya, 19 orang dipilih oleh dewan lokal (10 Indonesia, 9 Eropa dan Timur Asing), 19 diangkat (5 Indonesia, 14 Eropa dan Timur Asing). Dengan demikian dari 39 anggota hanya 15 orang yang berasal dari kaum bumiputera.<sup>121</sup>

*Volksraad* dibuka secara resmi pada bulan Mei 1918 dan sukses menyelenggarakan sidang pertamanya.<sup>122</sup> Tjokroaminoto dan Abdoel Moeis yang berasal dari CSI juga mendapat kursi dalam *Volksraad*. Seperti yang ditulis Semaun dalam Sinar Djawa tanggal 19 Januari 1918 No. 16: pilihan *lid-lid* *Volksraad* ternyata tidak berguna boeat kita anak boemipoetera, teroetama kaoem kromo. Semaun juga berkomentar sembilan wakil orang Belanda tidak satu pun yang dapat dikatakan membela kaum bumiputera atau dari wakil rakyat, sedangkan sepuluh dari perwakilan bumiputera tidak ada yang dekat dengan kaum

---

<sup>119</sup> Mochtar Lubis, dkk, 1987, *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 218.

<sup>120</sup> Takashi Shiraishi, *op. cit.*, hlm. 124.

<sup>121</sup> Soe Hok Gie, *op. cit.*, hlm. 19.

<sup>122</sup> Robert Van Niel, *op. cit.*, hlm. 190.

kromo dengan kata lain wakil dari bumiputera tidak akan memperjuangkan hak-haknya kaum kromo.<sup>123</sup>

Pembentukan *Volksraad* ternyata memperuncing hubungan antara Semaun dengan Abdoel Moeis yang berlanjut saling menyerang, Abdoel Moeis yang mendukung sekaligus sebagai anggota *Volksraad* menuduh Semaun hanyalah alat dari Sneevliet dan *voorstel* (usul) yang diajukan oleh SI Semarang merupakan ultimatum terhadap CSI, Abdoel Moeis juga mengatakan bahwa *voorstel* yang dibuat hanyalah pemikiran Semaun dengan mengatas namakan SI Semarang.

Abdoel Moeis juga menyinggung Semaun dengan mengatakan:

“Panglima-panglima kita, atau ksatria, sebagai dilazimkan namanya di doenia soerat-soerat kabar, hendaklah memoeliakan dan memakai akan sifat ini, dan djanganlah mereka itoe menoeroet tjonto dari pada kebanyakan djoeara-djoeara politiek di-Nederland, jang atjap kali terpaksa bermoeaka doea, karena ia kedjepit antara keperloean partij dengan keperloean negeri dan keperloean diri sendiri”.<sup>124</sup>

Menanggapi tuduhan ini Semaun membalas dengan mengeluarkan brosur yang bernada mengejek dan mengganggap *Volksraad* sebagai “komedi”. Selain itu Semaun juga mempublikasikan brosur yang berjudul “*Anti Indie Weerbaar*”. Tulisan Semaun ini merupakan kelanjutan dari tulisannya dalam Sinar Djawa yang berjudul “Peringatan Boeat Centraal Sarekat Islam Bestuur SI Boeat Saoedara Toean Abdoel Moeis”<sup>125</sup> dimana tulisan ini merupakan sebuah tanggapan balasan atas tuduhan Abdoel Moeis yang mengatakan Semaun berada dalam pengaruh Sneevliet. Dalam brosur anti *Indie Weerbaar*nya Semaun

<sup>123</sup> Dewi Yuliati, *op. cit.*, hlm. 130.

<sup>124</sup> Abdoel Moeis, Hindia Boeat Hindia, dalam Pitut Soeharto & Zainoel Ihsan, 1982, *Permata Terbenam*, Aksara Jayasakti, Jakarta, hlm. 71.

<sup>125</sup> Soewarsono, *op. cit.*, hlm. 53.

mengemukakan bahwa yang sebenarnya mempunyai kepentingan dengan *Indie Weerbaar* adalah kaum pemilik modal di negeri Belanda dengan menggunakan rakyat bumiputera sebagai umpan peluru. Para kaum kapitalis Belanda mengkhawatirkan adanya ancaman dari pihak Jepang terlebih ketika Jepang menyatakan semboyannya "Asia Boeat Orang Asia".

Alasan mengapa Semaun sangat menentang gagasan dan gerakan *Indie Weerbaar*, acuannya bukanlah berasal dari apa yang sering diajukan oleh orang-orang ISDV, melainkan sebagai "soeatoe *logisch gevolg uit een socialisten overtuiging* (toeroetan jang betoel dari kejakinannya faham socialist).<sup>126</sup> Dan di bawah slogan "Geen man en geen cent" (tida orang tida oeng boeat militairisme).<sup>127</sup>

Alasan lain yang merupakan dasar dari penolakan Semaun terhadap *Indie Weerbaar*, yaitu:

"TIDA SOEKA DJADI PERKAKASNJA LAIN ORANG DAN DIPERBOEAT EMPAN MERIAM BOEAT MELINDOENGI KEPERLOEANNJA KAOEM OEANG BELANDA....

Indie Weerbaar hanja boekan perkakasnja lain orang, kalae jang memimpin ini anak Hindia sendiri, dan pimpinan jang tertinggi boeat mengatoer Indie-Weerbaar, entah dengan militairisme ataoe lain atoeran, hanja bisa terdapat dari pada soeatoe WAKIL RA'JAT SEDJATI DI HINDIA.

ANTI WEERBAAR, ANTI MILITIE, minta wakil ra'jat di Hindia lebih doeloe, tida soeka Volksraad, tida soeka dipersanggoepi, tida soeka sebagai anak ketjil diberi keenakan, dengan perkataan, tetapi MINTA WAKIL RA'JAT SEDJATI LEBIH DOELOE.

Semaun juga mengatakan *Volksraad* bukanlah konsesi untuk IW dan MB, melainkan hanyalah sebuah "OMONG KOSONG", "komedi (*oneel*)", "kipas

---

<sup>126</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

<sup>127</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

pendingin”. Lebih jauh Semaun mengkritik bahwa 19 orang yang terpilih untuk duduk dalam *Volksraad*

“tida ada SATOE wakil dari ra’jat” dan “tida ada satoe jang oleh kromo boleh dibilang ‘penekat’ jang menjerahkan djiwanja”, karena dari orang Belanda di dalamnya 5 pegawai “goepermen” dan 4 kapitalis sedangkan dari orang bumiputera 6 orang tidak begitu dikenal, 3 regent, 1 CSI (Abdoel Moeis). Sedangkan dari 19 orang yang diangkat, 5 “kaoem oeang”, 2 “kaoem nigrat”, 4 orang Belanda, 3 Timur Asing, 2 Indo, 2 Manado, 1 wakil kromo (Cokroaminoto).<sup>128</sup>

Kongres CSI yang kedua yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 20 sampai 27 Oktober 1917. Dalam kongres ini Semaun dan kawan-kawannya sangat leluasa dalam menyebarkan ide-ide Marxis yang sebelumnya dalam kongres di Bandung Semaun dan kawan-kawan tidak diberikan keleluasaan untuk berbicara. Selama kongres perbedaan pendapat antara Semaun dan Abdoel Moeis terus berlanjut yang berkaitan dengan masalah Nasionalisme, menurut Abdoel Moeis kemerdekaan merupakan hal yang tidak dapat ditolak, namun ada juga pihak yang menentang rencana kemerdekaan bumiputera dengan cara mempengaruhi tokoh-tokoh pergerakan bumiputera. Semaun yang merasa disindir membantah tetapi Abdoel Moeis membalas dengan mengatakan siapa yang merasa tersingung dialah orangnya. Secara garis besar hasil dari kongres CSI II ini mencabut mosi pemecatan Semaun dan Sarekat Islam Semarang dari CSI dan mencabut mosi Sarekat Islam Semarang atas penolakan didirikannya *Indie Weerbaar* (milisi bumiputera). Untuk masalah *Indie Weerbaar*, *Voorstel* SI Semarang, *tegen Voorstel* CSI dilakukan dalam rapat tertutup dan disepakati tidak dipublikasikan ke media massa. Pemberitaan disejumlah surat kabar yang simpang siur secara

---

<sup>128</sup> *Log. cit.*

tidak langsung memaksa Semaun untuk menjelaskan bagaimana jalannya kongres CSI yang ke-II.<sup>129</sup>

Sejak kongres CSI II sampai kongres CSI III, Sarekat Islam Semarang terus giat mengkampanyekan anti *Volksraad* dan *Indie Weerbaar*, dan menentang semakin merajalelanya kaum pemilik modal dalam mempergunakan tenaga rakyat bumiputera. Sarekat Islam Semarang semakin mantap menggunakan konsep pemikiran sosialis revolusioner dalam pergerakannya.

Setelah kongres CSI ke III di Surabaya dari tanggal 29 September sampai 6 Oktober 1918, Semaun diangkat menjadi komisaris CSI untuk daerah Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang. Diangkatnya Semaun untuk menjadi komisaris CSI Jawa Tengah tidak terlepas dari bentuk antisipasi CSI terhadap gerakan Semaun dan kawan-kawan dengan SI Semarang yang semakin radikal. Tahun 1917 Sneevliet di tahan atas tuduhan Persdelictnya dan diancam 9 bulan penjara, tetapi tidak lama kemudian Sneevliet dibebaskan dan dibuang ke luar Hindia Belanda, penahanan Sneevliet dan pembuangannya ke luar secara mendadak memaksa Semaun untuk menagmbil alih kepemimpinan ISDV dan selanjutnya kepemimpinan ISDV diserahkan ke Hartog.

Kongres CSI IV dilaksanakan di Surabaya tanggal 26 Oktober sampai 2 Nopember 1919 membahas mengenai perlu adanya sebuah badan sentral untuk organisasi buruh di Hindia Belanda. Kongres CSI ke IV berlanjut di Yogyakarta dengan hasil kongres pendirian *Volkcentrale* dengan nama yang diusulkan oleh SI yaitu *Persatuan Pergerakan Kaum Buruh* (PPKB), yang diketuai oleh Semaun,

---

<sup>129</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

Soerjopranoto sebagai wakil ketua dan Haji Agus Salim selaku Sekretaris. Pada tanggal 1 Agustus 1920, PPKB mengadakan kongres yang pertama di Semarang, dalam PPKB sendiri telah bergabung 22 serikat sekerja.<sup>130</sup>

Bersikerasnya Sarekat Islam Semarang dalam menerapkan paham Marxisme, dan disertai dengan perbedaan visi dan misi dalam pergerakan membuat beban CSI semakin berat, ancaman yang bertubi-tubi datang baik dari luar maupun dari dalam SI sendiri, dari luar pemerintah terus membendung gerak SI dengan menangkap para petinggi SI, sedangkan dari dalam, antar petinggi SI saling serang dengan konsep pemikiran berbeda yaitu faham Islam melawan faham komunis.

Dimulai dari relasi Semaun dengan Sneevliet di VSTP dan ISDV, kemudian melebar pada pembelaan pembelaan ISDV terhadap Marco, serta bergabungnya Misbach di asosiasi jurnalis IJB (*Inlandsche Journalisten Bond*) milik Marco. Dengan adanya hubungan personal antara tokoh-tokoh ISDV dan pergerakan bumiputera itu kemudian meningkat menjadi sebuah aliansi kelembagaan, baik dalam gerakan maupun pemikiran. Secara sederhana, peta aliansi itu adalah Semaun-Marco-Misbach sebagai representasi dari SI Semarang-SI Salatiga-SI Solo yang disebut dengan "SI Merah", dengan Sneevliet-Bergsma sebagai representasi dari ISDV-VSTP.<sup>131</sup>

Poros ideologis kelompok SI merah dengan ISDV mulai terlihat ketika pada tahun 1918, Semaun dan Darsono dengan gencar mengkampanyekan

---

<sup>130</sup> Amelz, 1952, *H.O.S. Tjokroaminoto: Hidup dan Perjuangannya*, jilid 1, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 114.

<sup>131</sup> Zainul Munasichin, *op. cit.*, hlm. 81.

keberhasilan gerakan revolusioner Bholvevik Rusia pada tahun 1917.<sup>132</sup> Keberhasilan revolusi sosialis di Rusia pada bulan oktober 1917 ternyata memberikan semangat dalam perjuangan Semaun dan Sarekat Islam Semarang yang menggunakan konsep perjuangan sosialis revolusioner, dimana Semaun berkeyakinan bahwa kekuasaan pemerintah Belanda juga dapat di jatuhkan dengan gerakan sosialis revolusioner. Saat itu Semaun dan Darsono juga berstatus sebagai propagandis ISDV.

Secara formal PKI merupakan kelanjutan dari ISDV, yang diresmikan pada tanggal 23 Mei 1920 dengan nama Partai Komunis Hindia, Semaun terpilih sebagai ketua, Darsono sebagai wakil ketua, Bergsma sebagai sekretaris, Dekker sebagai bendahara dan Kraan sebagai anggota. Sejak berdirinya PKI banyak tekanan-tekanan yang dilakukan terhadap SI, hal ini sangat menyulitkan Tjokroaminoto dalam melakukan disiplin partai.

Karena pengaruh aliran sosialis-komunis dalam SI dianggap semakin membahayakan, maka pada kongres CSI V di Yogyakarta pada tanggal 2 sampai 6 Maret 1921, disiplin partai masih dalam pertimbangan dan masih belum diberlakukan bagi anggota PKI. Tjokroaminoto sendiri masih menghendaki adanya persatuan dalam tubuh SI, dengan pertimbangan banyak anggota SI yang merupakan anggota PKI. Semaun sendiri menentang dilakukannya disiplin partai. Pertimbangan disiplin partai ini akhirnya diserahkan kepada kongres CSI VI yang dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 10 Oktober 1921.<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup> Revolusi Bholvevik adalah sebuah gerakan revolusi kaum buruh dengan merebut kekuasaan dari tangan Tsar di Rusia, gerakan ini dimulai pada bulan Maret dan berakhir pada bulan November 1917.

<sup>133</sup> Deliar Noer, *op. cit.*, hlm. 140.

Pada kongres CSI VI, Tjokroaminoto masih belum bisa memimpin dikarenakan masih di dalam penjara yang terkena kasus *Afdeling B*. SI *afdeling B* merupakan SI yang bersifat rahasia dan terpengaruh paham komunis yang berkedudukan di Priangan, Jawa Barat. Tjokroaminoto terkena tuduhan karena dianggap telah memberikan kesaksian palsu tentang *Afdeling B*.<sup>134</sup> Akhirnya kongres dipimpin oleh Haji Agus Salim dan Abdoel Moeis, sehingga terjadi perdebatan antar kedua pemimpin melawan Semaun yang dibantu oleh Tan Malaka tentang paham sosialisme. Atas usul Haji Agus Salim dan Abdoel Moeis tentang disiplin partai mendapat dukungan terbanyak dalam kongres. Atas disiplin partai ini maka SI yang mendukung Semaun mengadakan kongres tersendiri di Semarang dengan keputusan tetap keluar dari CSI dan membentuk SI Merah.

Perselisihan antara CSI dengan SI Merah yang juga merupakan anggota PKI semakin meningkat. PKI menuduh bahwa CSI sebagai perkumpulan kapitalis dan sebaliknya CSI menuduh PKI sebagai perkumpulan yang tidak mempunyai agama semakin keras. Dan dalam kongres CSI VII yang dilaksanakan di Madiun pada tanggal 17 sampai 20 Februari 1923, bahwa disiplin partai benar-benar berlaku untuk PKI dan CSI diganti menjadi Partai Sarekat Islam (PSI).<sup>135</sup> Sejak saat itu Semaun mengkonsentrasikan perhatiannya pada PKI dan banyak pemogokan-pemogokan yang dilakukan hingga pada pemogokan yang terbesar pada tahun 1923.

Untuk merespon aksi-aksi buruh pemerintah kolonial mengadakan peraturan “Dewan Perdamaian Untuk Spoor dan Tram di Jawa dan Madura” yang

---

<sup>134</sup> Suhartono, 1994, *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, hlm. 52.

<sup>135</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

diharapkan dapat menjadi perantara bila terjadi perselisihan industrial. Namun pemerintah merasa, pemogokan yang diadakan dapat mengancam kekuasaan mereka, untuk mengantisipasi hal ini maka pemerintah mengeluarkan undang-undang larangan mogok. Undang-undang ini dikeluarkan tanggal 10 Mei 1923 yang dikenal dengan Artikel 161 bis.<sup>136</sup>

Artikel 161 bis *strafwetboek* yang berbunyi:

Barang siapa yang bertujuan untuk merusak ketertiban umum dan mengacaukan kehidupan ekonomi masyarakat, atau mengetahui bahwa tindakannya itu akan merusak ketertiban umum dan akan mengacau kehidupan ekonomi masyarakat, juga menyebabkan banyak orang mengabaikan atau menolak bekerja pada dinas di mana mereka telah terikat bekerja, dihukum dengan hukuman penjara paling lama lima tahun atau hukuman denda paling tinggi sebanyak f. 1000.<sup>137</sup>

Sinar Hindia pada tanggal 31 Mei 1923 No. 101 mengumumkan nama-nama yang ditangkap karena peristiwa pemogokan ini. Untuk daerah Semarang terdapat beberapa nama yaitu: Semaun, Sumantri, Sundoro, Abdulrahman, Sudibyso, Abdulazis, Wirjisutikno dan Ngadino. Semaun sendiri dengan *Gouvernement Besluit* tanggal 4 Agustus 1923 diputuskan diasingkan ke Timor, tetapi atas permintaannya, Semaun memilih untuk diasingkan ke Belanda. Semaun berangkat tanggal 18 Agustus 1923 dengan kapal ‘S.S. *Koningin der Nederlanden*’ dan baru kembali ke Indonesia pada tahun 1957.<sup>138</sup>

Banyaknya tokoh pergerakan bumiputera diasingkan ke luar Hindia Belanda dengan alasan dapat mengancam ketertiban umum, tidak terlepas dari

---

<sup>136</sup> Edi Cahyo, 2003, *Jaman Bergerak di Hindia Belanda: Mosaik Bacaan Kaoem Pergerakan Tempo Doeloe*, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta, hlm. xxi.

<sup>137</sup> Dewi Yulianti, *op. cit.*, hlm. 183-184.

<sup>138</sup> *Ibid.*, hlm. 186.

hak luar biasa yang dimiliki oleh Gubernur Jendral yang diatur dalam undang-undang kerajaan yaitu dalam artikel 35-37 *Indische Staatsregeling*, yang berisi:

Gubernur Jendral berhak:

- 1) Melarang seseorang bertempat tinggal disalah satu bagian di Indonesia ini.
- 2) Mengasingkan seseorang di salah satu tempat dalam bagian Indonesia ini.
- 3) Mengeluarkan seseorang dari tanah Indonesia.

Sedangkan wujud (isinya) peraturan-peraturan itu:

Pertama, diadakan perbedaan antara: Orang yang dilahirkan di Indonesia dan orang yang tidak dilahirkan di Indonesia.<sup>139</sup> Mengenai Hak luar biasa Gubernur Jendral, pernah mendapat mosi dari Budi Utomo, Sarekat Islam, Perserikatan Minahasa, SDAP, dan lain-lain, namun semuanya ditolak karena hak ini dianggap penting untuk mempertahankan wibawa seorang Gubernur Jendral.

## **B. Dalam Bidang Sosial.**

Sistem ekonomi liberal yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal tahun 1870, secara tidak langsung telah merubah sistem dan tata kehidupan masyarakat di Hindia Belanda, petani yang awal bekerja menggarap lahan pertaniannya sendiri berubah menjadi buruh dan kuli perkebunan pihak asing dan mulai melahirkan kesenjangan sosial antara kaum buruh dengan kaum pemilik perkebunan dengan kata lain adanya tuan dan pekerja.

Perbedaan perlakuan sering diterima oleh rakyat bumiputera, seperti yang dilansir oleh Oetoesan Hindia, pada pertengahan tahun 1915 yang menyebutkan

---

<sup>139</sup> Pitut Soeharto & Zainoel Ihsan, 1982, *Belunggu Ganas*, Aksara Jayasakti, Jakarta, hlm.234-235.

keheranan dari rakyat bumiputera karena seorang Indonesia dari Magelang dijatuhi hukuman berat karena mencoba merampok seorang wanita muda Eropa. Selain itu perlakuan tidak adil bagi rakyat bumiputera juga dilansir oleh harian Pantjara Warta bulan September 1914 dengan judul “Dia Cuma orang Jawa”, harian ini menerangkan seorang yang berkebangsaan Inggris yang telah mengalami kecelakaan kereta api di daerah Sumatra dan menerima ganti rugi sebesar lima puluh ribu gulden, sedangkan janda seorang juru api Jawa yang tewas dalam kecelakaan kereta api pada waktu yang sama hanya mendapat lima ribu gulden sebulan.<sup>140</sup>

SI juga memprotes adanya perbedaan penetapan gaji antara orang Eropa dan orang bumiputera dengan ijazah yang sama. Selain itu protes juga terjadi di dalam tubuh SI sendiri yang terkait dengan kehidupan pribadi kalangan priyayi tinggi. Kecaman tertuju pada batasan antara kader menengah yang terdiri dari priyayi rendahan, pedagang dan wakil-wakil yang lainnya, dengan kader tinggi yang terdiri dari keturunan kraton dan priyayi. Kritikan ini juga tertuju pada pola lapisan masyarakat yang tradisional yang mana kaum yang berasal dari priyayi memegang jabatan yang lebih tinggi, dengan kata lain kedudukan jabatan bukan berdasarkan pendidikan melainkan berdasarkan status sosial.

Persoalan “hatur sembah hormat” juga merupakan sebuah keharusan bagi bawahan kepada atasan, jika hal ini diabaikan tidak menutup kemungkinan seorang bawahan akan dicopot dari jabatannya sehingga kebiasaan ini terus tertanam dalam lingkungan pemerintah kolonial. Selain persoalan hormat,

---

<sup>140</sup> A.P.E. Korver, *op. cit.*, hlm. 45.

penggunaan bahasa juga sangat diatur, seperti penggunaan bahasa Jawa *ngoko* oleh atasan kepada bawahan walaupun ia bukan seorang Jawa, sedangkan bawahan harus menggunakan bahasa Jawa *Kromo Inggil* untuk bicara kepada atasannya yang merupakan orang Belanda. Kebiasaan hormat kepada atasan ini merupakan buatan kolonial sendiri, yang bertujuan untuk memperkuat kekuasaan dengan cara tetap mempertahankan tradisi pemerintahan bumiputera dalam hirarki pangreh praja, cara seperti ini juga berlaku dalam kantor-kantor pemerintahan dimana kaum bumiputera menjadi bawahan dari orang-orang Belanda.

Semaun yang bukan berasal dari golongan priyayi sering mendapat perlakuan yang tidak adil, secara nyata perlakuan tidak adil terlihat adanya perbedaan sekolah yang dikhususkan bagi rakyat bumiputera yang berasal dari kaum tani dan sebagainya, dengan sekolah yang diperuntukan bagi rakyat yang berasal dari golongan priyayi dan juga orang-orang Eropa. Namun Semaun sedikit dari rakyat bumiputera yang beruntung karena dapat mengenyam pendidikan model Barat yang dikhususkan bagi kaum priyayi. Setelah menamatkan sekolahnya Semaun memilih untuk memperjuangkan nasib rakyat yang sangat tertekan oleh sistem kolonial Belanda.

Tampilnya Semaun sebagai salah satu tokoh pergerakan ternyata sangat berpengaruh bagi tokoh-tokoh pergerakan bumiputera yang lainnya terlebih bagi mereka yang memandang kemerosotan kehidupan rakyat bumiputera dari segi sosial disebabkan sistem kemasyarakatan yang ditanamkan oleh pemerintah kolonial terlebih dalam hubungan antara para pekerja perkebunan (buruh) dengan

pemilik tanah (tuan tanah), dan antara rakyat bumiputera dengan orang-orang Eropa.

Ketimpangan-ketimpangan dalam masyarakat kolonial mulai dirasakan sebagai suatu hal yang harus ditata kembali untuk menciptakan masyarakat yang dinamis. Berbagai tindakan mulai dirasakan sebagai hal yang dapat menyinggung harga diri, seperti dalam hal memberi hormat: memberi sembah, duduk bersila di lantai, pemakaian bahasa tinggi kepada atasan, larangan memakai pakaian modern (Barat), kereta khusus bagi bumiputera, kamar tunggu di stasiun, dan dalam hal lainnya.<sup>141</sup>

Tahun 1917-1918 kehidupan masyarakat Hindia Belanda dari segi sosial semakin merosot, keadaan yang pincang semacam ini merupakan sebuah tantangan bagi kaum pergerakan bumiputera di Hindia Belanda. Para kaum pergerakan mulai mencari jalan penyelesaian atas kondisi sosial yang ada, surat-surat kabar yang terbit banyak mengkritik dan mengecam sistem yang telah ada sebelumnya. Konsep-konsep penyelesaian permasalahan yang ada mencoba menelusuri berbagai hal yang menyebabkan merosotnya kehidupan sosial masyarakat bumiputera, sebagian ada yang mengatakan kemerosotan ini dikarenakan kemajuan teknik, sebagian lagi mengeluarkan konsepsi kejahatan moral, dan ada juga yang menyalahkan orang Jawa (Indonesia), yang dianggap pemalas dan boros. Namun dari kelompok yang menggunakan analisa Marxisme,

---

<sup>141</sup> Dewi Yuliati, *op. cit.*, hlm. 27.

kesengsaraan rakyat ini adalah akibat dari struktur kemasyarakatan yang ada, yaitu struktur masyarakat tanah jajahan yang diperas oleh kaum kapitalis.<sup>142</sup>

Terpilihnya Semaun sebagai ketua Sarekat Islam Semarang menandakan adanya perubahan sistem kepemimpinan dari sistem kepemimpinan yang tidak terlalu keras beralih kepada sistem dan gerakan yang sangat radikal, perubahan ini tidak terlepas dari keadaan rakyat bumiputera yang sangat memprihatinkan serta semakin hari semakin tambah memburuk.

Wabah pes yang melanda kota Semarang dan sekitarnya pada awal tahun 1917 ternyata mendorong Semaun untuk melakukan perbaikan keadaan sosial masyarakat bumiputera khususnya di Semarang. Wabah pes yang melanda Semarang dan sekitarnya bermula dari lingkungan rakyat yang bekerja sebagai buruh dengan tempat tinggal yang sangat kumuh, gang-gang yang berjejal-jejal, sempit dan becek serta kondisi rumah yang hanya terbuat dari atap rumbia memungkinkan tempat bersarangnya tikus yang membawa penyakit. Wabah pes ini membawa ketakutan bagi rakyat dan telah menelan banyak korban, dalam setengah tahun dari seribu orang, 78% rakyat meninggal dikarenakan wabah ini.<sup>143</sup>

Untuk mengatasi penularan dan penyebaran wabah pes di Semarang dan sekitarnya maka pemerintah kolonial mengerakkan Kotapraja untuk membongkar pemukiman kumuh milik para buruh dan mereka hanya diberikan kesempatan 8 hari untuk pindah dan membangun pemukiman baru, namun dengan keadaan ekonomi yang kurang mengakibatkan penduduk tidak dapat membangun

---

<sup>142</sup> Soe Hok Gie, *op. cit.*, hlm. 16.

<sup>143</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

perumahan yang layak. Karena adanya desakan yang datangnya dari Semaun atas nama Sarekat Islam Semarang dan berbagai organisasi rakyat yang lain akhirnya pemerintah Kotapraja membangun juga tempat tinggal bagi kaum buruh ini.

Kelompok yang menggunakan analisis Marxisme dipelopori oleh ISDV di bawah pimpinan Sneevliet, memberikan jalan keluar atas kemiskinan yang menimpa rakyat bumiputera yaitu dengan konsep sosialisme, konsep ini dapat dijalankan dengan cara menasionalisasi perusahaan-perusahaan yang penting artinya bagi kehidupan rakyat secara umum. Dalam waktu yang singkat paham ini banyak menarik perhatian rakyat bumiputera yang merasa hidupnya memang telah lama tertindas.

Kelompok SI Semarang yang sejak di bawah kepemimpinan Semaun mulai berani menyerang pihak pemerintah yang dianggap sebagai alat dari kaum-kaum kapitalis, SI Semarang menyerukan tidak ada gunanya percaya pada janji-janji pemerintah, karena janji-janji pemerintah hanyalah mementingkan kaum kapitalis, terlebih dengan dibentuknya *Volksraad* dan *Indie Weerbaar* yang melindungi kaum kapitalis. Dengan adanya persatuan yang teguh antara rakyat-rakyat yang tertindas, dapat diciptakan sebuah kekuatan yang mampu memaksa Pemerintah/kapitalis agar tunduk pada tuntutan-tuntutan rakyat. Persatuan yang ditekankan disini yaitu persatuan antara bumiputera dan Tionghoa dan lain-lain, yaitu dengan mengambil pelajaran dari berbagai revolusi-revolusi sosialis yang terjadi di Eropa.<sup>144</sup> Untuk melawan penindasan-penindasan yang terjadi

---

<sup>144</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

diperlukan sebuah gerakan bawah tanah dan gerakan-gerakan teror terhadap pemerintah dan kaum kapitalis.

Semaun selalu menyerukan betapa pentingnya persatuan kaum buruh yaitu dengan ikut bergabung dalam perkumpulan karena dalam perkumpulan dapat memberikan keselamatan bagi orang banyak, selain menekankan perlunya perkumpulan di jaman sekarang, Semaun juga membandingkan dengan jaman kuno mengapa tidak ada perkumpulan:

Dalam zaman kuno itu hampir semua penduduk dapat bekerja dan hidup menurut kehendaknya sendiri, sesuai dengan kepintarannya dan kesenangannya hatinya sendiri, sehingga mereka mampu mencari makan sendiri, banyak atau pun sedikit.

....semua orang dalam mata pencarian dan penghidupannya merdeka dan kuasa, menjadi tuannya bagi dirinya sendiri, maka pada zaman itu tidak perlu ada perkumpulan.<sup>145</sup>

Dalam kongres CSI II, Semaun dan anggota Sarekat Islam Semarang yang lain mencoba mempengaruhi para peserta kongres dengan konsep-konsep perubahan sosial yang belakangan mengalami kemerosotan, penyebaran ide-ide Marxis ini sangat ditentang oleh Abdoel Moeis yang sejak awal memang menjadi lawan politik Semaun.

Setelah kongres selesai, SI Semarang mengorganisasi kaum buruh agar bergerak lebih militan dan mengadakan pemogokan-pemogokan terhadap perusahaan-perusahaan yang bertindak sewenang-wenang terhadap para pekerjanya. Pemogokan yang pertama organisasi oleh SI Semarang adalah pemogokan terhadap perusahaan mebel yang memecat 15 orang buruhnya. Semaun dan Kadarisman memproklamasikan pemogokan dan menuntut tiga hal,

---

<sup>145</sup> Semaon, 2000, *Penuntun Kaum Buruh*, Jendela, Yogyakarta, hlm. 5-6.

yaitu pertama, pengurangan jam kerja dari 8,5 menjadi 8 jam; kedua, selama mogok gaji dibayar penuh; dan ketiga, setiap yang dipecat, diberi uang pesangon 3 bulan gaji. Pemogokan ini ternyata merupakan senjata yang ampuh, dalam waktu 5 hari saja pemilik mebel menerima tuntutan SI Semarang.

Melihat keberhasilan dari pemogokan yang dilakukan, maka SI Semarang sebulan kemudian kembali menghimpun kekuatan untuk melakukan mogok terhadap sebuah bengkel mobil, pemogokan ini dikarenakan seorang mandor yang melakukan pemukulan terhadap para pekerjanya, SI Semarang beserta para pegawai lainnya akan terus melakukan pemogokan jika tidak diambil tindakan, beberapa hari kemudian pemogokan yang diorganisir oleh SI Semarang ini ditanggapi oleh pemilik bengkel tersebut.<sup>146</sup> Tuntutan SI Semarang menyangkut pesangon yang diberikan kepada pegawai sebesar tiga bulan gaji, pegawai pegawai bekerja selama 8 jam setiap hari dengan 1 jam istirahat untuk makan dan 1 setengah jam pada hari Jum'at untuk keperluan sembahyang, meminta kenaikan gaji bagi yang sudah bekerja dalam 1 tahun dan kenaikan gaji tiap tahunnya.<sup>147</sup> Dan tuntutan SI Semarang ini dipenuhi oleh majikan pemilik bengkel "Ott". Selain itu di Semarang sendiri pemogokan dilakukan terhadap pabrik semen dan ubin, di pabrik rokok, di Nieuwe Courant, yang masing-masing menuntut kenaikan gaji dan pada umumnya tuntutan ini dapat dipenuhi. Keberhasilan pemogokan yang dilakukan oleh Sarekat Islam Semarang kemudian diikuti oleh pemogokan-pemogokan di kota-kota lain seperti di Batavia, Surabaya, Bandung, kaum buruh yang melakukan pemogokan memandang Sarekat Islam sebagai

---

<sup>146</sup> Soe Hok Gie, *op. cit.*, hlm. 23-24.

<sup>147</sup> Dewi Yuliati, *op. cit.*, hlm. 169.

pedoman dan hal yang terpenting, pemogokan menjadi sebuah senjata yang ampuh untuk melakukan tuntutan kepada para majikan.

Berhasilnya pemogokan-pemogokan yang dilakukan ternyata mendorong SI Semarang semakin bersemangat untuk terus memperjuangkan kaum buruh dan melawan tuan-tuan tanah. Langkah awal untuk melawan para tuan-tuan tanah ini, pihak SI Semarang menulis surat terbuka terhadap tuan-tuan tanah yang ada di Semarang, surat ini meminta tuan-tuan tanah agar bersedia untuk menjual tanah-tanahnya kepada pihak pemerintah dan pemerintah diminta untuk mengurangi 50% dari harga sewa tanah sebelumnya. Namun karena adanya aksi sepihak dari para petani dan hal ini menyulitkan pihak SI Semarang, sehingga secara garis besar perjuangan melawan tuan-tuan tanah ini dinyatakan kurang berhasil dan semenjak itu perjuangan untuk melawan tuan-tuan tanah tidak pernah dilakukan oleh SI Semarang.

Pada bulan April 1918, SI Semarang kembali dihadapkan pada persoalan pemogokan yang cukup sulit. Dimana SI Semarang harus menangani pemogokan yang terjadi di *Nieuwe Courant*, sebuah harian dimana terdapat juga percetakan. Perjuangan pemogokan ini merupakan sebuah pemogokan yang paling lama dan paling sengit, hal ini dikarenakan majikan yang tidak menyerah pada tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh SI Semarang. Pemogokan ini berlangsung hingga Juli, namun pihak pengelola tetap tidak bersedia mengabulkan tuntutan SI Semarang, di sisi lain biaya yang dikeluarkan oleh SI Semarang selama pemogokan berlangsung sangat besar, pemogokan ini secara moril merupakan

kekalahan bagi SI Semarang, dan ini kekalahan yang kedua kalinya yang harus diterima oleh SI Semarang dan kaum buruh.

Untuk memperbaiki kehidupan rakyat terutama kaum buruh dan tani, maka rakyat harus bergabung dalam sebuah perserikatan, mengenai hal ini Semaun menjelaskan:

Sekolah-sekolah dibuka, rakyat memperoleh pengetahuan dan pengertian, terus pikirannya dan pandangannya terbuka, kemudian mereka bangkit, dan sejak itu pula rakyat sering berkumpul untuk merumuskan usaha-usaha agar kerusakan-kerusakan di Indonesia dapat diperbaiki. Jadi, sesudah rakyat bangkit dan sering berkumpul, maka untuk memperkuat diri maka didirikanlah “perserikatan”.<sup>148</sup>

Setelah kongres CSI III maka timbul ide untuk mengaktifkan pekerjaan di kalangan kaum buruh, dan sebagai realisasinya maka pada Mei 1919 di Bandung diadakan kongres PPPB (Perserikatan Pegawai Pengadaian Boemipoetra) yang dipimpin oleh Sosrokardono, kongres tersebut mengajak kepada Sarekat-Sarekat buruh untuk memperkuat diri dalam sebuah *Vakbond* (perkumpulan). Pada bulan-bulan pertama tahun 1919, perhimpunan masa diintensifkan. Sarekat Islam seksi perempuan dibentuk dan berhasil menghimpun 3041 anggota. Sebenarnya kegiatan ini telah mulai dibina oleh SI sejak bulan September 1918. salah satu cara untuk menggerakkan massa kaum perempuan ini, dikobar-kobarkan jika selama ini kaum perempuan diperlakukan sewenang-wenang baik di pasar maupun ditempat lain.

Selain memperjuangkan kaum perempuan, Sarekat Islam Semarang juga tidak melupakan golongan terendah dari masyarakat kota khususnya di Semarang,

---

<sup>148</sup> Semaon, *op. cit.*, hlm.21.

golongan terendah ini sering dikenal dengan kaum jembel dan sangat ditakuti oleh orang-orang Eropa. Kaum yang tidak mempunyai apa-apa ini dengan sendirinya mempunyai keberanian yang lebih besar, untuk bertindak kaum ini sangat mudah digerakkan. Dan atas inisiatif pimpinan Sarekat Islam, maka pada bulan Februari didirikanlah Sarekat Kere, yang menjadi pimpinannya adalah Kromoleo, sedangkan aktor intelektualnya ialah Partoatmodjo. Tujuan didirikannya Sarekat Kere ini guna menghimpun orang-orang yang selalu miskin dan tidak punya “bondo”, tanpa memandang golongan. Dalam Sarekat Kere ini juga dihimpun orang-orang “bumiputera Tionghoa” yang “tumpah darahnya” di Hindia. Sedangkan orang-orang kaya tidak diterima untuk menjadi anggota dan hanya diijinkan untuk menjadi penyumbang.<sup>149</sup>

Dalam kongres CSI IV yang menjadi topik pembicaraan adalah perlunya mendirikan sebuah organisasi sentral kaum buruh, serta memberikan pengarahan-pengarahan tentang cara-cara mogok, pemogokan ini hanya diadakan bila langkah-langkah dengan cara damai telah menemui jalan buntu, serta cukup berbagai alasan dan menjamin kemenangan di pihak buruh. Sebagai bentuk dari keinginan untuk memperjuangkan kaum buruh, tidak sedikit pemimpin-pemimpin SI yang bergabung dengan serikat-serikat sekerja. Seperti yang dilakukan oleh Surjopranoto selain menjadi ketua Serikat Sekerja Pengadaian tahun 1919, Surjopranoto juga mendirikan *Personeel Fabriek Bond* (PFB) pada tahun 1919, yaitu sebuah serikat kerja gula.<sup>150</sup>

---

<sup>149</sup> Suhartono, *op. cit.*, hlm. 36.

<sup>150</sup> Deliar Noer, *op. cit.*, hlm. 135.

Sebagai realisasi dari keputusan kongres CSI IV tersebut maka Semaun dan tokoh-tokoh SI Semarang yang lainnya mengambil inisiatif menyebarkan undangan kepada seluruh organisasi buruh untuk ikut dalam pertemuan yang diadakan di Yogyakarta pada akhir Desember 1919. Tujuan dari pertemuan ini untuk membentuk *revolutionere Socialistisct Vakcentrale di Hindia*. Pertemuan ini berjalan tegang dimana adanya perbedaan pendapat mengenai nama organisasi yang akan didirikan. Selama berjalannya sidang, terus terjadi perbedaan pendapat antara kubu Semaun dengan kubu Surjapranoto dan Haji Agus Salim. Semaun mengusulkan agar nama organisasi menggunakan *Revolutionere*, namun ditolak oleh kubu Haji Agus Salim, dan akhirnya disepakati menggunakan nama Persatuan Pergerakan Kaum Buruh (PPKB).<sup>151</sup> Semaun terpilih sebagai ketua sedangkan Surjapranoto terpilih sebagai wakil ketua, Najoan sebagai sekretaris, dan Bergsma sebagai bendahara, susunan kepengurusan ini berlaku sampai pada pembentukan pengurus tetap dalam kongres resmi tahun berikutnya.<sup>152</sup> Surjapranoto menginginkan agar pusat dari PPKB berada di Yogyakarta, sedangkan menurut Semaun usul dari Surjapranoto tersebut merupakan suatu usaha untuk mengeluarkan orang-orang komunis, hal ini juga mengingat Surjapranoto merangkap sebagai wakil ketua CSI, namun akhirnya PPKB berpusat di Semarang.

Tujuan didirikan PPKB berdasarkan anggaran dasarnya yaitu: “bermaksud dan mengajak persatuan antara sederajat kaum buruh supaya dapat suatu kekuasaan; kekuasaan itu akan dipergunakan umumnya untuk

---

<sup>151</sup> Soe Hok Gie, *op. cit.*, hlm. 40.

<sup>152</sup> Budiawan, 2006, *Anak Bangsaawan Bertukar Jalan*, LKiS, Yogyakarta, hlm. 103.

memperhatikan keperluan kaum buruh dalam perkaranya lahir dan batin, yang pertama keperluannya *lidnya vakbond* yang sudah bersatu dalam PPKB”. Sedangkan untuk mencapai hal tersebut: PPKB akan memasak itu dengan 3 jalan yang ada, yaitu: berikhtiar mendapat kuasa dalam pemerintahan negeri supaya negeri terperintah – oleh – rakyat – sendiri mengurus jalannya rejeki” (sosial demokratis politik), mengeratkan kaum buruh dalam pekerjaannya guna merobah nasibnya” (*vakstrijd*), mengadakan perdagangan – oleh – dan – buat – rakyat (koperasi).<sup>153</sup>

Pada bulan-bulan selanjutnya dibentuklah cabang-cabang PPKB di seluruh Jawa. Usul pembentukan cabang-cabang itu muncul dari pemimpin-pemimpin lokal serikat buruh kereta api, serikat buruh pengadaian, dan serikat buruh gula. Langkah awal mereka adalah mengumpulkan dana pemogokan dari masing-masing anggota. Dengan kata lain lahirnya cabang-cabang PPKB hampir diseluruh Jawa pada pertengahan tahun 1920 sangat berkaitan dengan banyak aksi pemogokan yang terjadi hampir dalam kurun waktu bersamaan.

Kongres I PPKB dilaksanakan di Semarang pada tanggal 1 Agustus 1920, yang membahas mengenai rencana menghimpun buruh secara besar-besaran guna melakukan pemogokan umum. Namun gagasan Surjapranoto ini kurang mendapat dukungan dari Semaun sebagai ketua. Semaun dan yang lainnya menolak ide untuk melakukan pemogokan umum karena mereka merasa dilangkahi oleh Surjapranoto.<sup>154</sup>

---

<sup>153</sup> Sandra, 1961, *Sedjarah Pergerakan Buruh Indonesia*, Pustaka Rakjat, Djakarta, hlm. 22.

<sup>154</sup> *Ibid.*, hlm. 111.

Karena tidak terdapat jalan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh PPKB maka pada Juni 1921 Semaun menyatakan PPKB bubar, ketegangan ini bermula dari awal berdirinya PPKB yang terkait dengan pemberian nama dan adanya ketidakpuasan dari masing-masing pihak, baik itu pihak yang menginginkan sebuah organisasi yang revolusioner dengan pihak yang tidak setuju dengan organisasi revolusioner. Setelah menyatakan PPKB bubar maka Semaun mendirikan organisasi baru yang bernama *Revolutionaire Vakcentrale*, sebuah nama yang sebelumnya pernah diusulkan Semaun untuk nama PPKB. Sedangkan dipihak lain Surjopranoto tidak terima atas pembubaran PPKB yang dilakukan secara sepihak oleh Semaun, dan untuk menanggapi masalah ini maka pada tanggal 3 Juli 1921 Surjopranoto mengadakan rapat dan menegaskan bahwa PPKB masih berlanjut, sedangkan Semaun dan kawan-kawan yang lain dinyatakan keluar dari PPKB.<sup>155</sup>

Di Semarang usaha untuk mengorganisasi kaum buruh telah dilakukan jauh sebelum dibentuknya PPKB, organisasi ini bernama Perkumpulan Kaoem Boeroeh Semarang (PKBS) yang didirikan pada bulan Maret 1919. organisasi ini dipelopori oleh kaum sosialis revolusioner yang menginginkan adanya sentral organisasi buruh di Semarang, namun organisasi ini tidak berjalan dengan baik. Sedangkan disisi lain pemerintah kolonial Belanda mulai mewaspadai gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kaum buruh Semarang.

Perjuangan melawan kaum majikan yang disokong oleh Pemerintah, terjadi kembali pada bulan Februari 1920. 400 orang kaum buruh *van Dorp*

---

<sup>155</sup> Deliar Noer, *op. cit.*, hlm. 135.

mogok yang mendapat dukungan juga dari buruh-buruh percetakan yang lainnya. Untuk membicarakan pemogokan ini maka diadakan pertemuan dari tokoh-tokoh buruh percetakan yang diorganisasi oleh SI Semarang. Semaun sebagai ketua SI Semarang berhasil menghimpun kekuatan yang anti kolonial. Usul juga datang dari ISDV, ISDP dan NIP agar dibentuk sebuah sentral buruh percetakan. Pemogokan ini meluas hingga ke percetakan *De Locomotif*, *Mist*, Benyamin, Bischof dan Warna Warta, yang merupakan percetakan Koran-koran yang anti Sarekat Islam. Para pemogok telah berjumlah mencapai 1000 orang dan SI Semarang harus bekerja keras untuk membayar uang tunjangan kepada para pemogok. SI Semarang mulai mengerahkan *fond-fond* (penyumbang dana) baik itu *fond* yang secara terang-terangan menyumbang sampai pada *fond-fond* rahasia. Jika SI Semarang melakukan pemogokan biasanya ada penyumbang yang menyumbang hingga beribu-ribu gulden, seperti yang dilakukan oleh Haji Busro seorang pedagang kayu sekaligus menjabat sebagai komisaris SI Semarang dan Soemitro, seorang pengusaha kretek di kudu yang menyumbang 3000 gulden, selain itu seorang pengusaha bank Tionghoa di Semarang menyumbang 5000 gulden karena sering dihina oleh Koran *De Locomotif*. Para pengusaha inilah yang menjadi tulang punggung SI Semarang dalam bidang keuangan. Pemogokan *van Dorp* dan *De Locomotif* ini adalah salah satu pemogokan yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Pemogokan ini juga mengakibatkan buku-buku Marco dan toko buku SI Semarang disita dan diikuti dengan penangkapan Marco.<sup>156</sup>

---

<sup>156</sup> Soe Hok Gie, *op. cit.*, hlm. 41.

Selain Marco, pemogokan ini juga mengakibatkan banyaknya tokoh-tokoh SI Semarang yang masuk dalam daftar orang yang ditangkap, Semaun ditangkap pada tanggal 8 Mei 1923 dengan tuduhan menyebarkan kata-kata yang mengundang simpati dan tulisan-tulisan yang bernada mengundang untuk melakukan pemogokan.

### **C. Dalam Bidang Ekonomi.**

Sejak diberlakukannya sistem liberal maka sistem perkebunan di Hindia Belanda juga mengalami perubahan, yaitu mulai dikenalnya sistem kerja upah, dan perkebunan tidak hanya dimonopoli oleh pihak pemerintah tetapi juga pihak swasta diberikan kebebasan untuk mengelola perkebunan. Dengan adanya kebebasan ini pihak swasta berlomba-lomba untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun di satu sisi kebijakan pemerintah ini tidak memberikan keuntungan bagi rakyat bumiputera yang bekerja sebagai buruh perkebunan.

Seperti yang tercantum dalam anggaran dasar SI, salah satu tujuan didirikannya SI yaitu memajukan jiwa dagang di kalangan bumiputera, oleh sebab itu pada awal berdirinya SI sangat gencar dalam melakukan propaganda dan membuka cabang di berbagai daerah. Pembukaan cabang SI ini biasanya disertai dengan membuka toko-toko SI yang berupa koperasi, niat baik SI ini disambut antusias oleh rakyat yang berada dalam garis kemiskinan, namun usaha SI ini kurang berhasil.

Dengan upah yang kecil semakin menyulitkan kehidupan rakyat, sedangkan hasil produksi perkebunan tebu semakin meningkat hal ini terlihat dari

data, dimana pada tahun 1900 hasil produksi tebu (gula) berjumlah 744.257 ton, di tahun 1915 menjadi 1.319.087 ton, tahun 1916 berjumlah 1.629.827, dan pada tahun 1917 meningkat lagi menjadi 1.822.188. Melihat data tersebut lahan perkebunan semakin meluas setiap tahunnya namun sebaliknya lahan persawahan rakyat semakin kecil dan ini memicu melonjaknya harga beras, kenaikan harga beras diperparah dengan terhambatnya hubungan antara Hindia Belanda dengan negeri-negeri penghasil beras di kawasan Asia Tenggara sebagai akibat dari Perang Dunia I.<sup>157</sup>

Jurang yang ada antara kaum yang punya dengan kaum yang tidak punya, makin bertambah luas hal ini dikarenakan timbulnya krisis-krisis dalam bidang ekonomi yang memang sudah menjadi watak dari kehidupan kapitalistis. Seiring dengan perkembangan waktu krisis tersebut semakin meluas dan menjadi sebuah ancaman bagi rakyat. Hal ini menyebabkan rakyat pada umumnya semakin kehilangan kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.<sup>158</sup>

Pemanfaatan lahan-lahan persawahan menjadi kebun-kebun tebu mengakibatkan kehidupan rakyat menjadi semakin sulit, keadaan semacam ini memaksa para petani untuk mencari pekerjaan ke kota dan kesempatan untuk bekerja bagi mereka hanya menjadi buruh. Jika tidak pergi mengadu nasib ke kota mereka menjadi kuli perkebunan dengan gaji 20 sampai 40 sen per hari, para kuli ini bekerja sebagai penggali lubang untuk keperluan perkebunan dengan upah 3 sen per lubang, tetapi jika para majikan tidak puas atas hasilnya maka upahnya dikurangi separuh. Selain itu untuk mencukupi keperluan sehari-hari tak jarang

---

<sup>157</sup> Soe Hok Gie, *op. cit.*, hlm. 7.

<sup>158</sup> Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam, 1985, *Tafsir Program Asas dan Program Tandhim Syarikat Islam*, Lajnah Tanfidziah, Jakarta, hlm. 27.

para ibu-ibu menjual anak-anak mereka di pasar. Makanan mereka juga telah beralih ke jagung dan akar pisang.<sup>159</sup> Keadaan ini menyebabkan banyaknya kebun-kebun tebu yang dibakar dan dirampas oleh para petani. Kenyataan-kenyataan yang demikian membangkitkan rasa amarah dan jiwa muda Semaun untuk mengusir pemeras dan penjajah dari kawasan Hindia Belanda.

Secara garis besar kehidupan rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan, mengenai hal ini Semaun menjelaskan: “karena yang menjadi kaum saudagar dan tuan pabrik kebanyakan adalah bangsa lain, sedangkan rakyat Indonesia cenderung bersabar dan tidak begitu bernafsu mengeruk kekayaan, maka yang rugi dan menjadi miskin adalah rakyat Indonesia”.<sup>160</sup>

Garis perjuangan Sarekat Islam Semarang dalam menentang kapitalisme sudah dicanangkan sejak kongres CSI yang ke-II. Hal ini terlihat dari hasil kongres tersebut; “mengingat sangat roesaknja hidoepnja sebagian terbesar dari rajat boemipoetera, maka CSI mengharap hantjornja kapitalisme jang djahat”, Tjokroaminoto yang berada dalam perlindungan pemerintah, mulai berani untuk mengeluarkan kata-kata yang militan: sama rasa, menentang kapitalis, dan menentang dominasi pihak asing terhadap pihak lain. Kata-kata yang diungkapkan oleh Tjokroaminoto merupakan kata-kata yang sering digunakan oleh kelompok Sarekat Islam Semarang seperti Semaun, Darsono, dan Marco.<sup>161</sup>

Dalam Sinar Hindia Semaun memaparkan kehidupan rakyat:

“kaoem boeroeh mendapat belandja moerahan-moerahan sebab terpaksa, harga barang-barang keperluan selaloe naik-naik sadja, pemerintah menambahi padjeg-padjegnja rakjat. Rakjat tambah miskin, kaoem oeng

---

<sup>159</sup> Dewi Yuliati, *op. cit.*, hlm. 44.

<sup>160</sup> Semaun, *op. cit.*, hlm. 16-17.

<sup>161</sup> Dewi Yuliati, *op. cit.*, hlm.139.

Belanda dan perkakasnja (pemerintah) inilah jang perloe didjaga dengan mengoeati pendjagaan Hindia, dan bukan rakjat Hindia jang melarat itoe”.<sup>162</sup>

Dari pernyataan yang sering dituangkan dalam Sinar Hindia, terlihat bahwa Semaun sangat menentang kapitalisme dan segala bentuk kebijakan dari pemerintah yang melindungi kepentingan kaum kapitalis. Menurut Semaun untuk dapat bertahan hidup rakyat Hindia Belanda harus tergabung dalam serikat-serikat sekerja, seperti yang dikatakannya:

Peraturan pemerintah dalam zaman perdagangan ramai ini dapat merugikan kepentingan rakyat....

Agar rakyat tidak benar-benar hancur maka harus ada aturan tentang pemerintahan . atas dasar itu pula maka berdirilah perkumpulan-perkumpulan politik....

Perkumpulan-perkumpulan politik itu berniat menyusun kekuatan dengan kelompok-kelompok lain supaya memiliki pengaruh dan mampu memerintah.

Oleh sebab itu manusia yang mau menjaga kepentingan orang-orang yang bukan saudagar , kemudian mengajak untuk berikhtisar supaya yang bukan saudagar itu bisa mengurus sendiri perdagangan di Indonesia lewat kerja sama dengan teman-teman untuk mendirikan koperasi.

Oleh sebab itu kaum buruh kemudian bersama-sama mendirikan perkumpulan dalam pekerjaannya.<sup>163</sup>

Semaun juga menjelaskan apa bila ketiga perkumpulan tersebut sudah dijalankan maka akan memberikan keuntungan bagi rakyat Indonesia, mengenai hal ini Semaun menjelaskan: jadi ketiga jenis perkumpulan, baik yang bernuansa politik, koperasi, maupun serikat buruh (*Vakbond*), sama-sama maupun menjaga, memperbaiki, dan memakmurkan rakyat Indonesia.<sup>164</sup>

Pada bulan Februari 1918, berkaitan dengan kehidupan rakyat, Semaun atas nama Sarekat Islam Semarang menyiarkan surat permohonan kepada

<sup>162</sup> *Ibid.*, hlm. 154-155.

<sup>163</sup> Semaun, *op. cit.*, hlm. 24-27.

<sup>164</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

Gubernur Jenderal mengenai penurunan harga beras dan pengurangan lahan perkebunan tebu, tembakau, teh dan kopi. Sarekat Islam juga menghimbau kepada surat kabar bumiputera agar memuat surat permohonan itu, hal ini bertujuan agar permohonan yang telah disepakati dalam rapat SI Semarang tersebut dapat diketahui oleh masyarakat luas. Permohonan SI Semarang ini tidak terlepas dari kenaikan harga beras di pasar-pasar Semarang. Semaun juga menambahkan penyebab dari kenaikan harga beras ini dipicu oleh semakin sedikitnya lahan-lahan pertanian rakyat yang menghasilkan beras.<sup>165</sup>

Menjelang pertengahan tahun 1918, persiapan untuk kongres CSI III telah dipersiapkan oleh SI Semarang, dalam sebuah rapat anggota, bahwa yang akan menjadi perwakilan SI Semarang untuk ikut dalam rapat CSI adalah Semaun, Darsono, Kasrin, Kadarisman, Soepardi dan Sugeng. Adapun tugas yang harus dijalankan oleh perwakilan ini memperjuangkan keringanan pajak untuk rakyat dan pemberatan pajak bagi kaum kapitalis. Mengenai kapitalisme hasil kongres menyepakati bahwa perusahaan-perusahaan besar yang banyak mendatangkan keuntungan harus dinasionalisasikan, namun jalannya kongres ini tidak terlepas dari pertentangan antara Semaun dengan Abdoel Moeis.

Harga beras mengalami kenaikan dramatis antara tahun 1918 sampai 1920, sedangkan upah yang diterima oleh para buruh harian tidak lebih dari 50 sen per hari, jika dibanding dengan harga beras yang mencapai f 12-f 13 perpikul<sup>166</sup> maka sangat memberatkan kehidupan rakyat. Mengenai ketidak seimbangan antara harga beras dan upah para buruh, Semaun dalam Sinar Hindia tanggal 25 Januari

---

<sup>165</sup> Dewi Yuliati, *op. cit.*, hlm. 160.

<sup>166</sup> 1 pikul ± 15 kilo sekarang.

1919, mengatakan di daerah Pemalang dan Rembang banyak orang mati karena kelaparan. Untuk itu Semaun mempertanyakan: “Oh, *suikerbende*, apakah perboetanmoe ini boekan *moorden*?” (Oh, gerombolan pengusaha gula, apakah perbuatanmu ini bukan pembunuh?).<sup>167</sup>

Keadaan rakyat Hindia Belanda yang memperhatikan membangkitkan semangat Semaun untuk berjuang melawan kaum kapitalis, seperti yang dilakukannya lewat berbagai organisasi politik seperti Sarekat Islam Semarang sampai Partai Komunis Indonesia dari kurun waktu 1917 sampai 1923, lewat berbagai aksi pemogokan dan tulisannya di media massa. Tetapi pasca tahun 1923 Semaun tidak dapat memimpin berbagai pergerakan dan pemogokan, hal ini dikarenakan pengasingan dirinya yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda.

---

<sup>167</sup> *Ibid.*, hlm. 162.

## BAB IV

### PENGARUH SEMAUN DALAM SAREKAT ISLAM SAMPAI PARTAI KOMUNIS INDONESIA TAHUN 1914-1923

#### A. Menciptakan PKI Sebagai Partai Modern Kebangsaan.

Pada awal tahun 1920 ISDV menerima surat dari Haring, nama samaran Sneevliet di Canton, Shanghai, setelah ia dibuang ke luar Hindia Belanda. Haring (Sneevliet) menganjurkan agar ISDV menjadi anggota Komintern. Agar dapat menjadi anggota Komintern, ISDV harus memenuhi 21 syarat, diantaranya ISDV harus memakai nama terang partai komunis dan menyebut nama negaranya. menanggapi surat ini Semaun kemudian mengirimkan surat tembusan kepada tokoh-tokoh ISDV, termasuk juga kepada Darsono yang masih di penjara di Surabaya. Dalam kunjungan Hartog kepenjara, Darsono menyatakan setuju atas usul tersebut dengan menambahkan dua usul:

1. Manifest yang ditulis Marx-Engels dinamai Manifest Komunis dan bukan Manifest Sosial Demokrat.
2. Rakyat Indonesia tidak dapat membedakan antara ISDV yang revolusioner dengan ISDV yang evolusioner.

Tetapi usul tersebut ditolak oleh Hartog yang pada waktu itu menjadi ketua ISDV setelah Sneevliet di buang keluar Hindia Belanda.<sup>168</sup>

Secara formal PKI merupakan kelanjutan dari ISDV, untuk membicarakan perubahan tersebut maka diadakan Kongres Istimewa yang dihadiri oleh 40 orang

---

<sup>168</sup> Soe Hok Gie, *op. cit.*, hlm. 42.

yang berasal dari kalangan bumiputera semua. Kongres berlangsung tegang karena ada pihak yang menolak menggunakan perintah Komintern, jika menggunakan Komintern dikhawatirkan PKI di Indonesia nantinya akan berada dalam pengaruh orang Rusia. Menanggapi permasalahan semacam ini Semaun menjelaskan bahwa Komintern bukanlah milik orang Rusia jadi orang Rusia tidak berhak untuk menentukan bangsa lain. Dan perubahan nama tersebut hanyalah merupakan disiplin organisasi. Mendengar penjelasan Semaun yang sangat meyakinkan maka sidang menerima perubahan nama tersebut. Maka tanggal 23 Mei 1920 lahirlah Partai Komunis Hindia, yang diketuai oleh Semaun, Darsono sebagai wakil ketua, Bergsma sebagai sekretaris, Dekker sebagai bendahara dan Kraan sebagai anggota.<sup>169</sup> Perubahan nama dari PKH menjadi PKI berdasarkan pada aktualisasi kebutuhan dan gerakan politik. Sedangkan perubahan nama dari Hindia menjadi Indonesia disesuaikan dengan bahasa setempat.<sup>170</sup>

Pada tanggal 24 Desember 1920, PKI mengadakan kongres istimewa, dari hasil kongres ini diambil sebuah keputusan yaitu memasukkan PKI ke dalam sebuah Komisi Internasional yang lebih dikenal dengan Internasionale Komunis (Komintern) dan menjadi satu seksi.<sup>171</sup> Dalam kongres tersebut Semaun juga menegaskan bahwa pergerakan rakyat Hindia Belanda dilakukan guna membangun kapitalismenya sendiri sesuai dengan anggaran dasar SI pada awal berdirinya. Karena anggaran dasar SI yang sekarang dianggap oleh kaum komunis telah berpihak pada kaum kapitalis.

---

<sup>169</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

<sup>170</sup> Ruth Thomas McVey, 1965, *The Rise Of Indonesian Communism*, Cornell University Press, Ithaca, New York, hal. 46-47.

<sup>171</sup> A.K. Pringgodigdo, *op. cit.*, hlm. 26.

Dengan adanya kebijakan disiplin partai, pihak kaum komunis berusaha untuk menarik anggota-anggota SI yang sama-sama berhaluan komunis. Walaupun usaha kaum komunis tidak berhasil untuk menarik semua anggota SI kedalam PKI tetapi beberapa sekolah pindah tangan ke PKI dan pihak PKI lebih leluasa untuk melakukan propaganda dengan faham komunisnya.

Dalam kongres PKI yang dilaksanakan pada tanggal 24-25 Desember 1921, menyatakan bahwa PKI secara terang-terangan mengakui Lenin dan Trotsky sebagai pahlawannya. Kongres ini dipimpin oleh Tan Malaka, karena Semaun sebagai ketua masih berada di luar negeri pada bulan Oktober 1921 guna merapatkan hubungan dengan Moskow. Pada kongres itu diambil keputusan untuk menyusun cabang-cabang SI yang keluar dari CSI dalam satu Centrale SI Merah guna menantang SI Putih di bawah pimpinan Tjokroaminoto.

Dalam kongres yang dilaksanakan di Surabaya tahun 1921, Semaun mengatakan bahwa PKI mampu untuk mempersatukan rakyat, baik muslim maupun bukan muslim. Semaun juga mengatakan PKI didirikan untuk kepentingan umum dari rakyat seluruhnya, oleh sebab tidak semuanya rakyat yang menganut Islam. Selain itu Semaun juga menunjukkan bagaimana usaha-usaha orang komunis yang telah mengubah Sarekat Islam dari partai yang “mulanya kapitalis” menjadi sebuah partai yang lebih mementingkan rakyat.<sup>172</sup>

Kaum komunis sangat menentang segala bentuk penjajahan dan penindasan, imperialisme dan kapitalisme. Dengan paham seperti ini kaum komunis menekankan dua hal, pertama keadaan rakyat umum yang sangat miskin

---

<sup>172</sup> Deliar Noer, *op. cit.*, hlm. 140.

dan selalu menjadi perhatian banyak pihak, kedua rakyat yang hidup dalam penindasan selalu menginginkan adanya perubahan demi penghidupan yang lebih baik. Dengan pergerakan yang selalu membela rakyat, kaum komunis mulai menarik simpati dikalangan rakyat Hindia Belanda secara umum terlebih bagi rakyat-rakyat miskin. Semaun juga mengatakan tujuan yang utama dari paham sosialis-komunis yaitu terjadinya suatu perubahan dalam hidup masyarakat dan perubahan susunan produksi menjadi sosialis.<sup>173</sup>

Tidak lama sesudah kongres, Tan Malaka diasingkan ke luar negeri dengan alasan sebagai pemimpin dalam pemogokan pegawai rumah gadai Negeri pada bulan Januari 1922. Setelah Tan Malaka diasingkan, Semaun tiba di Hindia Belanda, tepatnya tanggal 24 Mei 1922 setelah dari perjalanannya ke Shanghai dan Moskow guna menghadiri kongres kaum buruh dari timur jauh yang dilaksanakan pada bulan Januari 1922.<sup>174</sup>

Dalam rapat yang diselenggarakan pada tanggal 4 Juni 1922, Semaun mengatakan bahwa di Rusia dengan metode menggunakan kekerasan dan pemogokan umum kaum Bolsjewik sudah dapat merampas dan menguasai negeri. Berbeda dengan keadaan di Hindia Belanda metode seperti itu tidak cocok digunakan di Hindia dan hanya akan menimbulkan kesengsaraan bagi kaum buruh. Dalam rapat Semaun juga menegaskan agar bertindak dengan tenang dan sabar, yang terpenting adalah menjaga dan mempertahankan persatuan dan kedisiplinan sekuat-kuatnya serta lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan. Selain itu Semaun juga mengingatkan organisasi

---

<sup>173</sup> *Log. cit.*

<sup>174</sup> A.K. Pringgodigdo, 1980, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, hlm. 26.

komunis tidak bergantung pada organisasi pusat di Moskow melainkan bergantung pada keadaan-keadaan di dalam negeri sendiri berdasarkan adat dan kebiasaan rakyat setempat.<sup>175</sup>

Setelah kembali dari Moskow, Semaun juga memutuskan untuk memperkuat gerakan sekerja. Sebagai wujud dari rencananya, Semaun berinisiatif untuk mengadakan sebuah rapat, atas inisiatif Semaun ini maka pada tanggal 25 Juni 1922 diadakanlah rapat di Surabaya antara sarekat-sarekat sekerja. Dalam rapat Semaun menjelaskan perlu adanya persatuan antara dua sentral Sarekat sekerja yang ada di Yogyakarta dan di Semarang. Sebagai lanjutan rencana ini maka pada tanggal 3 September 1922 diadakan kembali rapat yang membuahkan hasil yaitu dibentuknya Persatuan Vakbonden Hindia (PVH). PVH ini terdiri dari Sarekat sekerja buruh partikulir dan Sarekat sekerja buruh pemerintah.<sup>176</sup>

Dalam rapat, beberapa peserta mengatakan bahwa Semaun telah membelok ke kanan, tetapi Semaun menegaskan bahwa dirinya masih tetap berpendirian seperti dulu dan Semaun juga mengatakan bahwa ia tidak pernah bekerja sembarangan menurut perintah dan tekanan dari orang lain, terlebih berdasarkan petunjuk dari Rusia karena menurut Semaun keadaan di Rusia berbeda dengan keadaan di Hindia. Pendirian Semaun ini didukung oleh Darsono yang tiba di Hindia pada bulan Februari 1923 setelah melakukan perjalanan ke luar negeri guna mempelajari keadaan di Rusia, Tiongkok, Jerman, dan Nederland. Darsono juga menegaskan dan memperkuat pendapat Semaun bahwa

---

<sup>175</sup> *Log. cit.*

<sup>176</sup> *Ibid.*, hlm. 86.

metode yang digunakan di luar negeri tidak cocok jika digunakan di Hindia Belanda untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Untuk menandingi kongres SI yang dilaksanakan di Madiun pada bulan Februari 1923 maka pihak PKI yang mendapat ancaman disiplin partai melakukan kongres yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal 4 Maret 1923. Kongres ini dihadiri oleh 16 cabang PKI, 14 cabang SI merah dan perkumpulan-perkumpulan sekerja komunis. Dalam kongres ini serangan-serangan terhadap CSI semakin tajam, Semaun mengatakan bahwa SI tidak lagi mementingkan kaum buruh dan rakyat Indonesia yang hidup dalam garis kemiskinan melainkan lebih mementingkan kaum modal bangsa Indonesia dan memboroskan uang hasil sumbangan dari rakyat.<sup>177</sup>

Pendapat Semaun tersebut dipertegas oleh Darsono yang mengatakan bahwa kaum komunis tidak akan melakukan pertumpahan darah tetapi akan bekerja dengan usaha-usaha yang jujur, hal ini juga sebagai upaya untuk menyinggung pihak CSI yang sebelumnya sangat gencar dalam mengkampanyekan gerakan Milisi Bumiputera (MB), selain itu Darsono juga mengatakan bahwa rakyat jelata selamanya tidak akan mendapat pengajaran di sekolah dikarenakan mahalnya biaya pendidikan dan diskriminasi bagi rakyat miskin.

Dalam rapat tersebut tampil seorang tokoh yang menganut paham komunis keagamaan yaitu Haji Mohammad Misbach yang berasal dari Solo. Misbach menunjukkan bahwa adanya persamaan antara paham komunis dengan paham

---

<sup>177</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

Islam yang berkaitan mengenai sebuah kewajiban menghormati hak-hak manusia dan berjuang dalam melawan segala bentuk penindasan. Selain itu Misbach menerangkan bahwa seseorang yang tidak menyetujui dasar-dasar komunis, mustahil dapat menjadi seorang Islam sejati; dosa itu akan menjadi besar lagi jika seseorang memakai agama Islam sebagai selimut mengayakan diri sendiri.<sup>178</sup> Apa yang dikatakan oleh Misbach ini adalah bentuk sindiran terhadap pemimpin-pemimpin CSI yang telah melakukan kebijakan partai terhadap PKI.

Sebagai sebuah partai modern, PKI mencangkup semua lapisan masyarakat baik itu dari kalangan priyayi sampai kalangan rakyat miskin. Komunis juga tidak membiarkan adanya perbedaan-perbedaan nasib dalam hal pangkat dan bangsa, komunisme juga menentang segala bentuk kelas-kelas manusia dengan kata lain menolak adanya kelas-kelas sosial dalam masyarakat, berpatokan dari dasar ini kaum komunis sangat gencar dalam mengkampanyekan semboyan “sama rasa sama rata”.

Hal senada yang mementingkan persamaan hak diulang kembali dalam kongres PKI yang diadakan di Sukabumi pada tanggal 6 Maret 1923. kongres-kongres yang dilaksanakan dengan singkat tersebut merupakan bentuk reaksi tandingan atas kongres yang dilaksanakan oleh CSI yang diadakan di Madiun pada bulan Maret 1923. Dalam kongres tersebut Darsono mengusulkan untuk mendirikan SI merah di segala tempat dimana SI putih didirikan, tujuan didirikan SI merah ini adalah untuk mengumpulkan pengikut-pengikut SI yang sama-sama

---

<sup>178</sup> *Log. cit.*

berhaluan komunis. SI merah ini pada perkembangannya dinamakan Sarekat Rakyat.<sup>179</sup> Sarekat Rakyat merupakan bawahan dari PKI.<sup>180</sup>

Sebelum diasingkan ke luar Hindia Belanda, Semaun dan anggota-anggota PKI yang lain menyusun sebuah peraturan partai untuk PKI. Yang memuat:

1. Keterangan tentang dasar aksi: berisi keadaan yang selalu berlawanan antara kaum kapitalis dengan kaum proletar. Sejak kedatangannya ke Indonesia kapitalisme selalu menindas kaum tani dan kaum buruh selain itu kaum pertengahan (priyayi) dan kaum terpelajar sudah menjadi perkakas kaum modal. Penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang bangsa lain, kebudayaan lain dan agama lain merupakan hasil dari kapitalisme. Sehingga pengusiran kekuasaan kolonial di tanah jajahan hanya dapat terjadi bersamaan dengan lenyapnya kapitalisme. Kemerdekaan dalam arti politik dan ekonomi hanya dapat terjadi jika alat-alat yang perlu untuk menghasilkan barang-barang berada dalam penguasaan majelis-majelis rakyat. Perjuangan yang dilakukan bukan hanya dikalangan nasional saja, tetapi juga dalam kalangan internasional, yaitu bersatu dengan kaum proletar sedunia. Tekanan yang ada pada akhirnya akan membangkitkan kaum proletar untuk melakukan perjuangan, dalam melakukan perjuangan kaum proletar harus bersatu dalam PKI, yang akan meyokong segala pergerakan rakyat dalam mentang segala bentuk penindasan dan akan memajukan rakyat Indonesia dalam segala hal.

---

<sup>179</sup> Pada rapat yang diadakan di Bandung tanggal 20-21 April 1924 dipertegas, barang siapa yang dianggap cakap untuk bergabung dengan komunis, awalnya dimasukkan dalam Sarekat Rakyat dan setelah menjalani berbagai latihan barulah diperbolehkan untuk masuk dalam PKI.

<sup>180</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

2. Program perjuangan politik, yaitu menunjukkan sistem pemerintahan yang diarahkan oleh sovyet-sovyet desa, sovyet pabrik, sovyet distrik, sovyet propinsi, sovyet pulau dan sovyet pusat; disamping itu untuk megusahakan sistem pemerintah yang diarahkan, juga harus berjuang untuk kemerdekaan bergerak (berkumpul, bersidang, mengeluarkan pikiran) dan berjuang untuk kemerdekaan dalam mengadakan pemogokan; serta meminta keadilan sosial yang berkaitan dengan kerja 8 jam sehari bagi buruh, larangan memperkerjakan buruh anak-anak, pembatasan buruh wanita, asuransi kaum buruh dengan tidak menggunakan premi, meminta penghapusan penale sanctie bagi kuli kontrak, pekerja rodi dan kerja desa; mensosialisasikan perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kehidupan umum; memperbaiki aturan-aturan yang berkaitan dengan pajak; memperbaiki sistem pengajaran dan kehakiman. Program-program perjuangan yang ada tidak dijalankan dengan meminta-minta kepada pihak pemerintah kolonial, tetapi harus dicapai dengan organisasi dan disiplin PKI yang kuat.

3. Anggaran dasar, meyakini bahwa PKI akan memimpin kaum proletar buruh dan kaum tani dalam berjuang melawan kaum kapitalisme dan segala bentuk kapitalisme. Dalam PKI juga dibentuk sistem keanggotaan yang terdiri dari anggota biasa dan anggota luar biasa. Anggota-anggota biasa itu merupakan suatu seksi yang jumlah anggotanya sekurang-kurangnya 6 orang, tetapi jika anggotanya kurang dari 6 orang maka mereka akan dimasukkan menjadi anggota tersiar. Sedangkan anggota-anggota luar biasa terdiri dari perkumpulan-perkumpulan yang sudah didaftarkan menjadi anggota partai yang bersangkutan. Jika sebuah perkumpulan merupakan sebuah perkumpulan politik maka

perkumpulan tersebut menjadi susunan bawah dari PKI, akan tetapi jika sebuah perkumpulan bukan merupakan perkumpulan politik maka perkumpulan tersebut akan menjadi anggota sel dari PKI.

4. Anggaran rumah tangga, memberikan kekuasaan yang sebesar-besarnya kepada seksi di tempat pengurus besar berkedudukan.<sup>181</sup>

Peraturan partai untuk PKI ini dikukuhkan dan diperkuat dalam kongres yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 7-10 Juni 1924.

Untuk pergerakannya PKI juga melakukan agitasi dengan menggunakan media massa yang bernuansa Islam, seperti: di Semarang terdapat Sinar Hindia, Soeara Ra'jat, Si Tetap; di Solo yaitu Islam Bergerak, Medan Moeslimin, Persatuan Ra'jat Senopati, dan Hobromarkoto Mowo; di Surabaya yaitu Proletar; di Yogyakarta Kromo Mardiko; sedangkan di Jakarta ada dua yaitu Nyala dan Kijahi Djagoer.<sup>182</sup>

#### **B. Menanamkan Kesadaran Nasional di Hindia Belanda Tahun 1914-1923.**

Gagasan Semaun tentang pentingnya kesadaran nasional di Hindia Belanda tertanam dalam diri Semaun seiring dengan keadaan rakyat Hindia Belanda yang hidup di bawah tekanan pemerintah kolonial dan kaum kapitalis. Keadaan seperti ini membangkitkan semangat Semaun untuk membela rakyat serta mengajak tokoh-tokoh pergerakan yang lainnya untuk bersama-sama memperjuangkan kehidupan rakyat Hindia Belanda kearah yang lebih baik.

---

<sup>181</sup> *Ibid.*, hlm. 30-31.

<sup>182</sup> Edi Cahyo, *op. cit.*, hlm. xxvi.

Pemikiran-pemikiran Sarekat Islam Semarang setelah di bawah kepemimpinan Semaun lewat Sinar Djawa dan Sinar Hindia selalu menyerukan masalah-masalah perkebunan, milisi bumiputera dan *Indie Weerbaar* serta *Volksraad*.<sup>183</sup> Semaun juga menghendaki pergerakan dalam memperbaiki kehidupan rakyat bumiputera dilakukan dengan aksi langsung dan revolusioner.

Semaun melihat bahwa pembukaan lahan-lahan perkebunan ternyata lebih menguntungkan pihak pengelola perkebunan, di sisi lain kehidupan rakyat bumiputera semakin hari semakin terhimpit, kenyataan sosial yang mereka lihat, dengar dan alami akhirnya mengugah tokoh-tokoh pergerakan Sarekat Islam Semarang bergerak secara radikal.

Untuk menyadarkan rakyat Hindia, Semaun menjelaskan bahwa kadaan yang terjadi di Hindia Belanda merupakan buah dari perbuatan kaum kapitalis. Kaum kapitalis ini semakin mendesak kemerdekaan mata pencarian kuno, sehingga kesabaran, ketentraman, kesenangan dan kedamaian nenek moyang akhirnya terdesak dan sirna.<sup>184</sup> Untuk memulihkan kembali kehidupan seperti dulu Semaun menjelaskan perlunya sebuah perjuangan yang kuat dalam melawan kapitalis.

Berbagai cara yang dilakukan oleh Semaun untuk menanamkan kesadaran nasional dikalangan rakyat seperti menuangkan ide gagasannya lewat surat kabar Sinar Djawa dan Sinar Hindia, selain itu Semaun juga memimpin berbagai pemogokan dan ikut dalam memprakarsai berbagai kongres SI yang berskala nasional.

---

<sup>183</sup> Dewi Yuliati, *op. cit.*, hlm. 41.

<sup>184</sup> Semaon, *Penuntun Kaum Buruh, op. cit.*, hlm. 19-20.

Sebagai sebuah organisasi yang menyerukan kepentingan rakyat maka Semaun menulis sebuah artikel kepada SI yang berjudul “perhimpoean Sarekat Islam (pembagian menoeraoet keperloean)” yang dimuat dalam Sinar Djawa tanggal 19-20 September 1917. Tulisan Semaun ini mengusulkan kepada CSI agar melakukan kembali penataan organisasi dengan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan anggota-anggota SI, usul Semaun ini akhirnya dibicarakan dalam kongres CSI di Betawi.<sup>185</sup>

Ide gagasan yang dituangkan Semaun lewat surat kabar selalu menyerukan pembelaan kepentingan kaum buruh yang selama ini ditindas oleh kaum pemilik modal, pendapat-pendapat yang bersifat sosialis-komunistis dituangkan Semaun dalam bukunya yang berjudul “penoentoen kaoem boeroeh dari hal sarekat sekerdja”, dalam bukunya Semaun juga menjelaskan “selamanja klas kapitalis, masih mempoenjai perkakas modal, pabrik, tanah dsb. Itoe, selamanja poen rakjat djelata dan kaoem boeroeh masih dapat diperas oleh kapitalis besar itoe.”<sup>186</sup>

Selain masalah perkebunan, masalah *Volksraad* dan *Indie Weerbaar* juga menjadi perhatian utama tokoh-tokoh Sarekat Islam Semarang, terutama Semaun, Marco dan Darsono. Lewat Sinar Djawa dan Sinar Hindia, Semaun menyampaikan gagasannya dalam menolak pembentukan *Volksraad* dan *Indie Weerbaar* yang dianggap hanya mementingkan kaum kapitalis dengan memanfaatkan rakyat bumiputera.

Dalam mengkritik *Volksraad* banyak nada-nada keras yang dilontarkan Semaun, seperti dalam Sinar Djawa tanggal 19 Januari 1918 dimana Semaun

---

<sup>185</sup> Soewarsono, *op. cit.*, hlm. 61.

<sup>186</sup> Semaon, *op. cit.*, hlm. 18.

mengatakan bahwa orang-orang yang akan duduk di dalam *Volksraad* tidak ada yang berguna bagi rakyat bumiputera terlebih bagi kaum kromo. Semaun juga menyarankan agar Tjokroaminoto bekerja untuk kaum kromo di luar *Volksraad* saja, sebab jika dalam *Volksraad* suara mereka pasti kalah.<sup>187</sup> Selain itu Semaun juga menulis dalam *Sinar Hindia* dengan judul “*Anti Indie Weerbaar*” yang mengulas tentang semakin terhimpitnya kehidupan rakyat Hindia karena modal asing.<sup>188</sup>

Lewat *Sinar Djawa* dan *Sinar Hindia* tokoh-tokoh Sarekat Islam Semarang juga memproklamasikan berbagai pemogokan yang dilakukan. Sehingga *Sinar Djawa* dan *Sinar Hindia* merupakan organ yang sangat penting bagi pergerakan Sarekat Islam Semarang dalam menyampaikan berbagai gagasan dalam menghimpun masa dan menjadi sumber pemasukan bagi kas Sarekat Islam Semarang.

Rasa simpati Semaun terhadap pergerakan buruh, dibuktikannya dengan mengkoordinir berbagai pemogokan. Pemogokan yang dilakukan bertujuan menuntut adanya perbaikan taraf hidup kaum buruh lewat kenaikan upah yang memenuhi standar kenaikan harga barang.

Ketika kenaikan harga barang, terutama beras tidak diiringi oleh kenaikan upah dan gaji buruh hal ini menimbulkan kecemasan para buruh. Kenyataan seperti ini mengantarkan Semaun sebagai tokoh pemimpin pemogokan yang cukup dikenal dikalangan kaum buruh. Setelah hampir setahun Semaun menjadi ketua Sarekat Islam Semarang, maka awal tahun 1918 Semaun berhasil

---

<sup>187</sup> Dewi Yuliati, *op. cit.*, hlm. 130.

<sup>188</sup> *Ibid*, hlm. 152.

memimpin berbagai pemogokan. Pemogokan pertama dilakukan pada sebuah perusahaan mebel dan Semaun atas nama Sarekat Islam Semarang berhasil memaksa pemilik mebel untuk memenuhi tuntutan pihak Sarekat Islam Semarang. Sejak berhasilnya pemogokan pertama yang dipimpin oleh Sarekat Islam Semarang diikuti oleh pemogokan-pemogokan di kota lain dan sejak saat itu pula Sarekat Islam Semarang di bawah pimpinan Semaun muncul sebagai pusat pergerakan.<sup>189</sup>

Rasa simpati Semaun terhadap kehidupan kaum buruh membawa Semaun berjuang bersama-sama tokoh pergerakan yang lainnya untuk membela kepentingan rakyat terutama kaum buruh lewat berbagai ide lewat media massa yang dituangkan dalam media massa terlebih ketika Semaun terpilih sebagai ketua Sarekat Islam cabang Semarang sampai Partai Komunis Indonesia banyak aksi protes dan pemogokan yang dilakukan.

---

<sup>189</sup> Dewi Yuliati, *op. cit.*, hlm. 47.

## BAB V

### KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Semaun merupakan salah satu tokoh pergerakan pada masa pemerintahan kolonial Belanda awal abad ke 20. Semaun dilahirkan di Tjurah Malang, Mojokerto, yang terletak di sebelah barat kota Surabaya, Jawa Timur, Semaun dilahirkan pada tahun 1899. Semaun merupakan putra dari Prawiroatmodjo, seorang buruh di jawatan kereta api di Surabaya. Semaun sendiri bukanlah keturunan priyayi seperti status kebanyakan tokoh pergerakan Indonesia pada abad ke 20, sehingga seluk beluk keluarganya tidak banyak diketahui oleh orang banyak. Karena hidup pada jaman politik etis, Semaun juga mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan di sekolah *Tweede Klas*, yang setaraf dengan Sekolah Dasar sekarang. Semaun juga pernah mengikuti pendidikan tambahan yang diselenggarakan oleh *Eerste Klas Inlandsche School* yang kemudian dikenal dengan HIS (*Holland Inlandsche School*). Karena kecerdasan dan keuletannya maka ketika ia duduk di kelas VI, Semaun diperbolehkan mengikuti ujian untuk menjadi pegawai Pamong Praja Rendah dan memperoleh sertifikat "*Klein Abtenaar*". Karena keterbatasan biaya membuat Semaun tidak bisa melanjutkan pendidikannya, kemudian Semaun memutuskan untuk bekerja di *Staatsspoor* (SS). Semaun diterima sebagai pegawai *Staatsspoor* karena sebelumnya telah dinyatakan berhasil menempuh ujian "pengetahoean oemoem" (*Algemeene Outwikkeling*) dan ujian "*Stationscommies*".

2. Karir politik Semaun dimulai ketika ia ikut bergabung dengan Sarekat Islam Surabaya tahun 1913, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Semaun semakin radikal ketika ia dipercayakan untuk menjadi ketua dari Sarekat Islam Semarang. Dalam bidang politik gerakan-gerakan Semaun sangat menentang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kolonial Belanda yang berkaitan dengan pembentukan *Volksraad* yang dianggap bukan sebuah konsensi untuk *Indie Weerbaar* dan Milisi Bumiputera. Menurut Semaun kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kolonial Belanda tidak memberikan keuntungan kepada rakyat Hindia Belanda, namun sebaliknya dimana rakyat dimanfaatkan untuk melindungi kepentingan pemilik modal di kawasan Hindia Belanda.

Dalam bidang sosial gerakan-gerakan yang dilakukan Semaun menentang berbagai sistem yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda. Sistem ini berkaitan dengan penggunaan bahasa, hatur sembah hormat terhadap pemimpin yang berasal dari keturunan Belanda, dan diskriminasi bagi kaum bumiputera di berbagai tempat umum seperti terminal, stasiun serta perbedaan perlakuan dalam mengenyam pendidikan.

Dalam bidang ekonomi berkaitan dengan upah yang diterima para buruh yang sangat tidak seimbang dengan pekerjaan yang telah mereka lakukan, untuk membela kaum buruh ini Semaun selalu menyerukan paham sosialis revolusioner yang dianggap paling ampuh dalam melawan kaum kapitalis. Selain itu Semaun juga ikut bergabung bersama PPKB yaitu sebuah organisasi yang tujuan dari gerakannya adalah membela kepentingan kaum buruh dalam memperoleh hak-haknya dari kaum pemilik modal atau kaum kapitalis. Secara umum gerakan-

gerakan yang dilakukan oleh Semaun dilancarkan lewat berbagai media massa seperti Sinar Djawa dan Sinar Hindia, selain itu mengkoordinir pemogokan-pemogokan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Belanda dan para pemilik modal.

3. Setelah dikeluarkan dari CSI Semaun mengkonsentrasikan diri pada PKI yang terbentuk pada tanggal 23 Mei 1920. Gerakan-gerakan radikal yang dilakukan oleh Semaun dan teman-temannya memberikan pengaruh yang sangat besar pada perkembangan Sarekat Islam Semarang yang pada akhirnya berubah menjadi sebuah partai yang beraliran komunis di Indonesia pertamakalinya, pembentukan partai komunis Indonesia ini merupakan bentuk rasa ketidakpuasan dari anggota Sarekat Islam Semarang yang menganggap CSI sudah tidak lagi mementingkan kepentingan rakyat yang menjadi anggota-anggotanya. Selain itu adanya keinginan dari Semaun dan teman-temannya untuk menciptakan sebuah partai modern kebangsaan yang bergabung dalam komintern (komunis internasional) yang bekerjasama dengan negara-negara yang berfaham komunis. Realita yang terjadi di Hindia Belanda memberikan sebuah kesadaran bagi Semaun untuk melakukan suatu perubahan terhadap kehidupan rakyat Hindia Belanda secara umum dan kaum buruh serta rakyat-rakyat kecil menuju kearah kehidupan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akira Nagazumi,  
1989, *The Dawn of Indonesian Nationalism: The Early Years of The Budi Utomo 1908-1918*. terj Grafiti dan KITLV, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia Budi Utomo 1908-1918*, Grafiti, Jakarta.
- 
- 1980, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Amelz,  
1952, *H.O.S. Tjokroaminoto: Hidup dan Perjuangannya*, jilid 1, Bulan Bintang, Jakarta.
- Ananta Toer, Pramudya,  
2002, *Rumah Kaca Cet IV*, Hasta Mitra, Jakarta.
- 
- 2003, *Sang Pemula*, Lentera Dipantara, Jakarta.
- Bambang Sulistyono,  
1995, *Pemogokan Buruh Sebuah Kajian Sejarah*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Budiawan,  
2006, *Anak Bangsawan Bertukar Jalan*, LKiS, Yogyakarta.
- Carey, Peter,  
2004, *Asal Usul Perang Jawa, Pemberontakan Sepoy dan Lukisan Raden Saleh*, LKiS, Yogyakarta.
- Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam,  
1985, *Tafsir Program Asas dan Program Tandhim Syarikat Islam*, Lajnah Tanfidziah, Jakarta.
- Dewi Yuliati,  
2000, *Semaoen Pers Bumiputera dan Radikalisasi Sarekat Islam Semarang*, Bendera, Semarang.
- Deliar Noer,  
1980, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, LP3ES: Jakarta.

Edi Cahyo,  
2003, *Jaman Bergerak di Hindia Belanda: Mosaik Bacaan Kaoem Pergerakan Tempo Doeloe*, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta.

Hulsebos, J,  
1955, *Komunisme: Pengaduan, Djanji, atau Antjaman*, terjemahan S.K. Bonar, PT. Pembangunan, Djakarta.

Harun Nasution,  
1992, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Korver, A.P.E.,  
1985, *Sarekat Islam: Gerakan Ratu Adil*, Grafiti Pers, Jakarta.

Kuntowijoyo,  
1997, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta.

---

2004, *Raja, Priyayi, dan Kawula: Surakarta 1900-1915*, Ombak, Yogyakarta.

Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan (LSIK),  
1983, *Rangkaian Peristiwa Pemberontakan Komunis di Indonesia, 1926-1948-1965*, (tanpa penerbit), Jakarta.

Muhammad Abdul Gani,  
1984, *Cita Dasar dan Pola Perjuangan Syarikat Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.

Marwati Djoened P dan Nugroho Notokusanto,  
1984, *Sejarah Nasional Indonesia IV*, Balai Pustaka, Jakarta.

Marco Kartodikromo,  
2000, *Student Hijo*, Aksara Indonesia, Yogyakarta.

Miriam Budiardjo,  
1981, *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*, Gramedia, Jakarta.

---

2001, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

- Mochtar Lubis, dkk,  
1987, *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- M. Rusli Karim,  
1983, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: sebuah potret pasang surut*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Nugroho Notokusanto,  
1971, *Norma-norma Dasar Pemikiran dan Penelitian*, Dephankam, Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S,  
1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Pitit Soeharto, & Ihsan Zainoel,  
1981, *Cahaya di Kegelapan*, Jayasakti, Jakarta.
- \_\_\_\_\_,  
1982, *Belunggu Ganas*, Aksara Jayasakti, Jakarta.
- \_\_\_\_\_,  
1982, *Permata Terbenam*, Aksara Jayasakti, Jakarta.
- Pringgodigdo,  
1973, *Ensiklopedia Umum*, Jajasan Kanisius, Jakarta.
- Ricklefs, M. C.  
2005, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Serambi, Jakarta.
- Ruth Thomas, McVey,  
1956, *The Rise Of Indonesian Communism*, Cornell University Press, Ithaca, New York.
- Sandra,  
1961, *Sedjarah Pergerakan Buruh Indonesia*, Pustaka Rakjat, Djakarta.
- Sartono Kartodirdjo,  
1993, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Semaun,  
2000, *Hikajat Kadiroen*, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta.

- 
- 2000, *Penuntun Kaum Buruh*, Jendela, Yogyakarta
- Soe Hok Gie,  
1990, *Di Bawah Lentera Merah: Riwayat Sarekat Islam Semarang 1917-1920*, Frantz Fanon Foundation, Jakarta.
- Soewarsono,  
2000, *Berbareng Bergerak: Sepenggal Riwayat dan Pemikiran Semaoen*, LKiS, Yogyakarta.
- Suhartono,  
1994, *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Takashi Shiraishi,  
1997, *An Age in Motion: Popular Radicalism in Java 1912-1926*, Terjemahan Hilmar Farid, *Jaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,  
1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisis ke-2*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Tuk Setyohadi,  
2002, *Sejarah Perjalanan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa*, Rajawali Corporation, Jakarta.
- Van Niel, Robert,  
1984, *Munculnya Elit Modern*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Zainul Munasichin,  
2005, *Berebut Kiri: Pergulatan Marxisme Awal di Indonesia 1912-1926*, LKiS, Yogyakarta.



**Semaun**

Sumber Internet [http:// www.Foto-foto.com](http://www.Foto-foto.com), 25/05/07.